

**KESEPAKATAN *PEACE CLAUSE OPEN-ENDED* PADA *BALI PACKAGE*  
ANTARA INDIA DENGAN AMERIKA SERIKAT TAHUN 2013-2014**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada  
Program Studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya



**Disusun oleh:**

**Andhika Putra Yudhistira**

**NIM. 125120401111016**

**PROGRAM HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2017**

# LEMBAR PENGESAHAN

## LEMBAR PENGESAHAN

### KESEPAKATAN PEACE CLAUSE OPEN-ENDED PADA BALI PACKAGE ANTARA INDIA DENGAN AMERIKA SERIKAT TAHUN 2013-2014

#### SKRIPSI

Disusun Oleh:

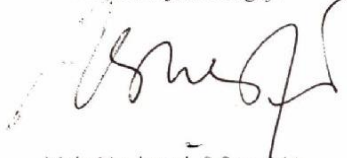
Nama: Andhika Putra Yudhistira

NIM: 125120401111016

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian sarjana pada tanggal 31 Juli 2017

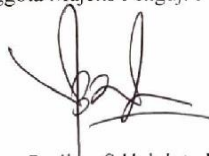
Tim Penguji:

Ketua Majelis Penguji



Mely Noviryani, S.Sos., MA.  
NIK. 2007077409112001

Anggota Majelis Penguji I



Gris Sintya Berlian, S.Hub.Int., MA.  
NIK. 2016079008252001

Sekretaris Majelis Penguji



Lia Nihlah Najwah, S.IP., M.Si.  
NIK. 2009068305212001

Anggota Majelis Penguji II



Aswin Arwanto Azis, S.IP., M.DevSt  
NIP. 197802202010121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Brawijaya



Prof. Dr. Uhu Luwigdo, SE, M.Si., Ak.  
NIP. 19690841994021001

# LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN  
KESEPAKATAN PEACE CLAUSE OPEN-ENDED PADA BALI  
PACKAGE ANTARA INDIA DENGAN AMERIKA SERIKAT TAHUN  
2013-2014  
SKRIPSI

Disusun Oleh:

Nama: Andhika Putra Yudhistira

NIM: 125120401111016

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing Utama

Gris Sintya Berlian, S.Hub.Int., MA  
NIK. 2016079008252001

Pembimbing Pendamping

Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt  
NIP. 197802202010121001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hubungan Internasional



Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt  
NIP. 197802202010121001

# LEMBAR PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

## LEMBAR PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andhika Putra Yudhistira  
NIM : 125120401111016  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)  
Prodi : Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

### ***Kesepakatan Peace Clause Open-Ended Pada Bali Package Antara India Dengan Amerika Serikat Tahun 2013-2014***

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan sejauh yang saya ketahui, bukan merupakan tiruan/duplikasi/plagiat dari skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapat gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Brawijaya maupun di Perguruan Tinggi atau Instansi manapun. Adapun materi yang bukan berasal dari pemikiran Saya, telah dikutip dengan mencantumkan sumber asli, melalui catatan kaki dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari pernyataan Saya terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku, berupa pencabutan predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 11 Juli 2017

Pembuat pernyataan,



Andhika Putra Yudhistira

125120401111016

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu 'alaikum Warahmatulahi  
Wabarakatuh.*

*Alhamdulillahirabbilalamin.*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan kasih sayang serta segala bantuan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dalam rangkaian pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Hubungan Internasional (HI) di Universitas Brawijaya. Serta tak lupa shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW atas segala bentuk tauladan beliau dalam menjalankan hidup di dunia ini.

Adapun dalam tugas akhir skripsi yang penulis kerjakan ini dengan penuh kesadaran diri penulis anggap masih jauh dari kata sempurna, karena disebabkan oleh segala keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Dengan judul “Kesepakatan *Peace Clause Open-Ended* pada *Bali Package* antara India dengan Amerika Serikat Tahun 2013-2014” penulis harap skripsi ini dapat berkontribusi dalam kajian keilmuan HI dan bermanfaat bagi siapa saja di masa mendatang.

Penulis mengucapkan begitu banyak terima kasih atas segala dukungan dan doa dari pihak-pihak yang membantu penulis setiap waktu dan setiap saat dalam proses penelitian skripsi ini, karena tanpa bantuan pihak-pihak di bawah ini skripsi penulis tidak akan mungkin selesai.

1. Allah SWT
2. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayah Yudi Oktariato dan Ibu Isnaeny, atas dukungan, kasih sayang, tidak bosan untuk mengingatkan penulis agar cepat menyelesaikan skripsi serta dorongan materil maupun spiritual sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Serta tak lupa

adik penulis Hanggar Reksa Putra Yudhistira dan sepupu penulis Rizky Putra Pratama yang senantiasa selalu menghibur dan memberikan semangat.

3. Alm. Eyang Kung Soedibyo dan Oma Esther Soedibyo yang senantiasa selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dan banyak petuah yang memberikan motivasi untuk penulis.
4. Ibu Gris Sintya Berlian, S.Hub.Int., MA dan Bapak Aswin Ariyanto Aziz, S.IP., M.DevSt selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang dengan sepenuh hati memberikan arahan dan bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini. Terlebih kepada Ibu Gris Sintya Berlian yang menjadi mentor sekaligus pembimbing utama penulis, beliau dengan sabar selalu mengingatkan penulis untuk menuliskan sumber dalam skripsi dan mengarahkan penulis untuk berpikir secara logika dalam pengerjaan skripsi. Tanpa arahan, bimbingan dan nasihat beliau-beliau penulis sadar masih jauh dari penulis untuk merangkai kata-kata pengantar pertanda telah usainya tahapan tugas akhir skripsi ini.
5. Ibu Mely Noviryani, S.Sos., MA dan Ibu Lia Nihlah Najwah, S.IP., M.Si selaku dosen dewan penguji penulis dalam ujian skripsi, yang mana atas saran dan masukan beliau-beliau dalam revisi skripsi penulis membantu skripsi ini agar menjadi lebih baik lagi.
6. Bapak Achmad Fathoni Kurniawan, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing akademik yang selama penulis kuliah terus membimbing dan memberi nasihat.

7. Seluruh Staf Pengajar Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terima kasih banyak atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis.
8. *My Special and The only one* Chikita Hesa Nova Pratama yang telah mendukung, menemani dan memberikan semangat setiap saat kepada penulis, selalu dan sangat menghibur penulis ketika *stuck* dengan pengerjaan skripsi, untuk segala hal baik waktu, doa, tenaga dan materi yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi hingga sampai pada tahap ini. *Thank you for always there beside me*
9. Uget-Uget United (Bayu Catur, Dhandi Widawan, Erwin Rahmadana, Aren Mentari, Ruth Irine, Iqbal Fadel, Ang Prabaraja, Tiara Prakasita, Maersk Gumay, Fadilah Ardiyani, Andika Wahyu, Muhammad Fajar, Pieter Hadinata) yang telah menjadi sahabat penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang. Banyak momen yang sudah terlewati bersama dari sedih, senang, bercanda ria, bertengkar dan lain sebagainya yang telah memberikan warna kepada kehidupan penulis. Terima kasih atas dukungan, waktu, dan doa, semoga tali persaudaraan tetap terjaga sampai akhir hayat dan semoga sukses untuk kita semua.
10. Teman-teman dengan dosen pembimbing Ibu Gris Sintya Berlian dan Bapak Aswin Ariyanto Aziz, yang bersama-sama menunggu jadwal konsultasi, membantu penulis dalam pengerjaan skripsi dan juga selalu memberikan informasi terkait proses pengerjaan skripsi.

11. Teman-teman SMA (Masruri, Muhammad Adryan, Taufik Hidayat, Dhiyas Aswin, Ajeng Silvia, Inung) yang memberikan warna pula dalam kehidupan penulis dan juga selalu memberikan semangat kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi. Semoga sukses untuk kita semua.
12. Teman-teman SMP (Ketut, Kemal, Ardiansyah, Graha, Adryan, Eriza, Amanda, Vicky, Wimbo, Azza) yang juga mendukung penulis agar segera lulus dan wisuda. Sukses untuk kita semua.

Akhir kata penulis ikut mendoakan agar semua amal kebaikan pihak-pihak yang tercantuk di atas mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis sadar bahwa rangkaian tulisan dalam bentuk skripsi ini juga banyak memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Atas selesainya tugas akhir ini penulis ucapkan syukur begitu dalam dan terbersit harapan agar penelitian ini selalu memberikan manfaat bagi orang-orang sekitar. Penulis merujuk *quotes* dari Film Death Note sebagai motivasi pribadi penulis: “*No matter how you gifted, you alone cannot change the world.*” Bahwa sepintar apapun kita atau seberbakat apapun, kita tidak akan bisa melakukan segalanya sendirian. Dibutuhkannya dukungan dan bantuan dari pihak-pihak terdekat agar kita dapat meraih apa yang kita inginkan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Malang, 14 Agustus 2017

Penulis



## ABSTRAK

Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 di Bali, negara-negara anggota WTO sepakat mengangkat beberapa isu yang diwujudkan dalam suatu kesepakatan yang dikenal sebagai *Bali Package*. Namun dalam KTM ini telah terjadi *deadlock* yang berawal dari permintaan India untuk menaikkan subsidi hasil pertanian sehingga dapat melebihi batasan awal 10% pada AoA (*Agreement on Agriculture*) sedangkan Amerika Serikat (AS) menolak permintaan tersebut. Setelah dilakukannya renegotiasi diantara anggota WTO dan Akhirnya AS memutuskan untuk melakukan negosiasi secara bilateral terhadap India dan pada akhirnya setelah negosiasi tersebut tercapainya keputusan akhir yaitu *Peace Clause Open-Ended*. Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu dan menjelaskan alasan mengapa dapat terjadi kesepakatan *Peace Clause Open-Ended* antara India dengan AS. Menggunakan teori negosiasi *Two Level Games* milik Robert D. Putnam, penelitian ini akan mencoba menganalisis *win-set* masing-masing negara di level internasional dan level domestik dan juga menganalisis apakah terjadi *overlapping win-set* atau tidak.

**Kata Kunci:** Konferensi Tingkat Menteri, *Peace Clause Open-Ended*, *Bali Package*, India, Amerika Serikat

## ABSTRACT

At Ninth Ministerial Conference in Bali, member countries of WTO agreed to launch some issues that realized in agreement as know as *Bali Package*. However at this Ministerial Conference has occurred a deadlock that began with Indias demand to be allowed raise farm production subsidy until exceed from 10% limit in AoA (Agreement on Agriculture) while United States (US) rejected it. After doing so a renegotiation among WTO's members and finally US decided to negotiate on bilateral with India and after that, the negotiation reach final decision which is *Peace Clause Open-Ended*. This research aims to find out and explain the reason why *Peace Clause Open-Ended* agreement can be reached between India and US. Using *Two Level Games* negotiation theory belong to Robert D. Putnam, this research will try to analyze *win-set* each other countries at international level and domestic level and also to analyze whether there is an *overlapping win-set* or not.

**Keywords:** Ministerial Conference, *Peace Clause Open-Ended*, *Bali Package*, India, United States



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>11</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>12</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>13</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>14</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>16</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>17</b>
1.1. Latar Belakang .....	17
1.2. Rumusan Masalah .....	26
1.3. Tujuan Penelitian.....	27
1.4. Manfaat Penelitian.....	27
1.4.1. Manfaat Keilmuan.....	27
1.4.2. Manfaat Praktis .....	27
<b>BAB II .....</b>	<b>28</b>
<b>KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>28</b>
2.1. Studi Pendahuluan .....	28
2.2. Kajian Teoritis .....	33
2.3. Operasionalisasi konsep .....	43
2.4. Alur Pemikiran .....	51
2.5. Hipotesis .....	52
<b>BAB III.....</b>	<b>53</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	53
3.2. Ruang Lingkup Penelitian	53
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	53

3.4.	Teknik Analisis Data .....	54
3.5.	Sistematika Penulisan .....	54
<b>BAB IV</b>	.....	<b>56</b>
<b>GAMBARAN UMUM</b>	.....	<b>56</b>
4.1.	Konferensi Tingkat Menteri .....	56
4.2.	Awal Mula <i>Peace Clause</i> .....	58
4.3.	Proposal G33 .....	66
<b>BAB V</b>	.....	<b>73</b>
	<b>PROSES NEGOSIASI INDIA TERHADAP PENCAPAIAN KESEPAKATAN <i>PEACE CLAUSE</i> PADA <i>BALI PACKAGE</i></b> .....	<b>73</b>
5.1.	Level Internasional: Strategi Negosiator .....	74
5.1.1.	Strategi Negosiator India: Berkoalisi dengan G33 .....	75
5.1.2.	Strategi Negosiator India: <i>Power</i> Politik Hak Veto.....	82
5.1.3.	Strategi Negosiator AS: Menyetujui Permintaan India di Akhir Negosiasi.....	90
5.2.	Level Domestik: Institusi Politik Domestik dan Preferensi & Koalisi Konstituen .....	93
5.2.1.	Institusi Politik Domestik India: Sistem Pemerintahan .....	94
5.2.2.	Institusi Politik Domestik India: Prosedur Peratifikasian.....	98
5.2.3.	Institusi Politik Domestik AS: Sistem Pemerintahan .....	110
5.2.4.	Institusi Politik Domestik AS: Prosedur Peratifikasian .....	113
5.2.5.	Preferensi: Pilihan India untuk Tidak Meratifikasi atau Meratifikasi TFA.....	117
5.2.6.	Preferensi: AS Menolak <i>Peace Clause</i> Tidak Terbatas Waktu .....	126
5.2.7.	Koalisi Konstituen: Kelompok Petani India.....	129
5.2.8.	Koalisi Konstituen: United States Council for International Business (USCIB).....	134
5.3.	<i>Overlapping Win-Set</i> antara India dengan Amerika Serikat .....	137
<b>BAB VI</b>	.....	<b>141</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>141</b>
6.1.	Kesimpulan.....	141
6.2.	Saran .....	143
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>144</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Overlapping win-set besar.....	30
Gambar 2 Overlapping win-set kecil .....	31
Gambar 3 Overlapping win-set tidak ada .....	31
Gambar 4 PM India Narendra Modi Bertemu Presiden AS Obama di Washington.....	80
Gambar 5 Pembagian Wilayah Administratif India.....	87
Gambar 6 Pembagian Wilayah Administratif Amerika Serikat.....	102
Gambar 7 Lembaga Politik Amerika Serikat .....	104
Gambar 8 Overlapping win-set antara Amerika Serikat dengan India .....	131

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Operasionalisasi Teori Two-Level Games.....	37
Tabel 2 Operasionalisasi win-set .....	39
Tabel 3 Perhitungan Subsidi AoA .....	54
Tabel 4 Timeline Kesepakatan Peace Clause .....	62
Tabel 5 Perbandingan Untung dan Rugi Preferensi India.....	116

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Support Price India .....	68
Grafik 2 Support Price Beras India jika Disesuaikan dengan Tingkat Inflasi .....	71



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Pemerintahan India .....	91
---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara merupakan aktor utama dalam keberlangsungan suatu hubungan internasional. Negara yang juga memiliki peran sebagai entitas tertinggi, mempunyai kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain menjadi hal yang penting karena kedaulatannya. Negara berusaha untuk menjalankan dan memastikan keberlangsungan hubungan internasional dan politik internasional demi tercapainya kepentingan domestiknya. Interaksi dalam hubungan internasional dan politik internasional mampu menunjukkan kemampuan negara dalam menjaga integritas teritorialnya.

Untuk mencapai kepentingan domestiknya, negara tidak akan bisa jika hanya bergantung pada kemampuannya negara tersebut sendiri. Melainkan memerlukan bantuan negara lain untuk dapat membantu mencapai kepentingan domestik negaranya. Oleh karena itu diperlukan adanya sebuah kerjasama antar negara untuk mendapatkan masing-masing keuntungan yang diinginkan. Dalam kerjasamanya, negara perlu bernegosiasi dengan negara lain yang menurutnya dapat saling memberi keuntungan.

Negosiasi pada sektor perdagangan merupakan instrumen efektif untuk mendapatkan keuntungan bagi negara. Pada paska perang dunia kedua, negara-negara di dunia menyadari dengan adanya negosiasi pada perdagangan dengan negara satu sama lain, maka akan memberikan keuntungan ekonomi dan dapat mensejahterakan penduduknya. Dan hal tersebut memunculkan kesadaran perdagangan lintas negara atau perdagangan global. Pada saat itu telah menjadi momen dimana dimulainya pembentukan rezim perdagangan internasional untuk memperkuat sistem perdagangan global agar berjalan lebih lancar dan bebas hambatan. Pada tahun 1948, 23 negara berkumpul dan berhasil menyepakati pembentukan *General*

*Agreement on Tariff and Trade* (GATT).<sup>1</sup> Persetujuan ini merupakan upaya awal terbentuknya sistem perdagangan global yang lebih bebas dan terorganisir dengan baik.

Perubahan GATT menjadi *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1995 memunculkan adanya penggolongan kelompok negara, yaitu negara berkembang dan negara maju. Kemiskinan yang masih banyak terjadi di negara berkembang terlebih di negara kurang berkembang atau *Least Developed Country* (LDC) menjadi perdebatan yang memunculkan pertanyaan apakah benar perdagangan global akan memberikan keuntungan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Prinsip perdagangan bebas hambatan yang menjadi prinsip utama WTO dianggap justru semakin menjerat dan membebani negara berkembang.<sup>2</sup> Sementara negara maju beranggapan bahwa kemudahan akses pasar dan bebas hambatan yang ditawarkan oleh WTO ini memberikan kesejahteraan bagi setiap negara. Namun pada kenyataannya, negara maju lebih diuntungkan daripada negara berkembang dikarenakan *power* yang dimiliki oleh negara maju lebih kuat dibandingkan dengan negara berkembang karena didukung kapasitas yang lebih baik,<sup>3</sup> Perbandingan besar *power* yang dimiliki antara kedua golongan negara tersebut memunculkan tantangan tersendiri terutama bagi negara berkembang dalam memperjuangkan kepentingannya. Keinginan tercapainya rasa keadilan perdagangan pada negara berkembang menjadi tujuan yang sangat penting terhadap forum internasional WTO. Namun perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang yang terjadi mengakibatkan ketidakjelasan dan lambatnya keputusan perundingan di WTO.

Pergeseran *power* terjadi ketika krisis melemahnya perekonomian negara-negara di dunia terutama negara maju akibat krisis global pada tahun 2007 yang memberikan dampak

---

<sup>1</sup> WTO. "Fiftieth Anniversary of The Multilateral Trading System" dalam [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/min96\\_e/chrono.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min96_e/chrono.htm) Diakses 25 Desember 2016

<sup>2</sup> Kwa Aileen. "The WTO and Developing Countries: a Foreign policy in Focus Brief on WTO" dalam <http://focusweb.org/node/62> Diakses 25 Desember 2016

<sup>3</sup> *Ibid.*

besar pada negara maju. Hal ini menyebabkan, arah jalan WTO bergeser untuk lebih mengadopsi kepentingan negara berkembang, seperti adanya *Doha Development Agenda* dimana memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pembangunan pada negara-negara berkembang dan LDC. Pada saat itu pula, negara berkembang semakin memperkuat koalisi dan semakin menuntut kepentingan negara berkembang. Kemudian pada saat inilah negara berkembang memiliki pandangan betapa pentingnya untuk memperjuangkan kepentingannya dan mewujudkan keadilan perdagangan dalam WTO.

WTO merupakan lembaga internasional untuk menjadi wadah kerjasama negara-negara di dunia dan wadah negosiasi dengan tujuan mendapatkan apa yang menjadi kepentingan mereka masing-masing. WTO lembaga internasional yang fokus pada isu perdagangan saat ini terdiri dari 164 negara anggota, di mana 117 di antaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanan terpisah,<sup>4</sup> memiliki sistem pengambilan keputusan secara konsensus dimana kesepakatan hanya dapat dicapai jika seluruh anggota yang hadir dalam suatu forum menyatakan setuju.

WTO memiliki agenda Konferensi Tingkat Menteri (KTM) setiap jangka waktu dua tahun. Pada tahun 2001, KTM WTO ke-4 telah diselenggarakan dan menghasilkan perundingan DDA (*Doha Development Agenda*) dengan 18 isu yang ditargetkan selesai pada tahun 2005, namun DDA mengalami kebuntuan. Kemudian kebuntuan tersebut terdapat jalan keluar dalam KTM WTO ke-9 yang diadakan pada tanggal 3-7 Desember 2013 di Nusa Dua, Bali yang dihadiri oleh 159 negara anggota. Pada KTM ke-9 ini negara partisipan sepakat mengangkat beberapa isu yang diwujudkan dalam suatu kesepakatan yang dikenal sebagai Paket Bali. Sebelumnya di dalam KTM ke-9 di Bali disepakati *Bali Package* yang berisi 4 dari 18 isu yang diangkat dalam Putaran Doha yaitu fasilitas perdagangan, pertanian, kapas

---

<sup>4</sup> Anonim. 2014. "World Trade Organization (WTO)" dalam [http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-\(WTO\).aspx](http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-(WTO).aspx) Diakses 5 Maret 2016

dan peningkatan kapabilitas negara kurang berkembang. Isu pertanian khususnya terkait subsidi hasil pertanian dan tarif produk pertanian menjadi isu yang sangat menentukan jalannya proses perundingan.<sup>5</sup> Kebuntuan berawal dari adanya proposal G33 (*Group of 33*) yang dipelopori oleh India untuk menaikkan subsidi hasil pertanian sehingga dapat melebihi batasan awal 10% pada AoA (*Agreement on Agriculture*) sedangkan Amerika Serikat (AS) dengan negara-negara maju lainnya menolak permintaan tersebut.<sup>6</sup>

India dengan G33 tetap bersikeras mempertahankan kenaikan subsidi tersebut sehingga membuat jadwal penyelesaian KTM ke-9 tersebut seharusnya selesai pada tanggal 6 Desember menjadi tanggal 7 Desember 2013. India merupakan negara dengan tingkat kelaparan tinggi yang menempati urutan ketiga di dunia, oleh karena itu India memiliki kekhawatiran tidak akan bisa bersaing dengan negara lain jika produktivitasnya menurun karena kurangnya kesejahteraan penduduknya.<sup>7</sup> Tanpa adanya subsidi tersebut, India tidak dapat memberikan kesejahteraan pada penduduknya dan terlebih lagi tidak dapat bersaing pada perdagangan global.

Dalam KTM ke-9 ini, salah satu hal yang membuat susahnyanya terjadinya kesepakatan adalah proposal G33.<sup>8</sup> G33 merupakan sebuah koalisi negara-negara berkembang yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan keamanan pangannya. G33 yang notabene anggotanya merupakan negara-negara agraris meminta diberi kelonggaran untuk mengamankan stok pangannya.<sup>9</sup> Proposal yang dipelopori oleh India tersebut berisikan tentang beberapa daftar kebijakan pendukung pertanian yang digunakan negara-negara

---

<sup>5</sup> Vazza. P. Agung. 2014. "Maju Mundur WTO" dalam <http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/14/08/29/nb1xwa26-maju-mundur-wto> Diakses 9 Maret 2016

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Jafri. Afsar. 2013. "India (G-33) Proposal on Food Security: A wrong move can jeopardize India's food security forever" dalam <http://focusweb.org/content/india-g-33-proposal-food-security-wrong-move-can-jeopardize-india%E2%80%99s-food-security-forever> Diakses 5 Maret 2016

<sup>8</sup> Bellman. Christophe. 2015. "The Bali Agreement: Implications for Development and the WTO" dalam <https://poldev.revues.org/1744> Diakses 11 Oktober 2016

<sup>9</sup> Anonim. *G-33 proposal: early agreement on elements of the draft Doha accord to address food security*. ICTSD FAO. California. 2013. Hlm. 1

berkembang (rehabilitasi lahan, manajemen kekeringan, dan program kerja dan pemukiman petani perdesaan) dan dibebaskan dari batasan pada jumlah pengeluaran yang diperbolehkan. Selain itu proposal tersebut juga berisikan tentang aturan subsidi pertanian WTO untuk dilonggarkan yaitu memperbolehkan negara berkembang untuk memberikan subsidi lebih besar terhadap produk pertanian sebagai bentuk kebijakan keamanan pangan.<sup>10</sup> Akan tetapi proposal tersebut tidak diterima oleh sebagian besar negara maju.<sup>11</sup>

Berdasarkan proposal tersebut, India dan negara-negara berkembang lainnya menginginkan subsidi untuk bidang pertanian dapat ditingkatkan melebihi dari 10% dan tanpa batasan waktu. Meskipun tidak diterima oleh AS dan negara-negara maju lainnya, India sebagai insiator proposal G33 bersikukuh untuk tetap memperjuangkan tuntutan peningkatan subsidi pertanian tersebut dengan menolak untuk menyetujui agenda fasilitas perdagangan sebelum kriteria ketentuan subsidi pertanian yang diajukan diterima.<sup>12</sup> Sikap gigih India untuk meminta subsidi domestik pada bidang pertanian ditingkatkan melebihi dari 10% ditolak oleh AS. AS dan negara-negara maju lainnya mengkhawatirkan jika subsidi tersebut ditingkatkan, negara-negara berkembang dapat membanjiri pasar internasional dengan produk agrikulturnya karena dapat mengganggu harga komoditas dunia.<sup>13</sup> Karena India tetap pada pendiriannya, Amerika Serikat (AS) dan negara-negara maju lainnya yang menolak permintaan G33, akhirnya mau menyetujui solusi *peace clause* yaitu subsidi boleh lebih dari

---

<sup>10</sup> Bellman. Christophe. 2015. "The Bali Agreement: Implications for Development and the WTO" dalam <https://poldev.revues.org/1744> Diakses 11 Oktober 2016

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Mazumdaru. Srinivas. 2014. "India's WTO veto may scupper global trade deal" dalam <http://www.dw.com/en/indias-wto-veto-may-scupper-global-trade-deal/a-17820925> Diakses 11 Oktober 2016

<sup>13</sup> Firmansyah. Fery dan Putu Hery. 2013. "WTO : Paket Bali Ciptakan Keuntungan US\$ 1 triliun" dalam <https://m.tempo.co/read/news/2013/12/07/090535486/wto-paket-bali-ciptakan-keuntungan-us-1-triliun/2> Diakses 11 Oktober 2016

10%, akan tetapi hanya berlaku selama empat tahun dan solusi selanjutnya akan dibahas pada KTM selanjutnya pada tahun 2017.<sup>14</sup>

Salah satu kesepakatan Bali *Agreement* yaitu perjanjian fasilitas perdagangan atau *Trade Facilitation Agreement* (TFA) direncanakan akan diratifikasi pada 31 Juli 2014, namun di hari mendekati untuk meratifikasi kesepakatan tersebut, India menolak untuk meratifikasinya dikarenakan India merasa akan kehilangan posisi tawar terkait isu subsidi dan penguatan stok produk pertanian.<sup>15</sup> India tidak mau menunggu untuk mendapatkan solusi permanen mengenai subsidi pertanian hingga tahun 2017, dan meminta untuk menyelesaikannya pada akhir tahun 2014. India menunda untuk meratifikasi perjanjian fasilitas perdagangan sebelum solusi permanen terhadap subsidi pertanian tercipta.<sup>16</sup> India merupakan satu-satunya negara yang menghalangi terjadinya kesepakatan *Bali Package* dikarenakan masih belum menerima terhadap keputusan mengenai subsidi hasil pertanian. *Bali Package* yang merupakan pencapaian WTO dalam membentuk perjanjian global yang ditandatangani semua negara.

Keputusan veto India dinilai sebagai penghalang perjanjian perdagangan global,<sup>17</sup> oleh karena posisinya tersebut India tetap berusaha untuk bernegosiasi dengan AS sebagai oposisi utama permintaan India. Awalnya AS mengupayakan untuk membuat negosiasi *Bali Package* ini tetap berjalan tanpa India. Akan tetapi dengan pertimbangan jika negosiasi dilanjutkan tanpa India, maka akan menyebabkan kerugian yang cukup signifikan bagi negara anggota WTO terutama negara maju (kerugian tersebut seperti negara di dunia akan lebih

---

<sup>14</sup> Marboen. Ade. 2013. "Ketua KTM ke9 WTO: Kami berhasil" dalam <http://www.antaraneews.com/berita/408629/ketua-ktm-ke9-wto-kami-berhasil> Diakses 9 Maret 2016

<sup>15</sup> Vazza. P. Agung. 2014. "Maju Mundur WTO" dalam <http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/14/08/29/nb1xwa26-maju-mundur-wto> Diakses 9 Maret 2016

<sup>16</sup> Mazumdaru. Srinivas. 2014. "India's WTO veto may scupper global trade deal" dalam <http://www.dw.com/en/indias-wto-veto-may-scupper-global-trade-deal/a-17820925> Diakses 11 Oktober 2016

<sup>17</sup> Kumar. Manoj dan Tom Miles. 2013. "India, isolated, toughs it out in WTO food-stockpiling row" dalam <http://www.reuters.com/article/us-trade-wto-india-idUSKBN0IP1R720141105> Diakses 9 Maret 2016

mengupayakan perdagangan pada tingkat regional atau bilateral daripada multilateral).<sup>18</sup>

Tidak hanya itu, negara maju akan kehilangan pasar yang besar jika melanjutkan perjanjian fasilitas perdagangan tanpa adanya India karena India merupakan negara dengan populasi terbesar kedua di dunia.

Akhirnya AS melakukan negosiasi secara bilateral terhadap India dan pada akhirnya setelah negosiasi tersebut India dan negara berkembang lainnya mendapatkan keputusan akhir *indefinite peace clause*.<sup>19</sup> Pada keputusan tersebut, negara-negara berkembang diperbolehkan menaikkan subsidiya melebihi dari batasan awal 10% pada *Agreement on Agriculture (AoA)*.<sup>20</sup> Keputusan tersebut mengubah *peace clause* sebelumnya dimana hanya bersifat empat tahun menjadi *open-ended* atau tidak terbatas waktu sampai solusi permanen diperoleh.<sup>21</sup> Hal ini mengubah isi dari *Bali Package* menjadi "*Public Stockholding for Food Security: The Bali decision was modified to the effect that until a permanent solution is agreed members shall not challenge compliance of a developing member with its obligation to support provided for traditional staple food.*"<sup>22</sup>

Hal yang dapat dilihat pada kasus tersebut adalah bagaimana usaha keras India untuk menyertakan kepentingan nasionalnya pada forum internasional. Dengan cara bernegosiasi terhadap negara-negara anggota WTO agar setuju dengan permintaanya, akhirnya dapat

---

<sup>18</sup> Dominguez. Gabriel. 2014. "What will India's veto of WTO deal cost global trade?" dalam <http://www.dw.com/en/what-will-indias-veto-of-wto-deal-cost-global-trade/a-17830770> Diakses 11 Oktober 2016

<sup>19</sup> Kumar. Manoj dan Krista Hughes. 2014. "India wins U.S. support for food scheme, ends WTO blockade" dalam <http://uk.reuters.com/article/uk-india-trade-breakthrough-idUKKCN0IX0B020141113> Diakses 9 Maret 2016

<sup>20</sup> Damodaran. Harish. 2014. "Explained: Understanding the permanent solution at WTO" Dalam <http://indianexpress.com/article/india/india-others/understanding-the-permanent-solution-at-wto/> Diakses 19 Oktober 2016

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Uddin. Fasih. 2015. "Multilateral Trade Negotiations Doha to Bali and Beyond" dalam <http://eds.a.ebscohost.com/abstract?site=eds&scope=site&jrnl=18127347&AN=102106830&h=V1AgsCzTTfgWB2Eg6p6%2boStoOE%2bGAn4YNt%2feahY4LMwWsHfbhQQ2LyzGoaUFWz85P8ScPCjPHt1Qj%2bnG1LqO5w%3d%3d&crI=c&resultLocal=ErrCrINoResults&resultNs=Ehost&crIhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d18127347%26AN%3d102106830> Diakses 19 Oktober 2016



membuahkan hasil sesuai dengan keinginan India yaitu subsidi diatas 10%. Dapat dikatakan negosiasi yang dilakukan oleh India tersebut membuahkan hasil terlebih lagi terhadap AS yang awalnya juga bersikukuh untuk menolak permintaan India. AS juga mengupayakan agar negosiasi *Bali Package* dapat diteruskan tanpa India. Usaha AS tersebut menandakan bahwa AS juga memiliki usaha yang keras agar kesepakatan TFA tetap dilanjutkan hingga pada tahap ratifikasi. Namun pada akhirnya AS memenuhi permintaan India agar subsidi pertanian ditingkatkan lebih dari 10% bersifat *open-ended* dan India mau menyetujui kesepakatan TFA.

India dapat membuat AS mau memenuhi permintaan India yang tentu menjadi kepentingan nasionalnya. Akan tetapi India lebih unggul dalam membawa kepentingannya kepada forum WTO dengan berlandaskan asas konsensus yang diterapkan WTO dan India memiliki *standpoint* yang konsisten. Selain itu, India juga berani untuk mengambil langkah tidak mau meratifikasi perjanjian fasilitas perdagangan jika keinginannya tidak tercapai. Posisi India ini merupakan indikator bahwa India siap dengan konsekuensi dari pengambilan sikap tersebut yaitu berakhirnya konferensi tanpa pencapaian kesepakatan. Di lain sisi, AS juga sangat mementingkan kepentingan nasionalnya terlihat dari usahanya untuk menolak permintaan India dan mengupayakan negosiasi tetap dilanjutkan tanpa mengikutsertakan India. Akan tetapi meskipun kedua negara tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dan memiliki usaha yang keras untuk mendapatkannya, tetap terjadi sebuah kesepakatan diantara India dan AS yaitu *Peace Clause Open-Ended*.

Hal tersebut memunculkan pertanyaan mengapa dapat terjadi kesepakatan *Peace Clause Open-Ended* antara India dengan AS padahal kedua negara memiliki kepentingan yang berbeda pada negosiasi *Bali Package*. Pada penelitian ini, penulis akan membahas alasan mengapa terjadi kesepakatan *Peace Clause Open-Ended* serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses terjadinya kesepakatan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, ditemukan sebuah dasar rumusan masalah yang dapat digunakan untuk memulai penelitian penulis, yakni: Mengapa terjadi kesepakatan *Peace Clause Open-Ended* pada *Bali Package* antara India dengan Amerika Serikat Tahun 2013-2014?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan alasan mengapa terjadinya kesepakatan *Peace Clause open-ended* pada *Bali package* antara India dengan Amerika Serikat.
2. Menjelaskan upaya yang telah dilakukan negosiator India dan Amerika Serikat untuk mendapatkan kepentingannya

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Keilmuan**

1. Menambah pengetahuan tentang studi yang terkait dengan negosiasi bilateral dan multilateral
2. Memberikan pengetahuan dan informasi yang terkait dengan pencapaian kesepakatan *Peace Clause open-ended* pada *Bali Package*
3. Menambah pengetahuan tentang strategi negara dalam bernegosiasi

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Menambah studi mengenai Konsep *Two Level Games* dan memahami untuk menggunakannya sebagai acuan analisa.

## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1. Studi Pendahuluan

Dalam penelitian dengan isu mengenai kesepakatan *Peace Clause Open-Ended* pada negosiasi *Bali Package* ini, diperlukan studi terdahulu sebagai landasan dan perbandingan atas penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan, dari segi isu maupun dari segi teorinya. Analisa dan perbandingan dengan studi terdahulu menjadi penting agar kemudian membantu penulis melakukan pengembangan penelitian ini, baik dari sisi isu maupun teorinya. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memiliki kontribusi bagi penelitian dengan isu kesepakatan *Peace Clause Open-Ended* pada negosiasi *Bali Package* khususnya dari segi isu atau teori yang terkait dalam penelitian ini dengan teori yang digunakan yaitu *Two Level Games*.

Studi terdahulu yang digunakan oleh penulis adalah tulisan milik R Rajesh Babu berasal dari Indian Institute of Management Calcutta yang berjudul “**The Post-Bali Debacle and India’s Strategy at the WTO: A Legal and Policy Perspective**” yang dipublikasikan pada tahun 2014.<sup>1</sup> Penulis memilih karya ilmiah ini karena menyediakan tambahan informasi mengenai kesamaan isu yang dipakai, yaitu mengenai negosiasi subsidi pertanian dalam *Bali Package*. Perbedaan terletak pada topik yang dibahas yaitu pada penulis memiliki topik mengapa bisa terjadi kesepakatan *Peace Clause Open-Ended* pada *Bali Package* antara India dan Amerika Serikat sedangkan pada tulisan milik R Rajesh Babu memiliki topik hanya sebatas bagaimana proses negosiasi India di internasional.

---

<sup>1</sup> Babu Rajesh R. 2014. *The Post-Bali Debacle and India’s Strategy at the WTO: A Legal and Policy Perspective*. Indian Institute of Management Calcutta. Hlm 1. Dalam [https://www.iimcal.ac.in/sites/all/files/pdfs/wps\\_754\\_0.pdf](https://www.iimcal.ac.in/sites/all/files/pdfs/wps_754_0.pdf) Diakses 19 Maret 2017

Pada penelitian yang ditulis oleh R Rajesh Babu tersebut membahas mengenai bagaimana proses negosiasi India terhadap isu permintaannya mengenai kenaikan subsidi hasil pertanian, namun hanya pada ruang lingkup internasional dan hanya pada ketika India memutuskan untuk menolak peratifikasian TFA.<sup>2</sup> Selain itu tulisan Rajesh ini memberikan informasi tambahan mengenai adanya sistem *Single Undertaking* di WTO.<sup>3</sup> Sedangkan pada penelitian penulis lebih berfokus pada alasan mengapa bisa terjadi kesepakatan *Peace Clause Open-Ended* pada *Bali Package* antara India dan Amerika Serikat.

Di awal ketika KTM 9 telah selesai, India telah menyepakati kesepakatan *Peace Clause* empat tahun dan menyetujui bahwa India akan meratifikasi perjanjian TFA ketika tahun 2014 nanti. Namun pada saat mendekati peratifikasian TFA, India mengubah keputusannya dibawah pemerintahan baru. India menolak untuk meratifikasi TFA sebelum permintaan *Peace Clause* diubah menjadi tidak terbatas waktu.<sup>4</sup> Keputusan India ini membuat negara-negara anggota WTO lainnya mengkritik dan menganggap India sebagai penghalang kesepakatan pertama yang dibuat oleh WTO.<sup>5</sup> *Stand point* yang dimiliki oleh India pada saat menolak ratifikasi TFA adalah didasarkan oleh perhatiannya terhadap isu keamanan pangan dan merasa bahwa negara maju tidak akan menaruh perhatiannya terhadap keamanan pangan ketika perjanjian TFA sudah diratifikasi.<sup>6</sup> India menjadikan TFA sebagai strateginya untuk memperoleh kepentingan kenaikan subsidi hasil pertanian tidak terbatas waktu.<sup>7</sup>

India memiliki posisi untuk menyatakan veto terhadap TFA hingga permintaannya dipenuhi tersebut didasarkan dengan prinsip yang diterapkan oleh WTO yaitu *Single Undertaking*. Prinsip ini merupakan peraturan dimana semua isu yang diangkat pada

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Vazza. P. Agung. Op. Cit.

<sup>5</sup> Babu Rajesh R. Op. Cit.

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm 2

<sup>7</sup> *Ibid.*

negosiasi, isu yang diangkat oleh negara maju maupun negara berkembang, harus dinegosiasikan, disetujui dan diadopsi bersama tanpa terkecuali.<sup>8</sup> Jika satu isu membuat negosiasi menjadi *deadlock*, isu-isu lainnya tidak akan bisa dilanjutkan meskipun sudah terjadi konsensus.<sup>9</sup> Dengan ini semua *stakeholders*, termasuk anggota yang memiliki *power* kecil bisa mendapatkan kepentingannya dan prinsip *Single Undertaking* ini mengutamakan keadilan dan mengurangi ketidakseimbangan *power* antar negara.<sup>10</sup> Oleh karena prinsip inilah negara anggota WTO lainnya tidak bisa meneruskan yang merupakan bagian dari kesepakatan *Bali Package* karena ada satu isu yaitu isu pertanian dan fasilitas perdagangan yang masih belum terjadi kesepakatan bersama.

Selain mengenai prinsip *Single Undertaking*, Rajesh juga menjelaskan apa sebenarnya isi dari TFA itu sendiri. TFA merupakan perjanjian yang bertujuan untuk mengurangi halangan administrasi di pelabuhan dan bea cukai, dengan begitu akan menghemat biaya transaksi dan membebaskan aliran barang lintas negara.<sup>11</sup> Perjanjian ini juga akan menghilangkan hambatan non tariff, mempercepat pergerakan barang, dan mempermudah perizinan masuknya barang.<sup>12</sup> Selain itu, perjanjian fasilitas perdagangan juga akan mengurangi biaya perdagangan global 14,1% untuk negara *low-income*, 15,1% untuk negara *middle-income* dan 12,9% untuk negara *upper-middle*.<sup>13</sup> Dengan begitu meningkatkan efisiensi bea cukai dan transportasi akan mengintegrasikan negara berkembang terhadap ekonomi global dan meningkatkan daya saing ekspor atau *Foreign Direct Investment* (FDI).<sup>14</sup>

Melalui tulisan milik R Rajesh Babu tersebut, penulis dapat memahami bahwa India mengubah keputusannya untuk menolak ratifikasi TFA dan meminta *Peace Clause* diubah

---

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm 12

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm 3.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

menjadi tidak terbatas waktu dikarenakan keinginannya untuk mengamankan pangannya dan juga karena khawatir akan negara maju yang nantinya tidak akan menaruh perhatiannya terhadap isu keamanan pangan. Veto yang dilakukan oleh India tersebut dapat membuat negara anggota WTO lainnya tidak meneruskan perjanjian lainnya pada *Bali Package* dikarenakan adanya sistem *Single Undertaking* yang diterapkan WTO bahwa jika terjadi *deadlock* terhadap satu isu, maka isu-isu lainnya tidak akan bisa dilanjutkan sebelum terjadi kesepakatan pada isu yang membuat *deadlock* tersebut. Dengan ini penulis mendapatkan informasi mengenai salah satu proses negosiasi India terhadap *Peace Clause* yang terjadi pada level internasional.

Kemudian studi terdahulu lain yang digunakan oleh penulis adalah milik Byung Hwa-Chung berasal dari Universitas Massachusetts yang berjudul “**A Two-Level Games Analysis of the Agricultural Trade Negotiations Between the United States and the European Community in the Uruguay Round**” yang dipublikasikan pada tahun 2014.<sup>15</sup> Penulis memilih karya ilmiah ini karena memberikan tambahan informasi mengenai garis besar teori *Two Level Games* oleh Robert D. Putnam. Tulisan Byung menjelaskan bahwa *Two Level Games* ini menjelaskan proses sebuah negosiasi suatu negara terhadap negara lain agar terciptanya sebuah kesepakatan atau perjanjian. *Two Level Games* mendefinisikan ada dua tahapan proses negosiasi yang dilakukan oleh suatu negara, yaitu pada level nasional dan internasional. Pada level nasional, kelompok dalam negeri berusaha mendapatkan kepentingannya dengan menekan pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung.<sup>16</sup> Pada level internasional, pemerintah nasional berusaha untuk memaksimalkan

---

<sup>15</sup> Chung Hwa Byung. 2014. *A Two-Level Games Analysis of the Agricultural Trade Negotiations Between the United States and the European Community in the Uruguay Round*. University of Massachusetts. Dalam [scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2350&context=theses](http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2350&context=theses) Diakses 20 April 2016

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm 9

kemampuannya untuk memuaskan apa yang diinginkan oleh pihak dalam negeri, dengan meminimalkan kepentingan asing yang buruk.<sup>17</sup>

Byung mengaplikasikan teori *Two Level Games* milik Putnam pada isu negosiasi antara Amerika Serikat dengan European Community di *Uruguay Round*. Menjelaskan proses negosiasi yang dilakukan oleh kedua pihak mengenai isu pertanian.<sup>18</sup> Kedua belah pihak memiliki *power* yang terhitung sama dan susah untuk mengalah karena masing-masing mempertahankan kepentingannya yang dibawa pada forum negosiasi.<sup>19</sup> Pada level 1, Byung menganalisis posisi dan apa yang ingin dicapai oleh masing-masing negara partisipan *Uruguay Round*. Amerika Serikat dan *European Community* yang mempunyai kepentingan besar pada isu pertanian.<sup>20</sup> Di level 1 ini negosiasi yang dilakukan oleh negosiator masing-masing negara untuk membentuk sebuah perjanjian.<sup>21</sup> Pada level 2, Byung menjelaskan adanya tekanan dan kepentingan dari domestik setiap negara terhadap negosiator yang dijadikan sebagai kepentingannya di forum negosiasi. Di level 2 ini terjadi usaha untuk mendapatkan persetujuan ratifikasi perjanjian yang dinegosiasikan pada level 1 sebelumnya.<sup>22</sup> Persetujuan tersebut harus disetujui oleh birokrasi atau pihak kepentingan domestik yang nantinya akan dibawa kembali pada level 1.<sup>23</sup> Kemudian pada teori *two level games* dijelaskan adanya *win-set* untuk menentukan hasil negosiasi apakah akan berhasil atau tidak.<sup>24</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm 3

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm 5

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm 6

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm 11

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

## 2.2. Kajian Teoritis

Untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini penulis menggunakan Konsep *Two Level Games*. Teori tersebut dicetuskan oleh Robert D. Putnam pada tulisannya yang berjudul *Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two Level Games* dan dipublikasikan pada tahun 1988.

Politik dari berbagai negosiasi yang bersifat internasional seringkali dapat dipahami sebagai permainan dua level (*Two Level Games*), dua level tersebut adalah level nasional dan level internasional<sup>25</sup>. Pada level nasional, kelompok dalam negeri berusaha mendapatkan kepentingannya dengan menekan pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung dan politikus akan menghimpun *power* dengan berkoalisi dengan grup lainnya. Pada level internasional, pemerintah nasional berusaha untuk memaksimalkan kemampuannya untuk memuaskan apa yang diinginkan oleh pihak dalam negeri, dengan meminimalkan kepentingan asing yang merugikan. Negosiator yang mewakili masing-masing negara akan bertemu dan berunding untuk mencapai sebuah kesepakatan. Negosiator bisa merupakan kepala pemerintahan seperti diplomat, ketua partai yang terdiri dari banyak koalisi, pemimpin kelompok etnik, dan lain sebagainya yang dipercaya memiliki kredibilitas seorang negosiator.

Putnam mengibaratkan masing-masing pemimpin negara yang berperan sebagai negosiator yang berada di kedua papan permainan. Pada meja seberang internasional duduk rekan asing, dan pada sisinya duduk diplomat dan penasehat internasional yang lain. Di sekitar meja dalam negeri di belakangnya duduk pihak pemegang kepentingan seperti anggota partai dan parlemen dalam negeri, perwakilan kelompok kepentingan utama, dan penasehat politik. Kompleksitas yang biasanya terjadi dari two-level games adalah bahwa

---

<sup>25</sup> Putnam, D. Robert. 1998. *Diplomacy and Domestic Politics : The Logic of Two-Level Games*. The MIT Press. Vol. 42 No. 3 Hlm 434.



gerakan rasional bagi pemain pada satu papan bisa tidak sesuai atau menguntungkan bagi pemain yang sama pada papan yang lain.

Seperti yang dikatakan oleh Putnam, proses negosiasi dan negosiasi dapat dibagi menjadi dua tahapan, yaitu level internasional atau **level I**, dimana tawar-menawar terjadi diantara para negosiator untuk mencapai kesepakatan sementara. Kemudian level nasional atau **level II**, dimana diskusi lingkup domestik para negosiator apakah akan meratifikasi kesepakatan yang terjadi di level I atau tidak. Jika tidak, maka negosiator akan bernegosiasi kembali di level internasional untuk menyampaikan apa yang perlu diubah pada kesepakatannya. Pada level II tentu terjadi proses konsultasi dan tawar menawar untuk menentukan posisi negosiator di level I. Keinginan ratifikasi pada level II akan mempengaruhi proses tawar menawar pada level I.<sup>26</sup> Jika pihak-pihak berkepentingan pada level II menolak kesepakatan, hal tersebut memungkinkan terjadinya kegagalan untuk mencapai kesepakatan. Ratifikasi kesepakatan seringkali berupa voting secara formal pada level II, seperti voting dua per tiga yang dibutuhkan secara konstitusi di Negara Amerika Serikat untuk meratifikasi perjanjian. Karena persetujuan yang sama harus diratifikasi oleh kedua pihak, kesepakatan pada level I awal tidak dapat diubah pada level II tanpa membuka kembali negosiasi level I. Atau dengan kata lain ratifikasi terakhir harus ditentukan apakah setuju atau tidak setuju.

Level I merupakan tahap negosiasi dan pada level II merupakan tahap ratifikasi. Ratifikasi dalam hal ini bukan dalam arti sebenarnya, Putnam menggunakan kata ratifikasi untuk membuatnya lebih umum dimana kata ratifikasi ini memiliki artian segala bentuk proses pengambilan keputusan kebijakan di level II yang dibutuhkan untuk mengesahkan dan

---

<sup>26</sup> *Ibid. hlm 436*

mengimplementasikan perjanjian di level I.<sup>27</sup> Ratifikasi juga memiliki artian sebuah proses dimana hasil negosiasi di level I diterima oleh pemain di level II<sup>28</sup>.

Dalam proses negosiasi tersebut, tidak hanya tekanan dari domestik yang dapat memberikan pengaruh, melainkan tekanan internasional juga dapat berpengaruh. Adanya tekanan internasional dapat juga memberikan pengaruh pada kedua level yaitu level internasional dan level domestik<sup>29</sup>. Putnam menggambarkan bagaimana hubungan domestik dan internasional itu saling terkait dengan menggabungkan analisa “*Second Image*” dan “*Second Image Reversed*”<sup>30</sup>. Analisa tersebut merupakan hasil dari pemikiran realis dan liberalis. *Second image* (Realis) menganalisa hubungan domestik yang memiliki pengaruh terhadap internasional dimana politik internasional dipengaruhi oleh sebuah rezim domestik suatu negara. Sedangkan *Second Image Reversed* (Liberalis) menganalisa sebaliknya yaitu internasional memiliki pengaruh terhadap domestik<sup>31</sup>.

Agar terciptanya sebuah persetujuan diantara kedua level, negosiator membutuhkan yang namanya *win set*. *Win set* adalah sebuah kepentingan yang diperjuangkan pada konstitusi di level II, yang kemudian kepentingan tersebut akan dibawa ke level I untuk dinegosiasikan dengan pihak lain<sup>32</sup>. Jangkauan kemungkinan perjanjian yang dapat diterima oleh negosiator internasional lainnya di level I disebut sebagai *win set* level I<sup>33</sup>. Dalam mencapai perjanjian tersebut, negosiator harus bisa mempertemukan hal yang diinginkan oleh negosiator negara lain di level I dan hal yang mau untuk diratifikasi oleh konstituen domestik

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Schoppa. J. Leonard. 1993. “*Two Level Games and Bargaining Outcomes: Why Gaiatsu Succeeds in Japan in Some Cases but not Others*”. International Organization. Volume 47. No 3. Hlm 369. Dalam [http://www.jstor.org/stable/2706980?seq=17#page\\_scan\\_tab\\_contents](http://www.jstor.org/stable/2706980?seq=17#page_scan_tab_contents). Diakses 17 Oktober 2016.

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm. 430

<sup>31</sup> Trnik. Michal. 2007-2008. “Two-Level Games and Base Politics: Understanding the Formulation of Czech and Polish Foreign Policy Responses to U.S. Military Base Deployment Proposals”. The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies. Johns Hopkins University. Dalam [http://michal.trnik.com/prace/jones\\_final2.pdf](http://michal.trnik.com/prace/jones_final2.pdf) Hlm. 4. Diakses 16 Oktober 2016

<sup>32</sup> Putnam. D. Robert. Op. Cit. Hlm. 437

<sup>33</sup> Trnik. Michal. Op. Cit. Hlm 5

atau disebut sebagai *win set* level II<sup>34</sup>. Negosiator harus mampu menyusun kerangka *win-set* untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuannya dalam bernegosiasi di tingkat I dan II tersebut. *Win-set* ini sangatlah penting karena mampu mereduksi kemungkinan negara gagal meratifikasi perjanjian.

Sebuah perjanjian akan mungkin terjadi jika *win-set* saling tumpang tindih atau *overlapping*. *Overlapping* merupakan pertemuan antara *win-set* masing-masing negosiator<sup>35</sup>. Semakin besar *win-set* semakin membuka kemungkinan untuk *overlapping win-set*. Sebaliknya jika semakin kecil ukuran *win-set* semakin kecil untuk *overlapping win-set*. *Overlapping win-set* merupakan sebuah kondisi dimana pilihan hasil dari negosiasi di level internasional dapat diterima oleh konstituen domestik sehingga terjadi ratifikasi perjanjian internasional. Jika *win-set* domestik suatu negara besar (memiliki jumlah kepentingan yang banyak), maka terdapat kemungkinan besar untuk *overlap* dengan kepentingan negara lawan negosiatornya sehingga memungkinkan pula untuk menghasilkan sebuah perjanjian. Jika *win-set* domestik suatu negara kecil (memiliki jumlah kepentingan yang sedikit), maka ada kemungkinan tidak terjadi *overlapping win-set* karena tidak bertemunya kepentingan-kepentingan yang dibawa oleh negosiator dan pada saat inilah terjadinya yang namanya *deadlock* atau sebuah kebuntuan pada negosiasi.

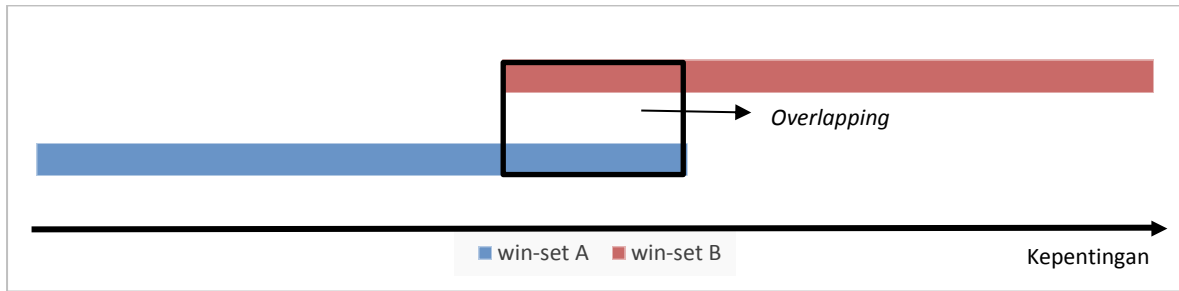
Untuk mempermudah memahami *overlapping win-set*, penulis memberikan gambaran yang diolah berdasarkan pemikiran Putnam, sebagai berikut ini:

---

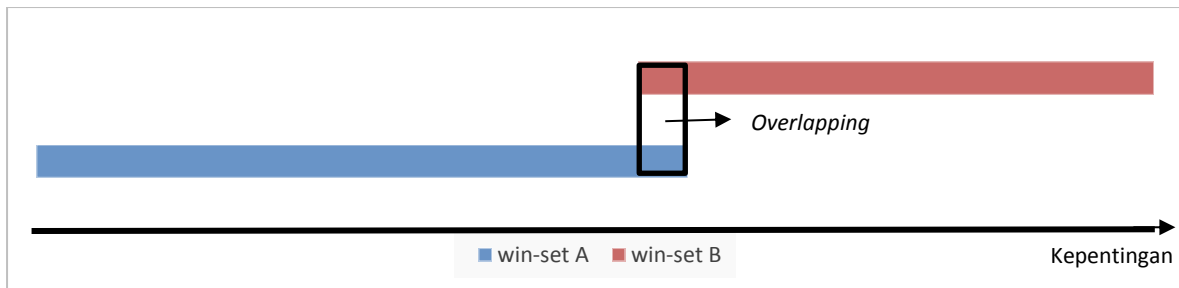
<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Putnam. D. Robert. Op.Cit. hlm 438

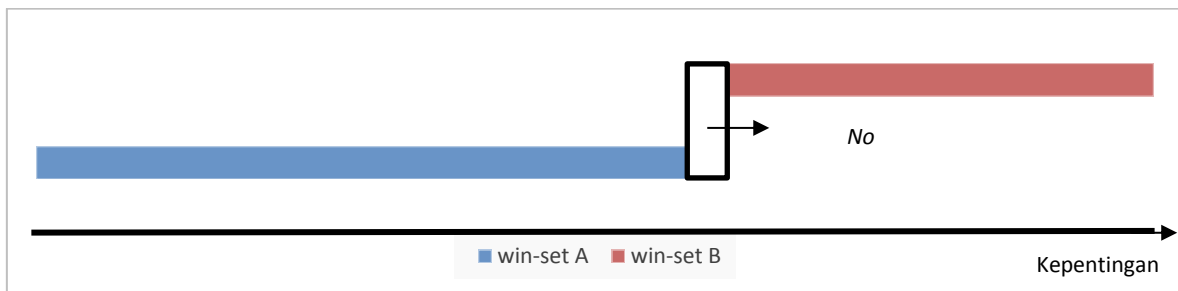
Gambar 1 *Overlapping win-set besar*



Gambar 2 *Overlapping win-set kecil*



Gambar 3 *Overlapping win-set tidak ada*



### Ilustrasi penulis

Ketiga gambar diatas menjelaskan tentang besar kecilnya suatu *win-set* yang akan mempengaruhi sebuah keputusan meratifikasi perjanjian. Gambar pertama menjelaskan *win-set* yang dimiliki oleh negara A dan B sama-sama besar sehingga membuat kepentingan masing-masing saling *overlap*. *Overlap* besar inilah yang menghasilkan kemungkinan besar untuk terjadi kesepakatan.

Gambar kedua menjelaskan *win-set* yang dimiliki oleh negara B lebih kecil dibandingkan dengan *win-set* milik negara A. Meskipun ada titik temu, *overlap* dapat terjadi

dengan kemungkinan yang sangat kecil jika dibandingkan dengan gambar pertama. *Overlapping win-set* kecil ini mempunyai dua kemungkinan, terjadinya kesepakatan atau tidak. Terjadinya sebuah kesepakatan atau tidak bergantung pada negara dengan *win-set* lebih kecil karena negara tersebut memiliki posisi tawar atau *bargaining position* yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara dengan *win-set* lebih besar. Oleh karena itu sesuai pada gambar 2, negara B memiliki *bargaining position* lebih tinggi dibandingkan dengan negara A sehingga dibutuhkan strategi negosiasi yang baik jika ingin menciptakan kesepakatan.

Gambar ketiga menjelaskan *win-set* negara B sangat kecil sehingga tidak adanya titik temu antara *win-set* negara A dan negara B. Dan pada akhirnya karena tidak terjadi - *overlapping win-set*, proses negosiasi akan mengalami *deadlock*.

Ada tiga faktor yang sangat penting yang mempengaruhi pembuatan kerangka *win-set*<sup>36</sup>:

### **1. Preferensi dan koalisi pada tingkat II**

Berdasarkan rincian politik pada Level II, kemungkinan untuk menguraikan apa yang menjadi kepentingan adalah yang mengatur ukuran *win-set*. Adanya preferensi atau sebuah pilihan untuk memilih menyetujui atau tidak menyetujui sebuah kesepakatan ini yang mempengaruhi ukuran *win-set*. Dalam menentukan untuk menyetujui atau tidak menyetujui sebuah kesepakatan, tergantung pada besar kecilnya harga yang harus dibayar atau kerugian yang diterima negara tersebut. Semakin rendah kerugian jika tidak terjadi kesepakatan atau *no agreement* bagi negara, semakin kecil *win-set* tersebut. Beberapa konstituen dalam negeri mungkin menghadapi kerugian sedikit jika memilih *no agreement* dan bisa juga membuat

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm 441-452

kerugian besar. Evaluasi dari kerugian dan keuntungan pada *no agreement* mungkin dapat terjadi pada konstituen di level II.

Partisipasi dari konstituen juga mempengaruhi besar kecilnya *win set* suatu negara. Contohnya ketika kerugian dan keuntungan yang ditawarkan pada kesepakatan terkonsentrasi, merupakan hal yang masuk akal jika konstituen yang memiliki kepentingan banyak akan mempengaruhi proses ratifikasi. Beberapa kelompok kepentingan pada level II biasanya memiliki pilihan yang berbeda pada banyak isu yang mengikutsertakan negosiasi multi-isu. Kelompok yang memiliki kepentingan besar pada suatu isu yang dinegosiasikan biasanya akan mempertahankan posisinya secara kuat pada isu tersebut. Adanya tekanan dari pihak atau kelompok yang memiliki kepentingan di domestik bersifat isolasionis (menolak kerjasama internasional) dan kelompok kepentingan bersifat internasionalis (mendukung kerjasama internasional). Negara yang *self-sufficient* akan cenderung bersifat isolasionis sehingga *win-set* menjadi lebih kecil, sedangkan negara yang *dependent* akan cenderung internasionalis dan sehingga *win-set* menjadi lebih besar. Ini artinya negosiator akan dihadapi oleh banyak kepentingan yang diinginkan di level II. Negosiator harus bisa membuat sebuah koalisi antara pihak atau kelompok kepentingan agar terciptanya sebuah *win-set*. Koalisi disini berarti gabungan dari beberapa kepentingan hingga menjadi satu kesatuan dan membentuk sebuah *win-set*.

## **2. Institusi di Tingkat II**

Institusi politik atau sebuah struktur politik yang membentuk sistem pemerintahan sebuah negara dapat mempengaruhi besar kecil *win-set*. Pada institusi politik ini terdapat dua unsur yaitu proses atau prosedur peratifikasian dan sifat pemerintahannya. Prosedur ratifikasi jelas mempengaruhi ukuran *win-set*. Misalnya,

jika dua-pertiga suara diperlukan untuk ratifikasi di sebuah negara, *win-set* pasti akan lebih kecil karena ada banyaknya kepentingan yang dapat dimasukkan dalam peratifikasian oleh berbagai pihak kepentingan, sehingga tidak bisanya terkonsentrasi *win-set* tersebut dan menjadi lebih kecil. Dibandingkan dengan hanya menggunakan suara mayoritas, *win-set* akan lebih mudah untuk terkonsentrasi dan membuat *win-set* menjadi lebih besar.

Praktek politik domestik juga dapat berpengaruh besar kecilnya suatu *win set*. Semakin besar otonomi pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan atau disebut sebagai sentralisasi kekuasaan, maka ukuran *win-set* akan semakin besar dan kemungkinan untuk mencapai sebuah kesepakatan akan semakin besar pula. Jika kecilnya otonomi pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan karena adanya pembagian kekuasaan pemerintah pusat ke pemerintah daerah (desentralisasi), maka setiap pemerintah daerah memiliki kepentingannya masing-masing sehingga *win-set* menjadi lebih kecil.

### **3. Strategi negosiator di Tingkat I**

Setiap negosiator Tingkat I memiliki kepentingan kuat dalam memaksimalkan kemungkinan untuk terjadi kesepakatan. Untuk mendapatkan kepentingannya tersebut, negosiator harus memiliki strategi atau taktik untuk memaksimalkan *win-set* pihak lain dengan mempertimbangkan *win-set* miliknya sendiri.<sup>37</sup> Strategi yang digunakan oleh negosiator dapat berupa meningkatkan atau menurunkan *bargaining position* tergantung pada kemampuan negara tersebut. *Bargaining position* merupakan posisi tawar menawar suatu negara untuk menentukan apakah negara tersebut memiliki posisi yang lemah karena lebih membutuhkan kesepakatan perjanjian

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm 450

daripada lawannya ataukah posisi negara tersebut kuat karena tidak terlalu membutuhkan kesepakatan perjanjian dibandingkan dengan lawannya. Jika negosiator ingin memperbesar *win-set*, maka dia harus menurunkan *bargaining position* dan hal yang dapat dilakukan adalah seperti *side-payment* (seperti menawarkan kesepakatan khusus yang menguntungkan pihak lawan negosiasi). Jika negosiator ingin memperkecil *win-set* dan berusaha untuk memperbesar *win-set* lawan, maka dia harus meningkatkan *bargaining position* dan hal yang dapat dilakukan adalah seperti memperbesar *power* yang dimiliki dan membentuk koalisi dengan negara lain dengan berlandaskan kepentingan yang sama.

### **2.3. Operasionalisasi konsep**

Pada level internasional, negosiator India berunding di dalam KTM WTO untuk meminta subsidi pertanian ditingkatkan melebihi dari 10% dengan posisi tawarnya yang cukup kuat karena India tidak menyetujui fasilitas perdagangan jika permintaannya tidak dipertimbangkan. Di lain pihak AS menolak permintaan India tersebut karena kekhawatirannya terhadap harga komoditas internasional menjadi tidak stabil. Kemudian pada level domestik, negosiator India akan membawa beberapa pilihan yang sudah dinegosiasikan di level internasional kepada konstituen domestik apakah tetap pada permintaannya yaitu subsidi diperbolehkan melebihi 10% dan bersifat permanen atau mengikuti saran dari Amerika Serikat yaitu subsidi diperbolehkan lebih dari 10% dan bersifat interim atau sementara. Pilihan pada level internasional tersebut tidak dapat diterima oleh konstituen domestik dan akhirnya negosiator bernegosiasi ulang secara khusus dengan Amerika Serikat. *Overlapping win-set* terjadi setelah negosiator India bernegosiasi ulang dengan Amerika Serikat sehingga India akhirnya mau meratifikasi perjanjian pada KTM ke-9 di WTO.



Ukuran *win-set* tersebut bisa digunakan untuk mengetahui hasil akhir dari negosiasi. Jika ukuran *win-set* negara besar, maka kemungkinan untuk *overlap* dengan kepentingan negara negosiator lainnya juga besar sehingga kemungkinan besar untuk menghasilkan sebuah perjanjian. Sebaliknya, jika *win-set* negara kecil maka kecil pula untuk terjadi *overlap* sehingga perjanjian akan sulit untuk dihasilkan.

Berikut ini adalah tabel terkait dengan operasionalisasi teori yang digunakan oleh penulis yang dijabarkan berdasarkan penjelasan Robert D. Putnam untuk melihat proses negosiasi yang terjadi di level internasional dan domestik:

**Tabel 1 Operasionalisasi Teori *Two-Level Games***

Teori	Konsep	Variabel	Indikator	Parameter
Two Level Games	Win-set	Level I, Internasional	Strategi negosiator India dan Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Power</i> politik hak veto yang dimiliki India pada KTM-9 WTO</li> <li>• Koalisi India dengan G33 pada KTM-9 WTO</li> <li>• Amerika Serikat menyetujui permintaan India di akhir negosiasi</li> </ul>

		Level II, Domestik	<p>Institusi politik domestik India dan Amerika Serikat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur ratifikasi di dalam domestik India memerlukan 2/3 suara mayoritas</li> <li>• Sistem Pemerintahan India bersifat desentralisasi</li> <li>• Prosedur ratifikasi di dalam domestik Amerika Serikat memerlukan 50%+1 suara mayoritas</li> <li>• Sistem pemerintahan Amerika Serikat dimana pemerintah pusat memiliki otoritas</li> </ul>
			<p>Preferensi, dan koalisi konstituen India dan Amerika Serikat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preferensi atau pilihan India untuk tidak meratifikasi <i>Trade Facilitation Agreement</i></li> <li>• Koalisi kelompok petani di India yang memiliki kepentingan di dalam negosiasi</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preferensi Amerika Serikat untuk tidak menyetujui <i>Peace Clause</i> tidak terbatas waktu</li> <li>• United States Council for International Business (USCIB) di Amerika Serikat yang memiliki kepentingan di dalam negosiasi</li> </ul>
--	--	--	--	--

Kemudian berikut ini adalah tabel operasionalisasi *win-set* yang merupakan bagian dari teori *Two-Level Games*. Diolah berdasarkan penjelasan dari Putnam untuk menjelaskan apakah terjadi *overlapping win-set* (terjadi kesepakatan) atau tidak dalam sebuah negosiasi:

**Tabel 2 Operasionalisasi *win-set***

Konsep	Variabel	Indikator	Parameter
Win-set	Overlapping win-set	win-set negara satu bertemu dengan win-set negara lawan negosiasinya	Terjadi kesepakatan antara India dengan Amerika Serikat
	Tidak overlapping win-set	Win-set negara satu tidak bertemu dengan win-set negara lawan negosiasinya	Tidak terjadi kesepakatan antara India dengan Amerika Serikat

Pada variabel level I Internasional yang terjadi di India, terdapat parameter *bargaining position*. Dalam KTM-9 tersebut, India memiliki strategi untuk meningkatkan *bargaining position* sehingga membuat *win-set* India lebih kecil dan bertujuan untuk memaksimalkan *win-set* lawan. Ada dua strategi yang dimiliki oleh India untuk meningkatkan *bargaining position*-nya. Pertama ketika pada tahap negosiasi pengajuan proposal G33, India memiliki *bargaining position* yang tinggi dengan cara membuat koalisi dengan negara G33 untuk mendukung permintaan kenaikan subsidi pertanian. Kemudian yang kedua, ketika pada tahap negosiasi India menolak *peace clause* empat tahun, India memiliki *bargaining position* yang tinggi dengan cara memperbesar *power*, melalui hak vetonya untuk tidak meratifikasi perjanjian tentang fasilitas perdagangan dimana dianggap hal tersebut dapat menurunkan kredibilitas WTO sebagai forum perdagangan multilateral, karena akan membuat negara anggota WTO (terutama negara berkembang) akan lebih mengupayakan perdagangan pada tingkat regional atau bilateral daripada multilateral.

Pada variabel level I internasional yang terjadi di Amerika Serikat, Amerika Serikat memiliki strategi menyetujui *Peace Clause* di akhir negosiasi. Amerika Serikat pada awalnya mengupayakan negosiasi *Bali Package* agar tetap dilanjutkan tanpa mengikutsertakan India. Kemudian akhirnya Amerika Serikat mau menyetujui permintaan India mengenai *Peace Clause* tidak terbatas waktu agar India mencabut *veto* terhadap kesepakatan *Trade Facilitation Agreement*.

Pada variabel level II domestik, terdapat beberapa parameter yaitu prosedur ratifikasi di dalam domestik Negara India dan Amerika Serikat, Sistem pemerintahan India dan Amerika Serikat, preferensi jika tidak meratifikasi akan menyebabkan kerugian yang besar atau tidak, dan apa saja pihak/kelompok yang memiliki kepentingan di dalam negosiasi *Bali*

*Package*.<sup>38</sup> Prosedur peratifikasian pada Negara India membutuhkan waktu yang cukup lama karena dua-pertiga suara diperlukan untuk ratifikasi.<sup>39</sup> Sedangkan prosedur peratifikasian pada Negara Amerika Serikat membutuhkan 50%+1 suara mayoritas pada parlemennya. Pemerintahan India bersifat desentralisasi karena ada pembagian kekuasaan pemerintahan antara pemerintah negara bagian dan pemerintah pusat. Pemerintah Amerika Serikat memiliki pemerintah pusat atau federal yang memiliki otoritas tertinggi dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Preferensi yang dimiliki oleh India adalah jika meratifikasi keputusan awal yaitu subsidi 10%, maka akan menyebabkan kerugian yang lebih besar dibandingkan jika tidak meratifikasi. Preferensi yang dimiliki oleh Amerika Serikat adalah tidak menyetujui *Peace Clause*. Pihak/kelompok yang memiliki kepentingan besar terhadap perundingan subsidi hasil pertanian adalah Kelompok Petani India. Sedangkan kelompok kepentingan di Amerika Serikat adalah United States Council for International Business (USCIB).

Sebagai informasi tambahan, penulis mencantumkan contoh studi kasus yang memiliki pengaplikasian teori yang sama yaitu penelitian milik Michal Trnik.<sup>40</sup> Pada penelitian Trnik, dia meneliti tentang Amerika Serikat yang mengajukan proposal bahwa Amerika akan memasang sistem pertahanan misil balistik pada Eropa tengah tepatnya di Ceko dan Polandia. Amerika mengajukan proposal tersebut dikarenakan untuk mengatasi ancaman yang diberikan oleh Negara Iran dan Korea Utara di masa depan kepada negara-negara eropa.<sup>41</sup> Akan tetapi Trnik menjelaskan bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan nasional seperti melakukan ekspansi kekuatan militer dengan tujuan menciptakan *power*

---

<sup>38</sup> Jafri. Afsar. 2013. "*India (G-33) Proposal on Food Security: A wrong move can jeopardize India's food security forever*" dalam <http://focusweb.org/content/india-g-33-proposal-food-security-wrong-move-can-jeopardize-india%E2%80%99s-food-security-forever> Diakses 5 Maret 2016

<sup>39</sup> Ashworth. David. 2014. "Understanding India's political system—making decisions" dalam <http://marketrealist.com/2014/11/understanding-indias-political-system-making-decisions/> Diakses 23 Oktober 2016

<sup>40</sup> Trnik. Michal. Op. Cit.

<sup>41</sup> *Ibid.*

sistem unipolar sebagai bentuk dominasi kekuatan militer Amerika.<sup>42</sup> Disini dapat dilihat bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk menciptakan sistem unipolar dengan cara menggunakan strategi meningkatkan *power* militernya.<sup>43</sup> Polandia dan Ceko juga mendukung proposal Amerika Serikat tersebut karena kebutuhan akan keamanan mereka.<sup>44</sup>

Ceko dan Polandia sudah menjadi negara yang dekat dengan Amerika semenjak awal tahun 1990. Disini dapat dilihat bahwa Amerika memiliki strategi untuk memperbesar *power* pada bidang militer untuk mendapatkan apa yang menjadi kepentingannya.<sup>45</sup> Amerika berusaha untuk membuat *win-set* lawan negosiasinya yaitu Polandia dan Ceko menjadi lebih besar. Didasari dengan kebutuhan akan keamanan militer oleh Ceko dan Polandia dan pada akhirnya terjadi *overlapping win-set* antara ketiga negara tersebut yang ditandai dengan disepakatinya proposal Amerika Serikat.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

## 2.4. Alur Pemikiran

**Latar belakang:** India meminta kepada WTO agar diperbolehkannya negara berkembang meningkatkan subsidi lebih dari 10% dan tidak terbatas waktu. Pada awalnya Amerika Serikat menolak permintaan India tersebut karena akan mengganggu stabilitas harga komoditas dunia. Namun akhirnya Amerika Serikat mau menyetujui subsidi diperbolehkan melebihi dari 10% bersifat *open-ended* atau tidak terbatas waktu.

**Rumusan masalah:** Mengapa terjadi kesepakatan Peace Clause Open-Ended pada Bali Package antara India dengan Amerika Serikat Tahun 2013-2014?

### Teori

*Two Level Games*

### Konsep

*Win-set*

- Level I, Internasional
- Level II, Domestik

*Overlapping win-set*

**Hipotesis:** Berdasarkan teori *two-level games* yang dikemukakan oleh Robert D Putnam, dapat ditarik hipotesis bahwa pada negosiasi *Bali Package* telah terjadi *overlapping win-set* antara India dengan AS yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan *Peace Clause Open-Ended*. Untuk mengetahui bahwa telah terjadi *overlapping win-set* diperlukan untuk mengetahui ukuran *win-set* masing-masing negara melalui level II (domestik) yang dipengaruhi oleh preferensi, koalisi dan institusi politik di domestik, kemudian di level I (Internasional) dipengaruhi oleh strategi negosiator di level internasional.

## **2.5. Hipotesis**

Berdasarkan teori two-level games yang dikemukakan oleh Robert D Putnam, dapat ditarik hipotesis bahwa pada negosiasi Bali Package telah terjadi overlapping win-set antara India dengan AS yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan Peace Clause Open-Ended. Untuk mengetahui bahwa telah terjadi overlapping win-set diperlukan untuk mengetahui ukuran win-set masing-masing negara melalui level II (domestik) yang dipengaruhi oleh preferensi, koalisi dan institusi politik di domestik, kemudian di level I (Internasional) dipengaruhi oleh strategi negosiator di level internasional.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan semua data yang telah penulis uraikan di atas, penelitian ini adalah penelitian eksplanatif, karena penulis akan menjelaskan alasan keberadaan suatu kondisi dimana pada penelitian ini kondisi tersebut adalah terjadinya kesepakatan *Peace Clause Open-Ended* antara India dengan Amerika Serikat. Penulis akan berusaha untuk menjelaskan hipotesis yang telah penulis sampaikan pada Bab II.

#### **3.2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian penulis akan difokuskan pada proses negosiasi yang dilakukan oleh India dan Amerika Serikat di level internasional dan level domestik. Dimana batasan tahun dari penelitian ini yaitu tahun 2013 hingga 2014. Dimulai pada KTM ke-9 dimulai tepatnya Desember 2013 dimana India mengajukan permintaan kenaikan subsidi hasil pertanian. Hingga pada tahun 2014 dimana Amerika Serikat mau menyetujui permintaan India tersebut.

#### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan sepenuhnya melalui studi kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, artikel, dokumen resmi, internet, berita, maupun sumber-sumber lain yang memiliki hubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

#### **3.4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data yang akan penulis gunakan didalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif.

### 3.5. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan. Penulis akan memberikan latar belakang masalah dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II: Kerangka Pemikiran. Penulis akan memaparkan studi-studi terdahulu tentang isu mengenai negosiasi *Bali package* dan juga studi mengenai negosiasi menggunakan teori *two level games*. Selain itu, penulis juga akan menjabarkan kerangka teori serta operasionalisasi konsep yang mendasari penelitian ini. Terakhir, penulis akan memberikan hipotesis tentang studi kasus yang sedang diteliti

Bab III: Metode Penelitian, yang berisi tentang jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab IV: Gambaran Umum. Bab ini akan berisi tentang penjelasan apa itu Konferensi Tingkat Menteri, *Peace Clause* dan Proposal G33.

Bab V: Pembahasan. Bab ini akan berisi uraian data dan temuan penulis yang didapat sesuai prosedur yang sudah ditentukan di dalam Bab II. Dalam Bab ini, penulis akan melakukan analisis atas studi kasus menggunakan teori *two level games*, sebuah teori negosiasi yang salah satu pemikir utamanya adalah Robert D. Putnam. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang diharap akan mampu menjawab hipotesis. Penulis juga menulis *overlapping win-set* antara India dengan Amerika Serikat.

Bab VI: Penutup. Bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenai penelitian lebih lanjut yang akan direkomendasikan oleh penulis.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

Pada bab ini penulis akan memberi gambaran umum mengenai kesepakatan *Peace Clause Open-Ended* pada KTM WTO ke-9 di Bali. Untuk membantu menggambarkan proses negosiasi yang terjadi pada *Bali Package*, penulis akan menjelaskan beberapa hal terkait Konferensi Tingkat Menteri (KTM), awal mula kesepakatan *Peace Clause* dan proposal G33 yang mana telah memelopori kesepakatan tersebut.

#### 4.1. Konferensi Tingkat Menteri

WTO merupakan lembaga internasional untuk menjadi wadah kerjasama negara-negara di dunia dan wadah negosiasi dengan tujuan mendapatkan apa yang menjadi kepentingan mereka masing-masing. WTO lembaga internasional yang fokus pada isu perdagangan saat ini terdiri dari 164 negara anggota.<sup>1</sup> Semua keputusan yang dibuat oleh WTO berasal dari setiap anggota WTO karena dalam pengambilan keputusannya menggunakan sistem konsensus dimana semua negara anggota harus setuju terlebih dahulu dengan keputusan yang dibuat, apabila ada satu negara yang tidak setuju maka keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi jika sistem pengambilan keputusan konsensus tidak memungkinkan, dapat diberlakukan sistem pengambilan keputusan *voting* dengan berdasarkan asas *one country one vote*.<sup>2</sup> Peraturan pada WTO juga dibuat oleh setiap negara anggotanya yang telah disetujui bersama, termasuk sanksi perdagangan. Dalam praktek negosiasinya, anggota-anggota WTO menggunakan prinsip *Single Undertaking*. Maksudnya adalah semua isu yang diangkat pada negosiasi, isu yang diangkat oleh negara maju maupun

---

<sup>1</sup> WTO. "Members and Observers" Dalam [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org6\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm) Diakses 9 Februari 2017

<sup>2</sup> WTO. "Whose WTO is it anyway?" Dalam [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org1\\_e.htm#ministerial](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org1_e.htm#ministerial) Diakses 9 Februari 2017

negara berkembang, harus dinegosiasikan, disetujui dan diadopsi bersama tanpa terkecuali.<sup>3</sup> Jika satu isu membuat negosiasi menjadi *deadlock*, isu-isu lainnya tidak akan bisa dilanjutkan meskipun sudah terjadi konsensus.<sup>4</sup> Dengan ini semua *stakeholders*, termasuk anggota yang memiliki *power* kecil bisa mendapatkan kepentingannya dan prinsip *Single Undertaking* ini mengutamakan keadilan dan mengurangi ketidakseimbangan *power* antar negara.<sup>5</sup>

WTO memiliki dua badan utama yaitu *General Council* dan *Ministerial Conference* atau Konferensi Tingkat Menteri (KTM). *General Council* merupakan badan tertinggi setelah KTM dimana fungsinya menangani kinerja hari per hari KTM, bertindak berdasarkan KTM dan melaporkan kepada KTM.<sup>6</sup> *General Council* terdiri dari setiap negara anggota WTO dan diwakili oleh perwakilannya seperti duta besar. Pertemuan pada *General Council* dilakukan secara teratur dan dilakukan di Jenewa. Pada badan ini juga terdapat badan yang setara yaitu *Dispute Settlement Body* yang menangani perselisihan perdagangan dan *Trade Policy Review Body* yang menangani pengawasan kebijakan perdagangan nasional<sup>7</sup>,

KTM merupakan badan yang paling tinggi pada WTO dimana fungsinya untuk mengambil keputusan tentang segala hal yang berhubungan dengan perjanjian perdagangan multilateral<sup>8</sup>. Pertemuan pada KTM dilakukan biasanya setiap dua tahun sekali dan dilakukan di berbagai negara anggota. KTM pada WTO sudah dilakukan selama dua dekade. KTM pertama dimulai pada 9-13 Desember 1996 di Singapur, KTM ke-2 pada 18-20 Mei 1998 di Jenewa, KTM ke-3 pada 30 November-3 Desember 1999 di Seattle, KTM ke-4 pada 9-13 November 2001 di Doha, KTM ke-5 pada 10-14 September 2003 di Cancun, KTM ke-6 pada 13-18 Desember 2005 di Hongkong, KTM ke-7 pada 30 November-3 Desember 2009 di

---

<sup>3</sup> Babu Rajesh R. Op. Cit.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> WTO. "Whose WTO is it anyway?" Dalam

[https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org1\\_e.htm#ministerial](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org1_e.htm#ministerial) Diakses 9 Februari 2017

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

Jenewa, KTM ke-8 pada 15-17 Desember 2011 di Jenewa, KTM ke-9 pada 3-7 Desember 2013 di Bali dan KTM ke-10 pada 15-19 Desember 2015 di Nairobi<sup>9</sup>.

#### 4.2. Awal Mula *Peace Clause*

Bermula pada KTM WTO ke-4 pada tahun 2001 di Doha yang telah diselenggarakan dan menghasilkan perundingan *Doha Development Agenda* (DDA) dengan 18 isu sebagai fokusnya. Delapan belas isu tersebut adalah LDC, *agriculture, sanitary, trade in services, implementation issues, intellectual property, textiles and clothing, IT products, trade and environment, trade and investment, trade and competition policy, transparency in government procurement, trade facilitation, trade labour standar, disputes, electronic commerce, members and accession*, dan *regional trade agreements*<sup>10</sup>. Delapan belas isu tersebut berbicara mengenai usaha negara-negara WTO untuk berfokus pada pembangunan dan menjamin negara-negara berkembang mendapatkan keuntungan pada forum internasional WTO<sup>11</sup>.

KTM ke-5 di Cancun tahun 2003 berakhir dengan tidak adanya persetujuan dikarenakan negara-negara berkembang merasa tidak diuntungkan dengan pembahasan lanjut isu Singapura (*competition policy, investment protection, fasilitas perdagangan, dan government procurement*) yang ada pada KTM pertama<sup>12</sup>. Terjadi perdebatan pada KTM ke-5 antara negara maju terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan negara berkembang mengenai salah satu isu dari 18 isu DDA yaitu pertanian. Negara maju menentang permintaan negara-negara berkembang untuk menghilangkan subsidi ekspor dan menghilangkan batasan

---

<sup>9</sup> WTO. "Ministerial Conferences" Dalam [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/minist\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/minist_e.htm) Diakses 9 Februari 2017

<sup>10</sup> WTO. 2001. "DOHA WTO MINISTERIAL 2001". Dalam [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/min01\\_e/brief\\_e/brief00\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/brief_e/brief00_e.htm) Diakses 4 Maret 2017

<sup>11</sup> WTO. 2001. "Ministerial Declaration". Dalam [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/min01\\_e/mindecl\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm) diakses 3 Februari 2017

<sup>12</sup> Herwig, Alexia. 2014. *The WTO and the Doha Negotiation in Crisis?*. Asser Press. Chapter 8. Hlm 166

subsidi hasil pertanian dalam negeri<sup>13</sup>. Pada tahun 2005 di KTM ke-6 Hongkong akhirnya terjadi titik terang pada negosiasi DDA tersebut yang akan membahas mengenai perjanjian subsidi ekspor pertanian dan batasan subsidi hasil pertanian. Pada KTM tersebut juga direncanakan untuk merancang *modalities* (prosedur untuk menerapkan perjanjian menghilangkan subsidi ekspor pertanian dan menghilangkan batasan subsidi hasil pertanian dalam negeri)<sup>14</sup>. Akan tetapi pembahasan mengenai *modalities* mengalami kebuntuan hingga pada KTM ke-8 di Geneva tahun 2011, padahal pada KTM ke-8 tersebut sudah ditentukan bentuk *modalities* akan tetapi pada negoisasinya tidak terjadi sebuah kesepakatan<sup>15</sup>.

Kemudian negara anggota WTO setuju untuk mempercepat negosiasi agar tercipta kesepakatan, yang artinya harus memfokuskan pada pembahasan isu DDA dimana negara-negara anggota dapat menyetujui. WTO menyiapkan landasan identifikasi dan perkembangan pada negosiasi KTM selanjutnya<sup>16</sup>. Kemudian setelah itu, pada Juli 2013 konsensus dilakukan dan diputuskan untuk mengambil empat isu yang lebih fokus pada pembangunan dari 18 isu DDA untuk dibahas pada KTM ke-9 di Nusa Dua, Bali 3-7 Desember 2013<sup>17</sup>. Pembahasan empat isu tersebut disebut sebagai *Bali Package* dengan fokus pada pembangunan negara berkembang. Empat isu yang ada pada *Bali Package* yaitu<sup>18</sup>:

#### 1. *Least Development Country* (LDC)

---

<sup>13</sup> Uddin, Fasih. 2015. "*Multilateral Trade Negotiations Doha to Bali and Beyond*" dalam <http://eds.a.ebscohost.com/abstract?site=eds&scope=site&jrnl=18127347&AN=102106830&h=V1AgsCzTTfgWB2Eg6p6%2boStoOE%2bGAn4YNt%2feahY4LMwWsHfbhQO2LyzGoaUFWz85P8ScPCjPHt1Qj%2bnG1LqO5w%3d%3d&crI=c&resultLocal=ErrCrINoResults&resultNs=Ehost&crIhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d18127347%26AN%3d102106830> Hlm 83.

Diakses 6 Februari 2017

<sup>14</sup> Herwig, Alexia. Op. Cit

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm 167.

<sup>16</sup> Uddin, Fasih. Op. Cit. Hlm 84.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

Upaya untuk meningkatkan kondisi negara-negara kurang berkembang atau LDC di dalam sistem perdagangan multilateral, baik dalam akses pasar dan bantuan teknis. Juga untuk membantu LDC meningkatkan ekspor kepada anggota WTO dan menarik investasi.<sup>19</sup>

## 2. *Agriculture*

*General Services* (perubahan sistem pemilikan tanah/*landreform* dan keamanan mata pencaharian petani), *Public Stockholding* (keamanan pangan), *Tariff Rate Quota* (perlindungan produk domestik) dan *Export Competition* (mengurangi subsidi ekspor).<sup>20</sup>

## 3. *Trade Facilitation*

Mengurangi biaya perdagangan, mengurangi *red tape* (prosedur yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan birokrasi dari negara), meningkatkan efisiensi dan transparansi.<sup>21</sup>

## 4. *Kapas/Cotton*

Subsidi ekspor pada produksi kapas akan dihapus dan memperbolehkan produksi kapas dari LDC untuk bisa masuk ke pasar negara maju secara *duty-free* dan tanpa kuota<sup>22</sup>.

Pada KTM ke-9 di Bali, negosiasi cenderung untuk fokus kepada perdebatan ketahanan pangan untuk negara berkembang yang merupakan salah satu isu dari isu pertanian pada *Bali Package*<sup>23</sup>. Negara berkembang meminta diperbolehkannya negara-negara berkembang untuk meningkatkan subsidi hasil pertanian lebih dari 10%.<sup>24</sup> Perdebatan tersebut berlangsung cukup lama karena melebihi dari *deadline* KTM yang sebenarnya dijadwalkan selesai pada 6 Desember 2013, akan tetapi selesai pada 7 Desember 2013 dengan

---

<sup>19</sup> WTO. 2001. "Towards free market access for least-developed countries". Dalam [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/min01\\_e/brief\\_e/brief03\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/brief_e/brief03_e.htm) Diakses 9 Februari 2017

<sup>20</sup> Uddin. Fassih. Op. Cit

<sup>21</sup> WTO. 2001. "Cutting red tape at the border" Dalam [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/min01\\_e/brief\\_e/brief15\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/brief_e/brief15_e.htm) Diakses 9 Februari 2017

<sup>22</sup> WTO. 2001. "Briefing note: Cotton negotiations — commitment and regret in Bali" Dalam [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/mc9\\_e/brief\\_cotton\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/brief_cotton_e.htm) Diakses 9 Februari 2017

<sup>23</sup> WTO. 2014. "The Bali decision on stockholding for food security in developing countries". Dalam [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/agric\\_e/factsheet\\_agng\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/factsheet_agng_e.htm) Diakses 3 Maret 2017

<sup>24</sup> *Ibid.*

hasil *peace clause* empat tahun. Sulitnya untuk menemukan titik temu pada perdebatan KTM ke-9 mengenai ketahanan pangan dikarenakan bedanya perspektif antara negara maju dan negara berkembang. Negara berkembang menganggap AoA sudah tidak relevan dengan harga komoditas sekarang, sehingga mereka memperkirakan untuk mengamankan stok pangannya, negara berkembang harus menaikkan subsidi hasil pertanian dalam negeri melebihi dari ketentuan yang ada pada AoA<sup>25</sup>. Sedangkan negara-negara maju mengkhawatirkan jika subsidi tersebut ditingkatkan, negara-negara berkembang dapat membanjiri pasar internasional dengan produk agrikulturnya karena dapat mengganggu harga komoditas dunia<sup>26</sup>.

Sebelumnya, beberapa tahun setelah DDA pada KTM di Doha dirundingkan, ada berbagai proposal yang dibuat oleh beberapa koalisi negara seperti *African Group* dan G33. Proposal tersebut berisikan mengenai permintaan untuk mengamankan ketahanan pangan negara-negara berkembang, dimana diperbolehkannya menaikkan subsidi hasil pertanian dalam negeri tanpa ada batasan. Bedanya pada proposal dari *African Group* hanya menawarkan untuk menghilangkan AMS atau menghilangkan batasan dalam pemberian subsidi domestik terhadap hasil pertanian, sedangkan pada proposal G33 menawarkan tiga pilihan untuk menjadi solusi pada negosiasi stok pangan dimana ketiga solusi tersebut tidak meminta untuk menghilangkan batasan melainkan meningkatkan batasannya. Keinginan untuk menaikkan subsidi hasil pertanian pada proposal tersebut dikarenakan kekhawatiran negara berkembang jika mereka secara otomatis akan melanggar batasan awal pada AoA pada masa sekarang demi mengamankan stok pangannya<sup>27</sup>. Batasan subsidi pertanian

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Firmansyah, Fery dan Putu Hery. 2013. "WTO : Paket Bali Ciptakan Keuntungan US\$ 1 triliun" dalam <https://m.tempo.co/read/news/2013/12/07/090535486/wto-paket-bali-ciptakan-keuntungan-us-1-triliun/2> Diakses

<sup>27</sup> WTO. 2014. "*The Bali decision on stockholding for food security in developing countries*". Dalam [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/agric\\_e/factsheet\\_agng\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/factsheet_agng_e.htm) Diakses 3 Maret 2017



awalnya yaitu 10% untuk negara berkembang yang telah tertera pada perjanjian *Agreement on Agriculture* (AoA). Perhitungan subsidi pada AoA tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Perhitungan Subsidi AoA**

<b>Subsidies =</b>
<b>(Support price — reference price) x (eligible production) ≤ 10% of the value of production</b>
<b>Reference price: Harga impor/ekspor produksi pada tahun 1986-1988</b>
<b>Support price: Harga produksi yang dibeli oleh pemerintah domestik</b>
<b>Eligible production: Produksi yang diperbolehkan dalam setahun</b>

Sumber [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/agric\\_e/factsheet\\_agng\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/factsheet_agng_e.htm)

Untuk mengamankan stok pangannya, negara akan membeli produksi dari pertaniannya pada *support price*. Dalam peraturan WTO yaitu AoA, program mengamankan stok pangan tersebut dianggap sebagai subsidi distorsi perdagangan atau subsidi yang dapat menimbulkan ketidakstabilan harga komoditas internasional.<sup>28</sup> Kemudian *support price* dikurangi dengan *reference price* sesuai pada AoA yaitu mengacu pada tahun 1986-1988, kemudian dikalikan dengan *eligible production*. Sesuai AoA, hasil penghitungan subsidi tersebut tidak boleh lebih 10% dari total nilai produksi pada produk tertentu<sup>29</sup>.

Negara-negara berkembang meminta untuk menaikkan subsidi lebih dari 10% karena menaikkan subsidi tidak akan mendistorsi atau mengganggu kestabilan harga komoditas dunia<sup>30</sup>. Sepanjang tahun, *support price* terutama pada negara berkembang semakin meningkat jika dibandingkan dengan *reference price* dikarenakan negara berkembang harus mengamankan stok pangannya<sup>31</sup>. Oleh karena itu negara berkembang cepat atau lambat harus melanggar peraturan AoA yaitu subsidi tidak boleh lebih dari 10%.

---

<sup>28</sup> Bellman. Christophe. Op. Cit

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Bellman. Christophe. Op. Cit

<sup>31</sup> *Ibid.*

Pada tahun 2002, *African Group* memberikan proposal pertama yang membahas program ketahanan pangan<sup>32</sup>. *African Group* terdiri dari Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cabo Verde, Central African Republic, Chad, Congo, Democratic Republic of the Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypt, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Afrika Selatan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe<sup>33</sup>. Proposal tersebut meminta untuk menghilangkan *Aggregate Measurement of Support* (AMS) atau perhitungan maksimal subsidi yang dapat diberikan kepada beberapa produk secara spesifik dan yang tidak<sup>34</sup>. Maksudnya adalah untuk menghilangkan batasan dalam pemberian subsidi domestik terhadap hasil pertanian agar domestik negara berkembang dapat memberikan subsidi yang lebih besar. WTO memiliki istilah untuk menyebutkan subsidi secara umum yaitu *Boxes* yang diberikan warna sama dengan lampu lalu lintas, hijau berarti diperbolehkan, kuning berarti dikurangi dan merah berarti tidak diperbolehkan<sup>35</sup>. Subsidi hasil pertanian dimasukkan pada kategori *amber box* atau kotak kuning dan pada proposal tersebut meminta pemberian subsidi ditempatkan pada *green box* atau kotak hijau agar diperbolehkan melebihi dari AMS.

Setelah proposal dari *African Group* diberikan, pada pertemuan WTO berikutnya dirancang berbagai variasi prosedur untuk menghilangkan AMS dimana negara berkembang diperbolehkan menaikkan subsidi tanpa mendistorsi harga komoditas dunia. Pada 17 Februari 2003, rancangan awal *modalities* telah dibuat yang mana membebaskan negara berkembang

---

<sup>32</sup> WTO. 2014. "The Bali decision on stockholding for food security in developing countries". Dalam [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/agric\\_e/factsheet\\_agng\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/factsheet_agng_e.htm) diakses 4 Februari 2017

<sup>33</sup> WTO. 2016. "Groups in the negotiations". Dalam [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dda\\_e/negotiating\\_groups\\_e.htm#grp002](https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/negotiating_groups_e.htm#grp002) Diakses 4 Maret 2017

<sup>34</sup> WTO. 2014. "The Bali decision on stockholding for food security in developing countries". Dalam [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/agric\\_e/factsheet\\_agng\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/factsheet_agng_e.htm) Diakses 3 Maret 2017

<sup>35</sup> WTO. "The Boxes". Dalam [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/agric\\_e/agboxes\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agboxes_e.htm) diakses 4 Februari 2017

untuk mengamankan stok pangannya dari batasan awal<sup>36</sup>. *Modalities* tersebut menempatkan program untuk mensubsidi hasil pertanian pada *green box*. Subsidi maksimal menjadi 15% untuk produk yang dispesifikkan dan 10% secara keseluruhan<sup>37</sup>. Akan tetapi pada KTM ke-8 tahun 2011 *modalities* tersebut tidak tersetujui oleh anggota WTO<sup>38</sup>.

Lalu pada 3 Oktober 2013 dimana akan mendekati KTM ke-9 di Bali, G33 memberikan proposal G33 dimana salah satu isinya adalah *Peace Clause* bersifat sementara<sup>39</sup>. *Peace Clause is shields existing programmes of developing countries against legal challenge if support leads them to exceed agreed limits* atau dengan kata lain *Peace Clause* merupakan aturan yang memperbolehkan negara berkembang untuk menaikkan subsidi boleh lebih dari 10%, akan tetapi hanya berlaku selama empat tahun dan solusi selanjutnya akan dibahas pada KTM selanjutnya pada tahun 2017<sup>40</sup>. G-33 ingin merubah ketentuan AoA agar pemerintah domestik negara berkembang dapat memberikan subsidi yang lebih banyak tanpa mengikuti batasan pada AoA untuk mengamankan stok pangan dan juga untuk menguntungkan petani dengan berpenghasilan rendah atau yang memiliki sumber daya rendah.

### 4.3. Proposal G33

Grup 33 atau G33 merupakan koalisi negara-negara berkembang dengan populasi petani terbesar di dunia.<sup>41</sup> Anggota G33 sendiri terdiri dari Antigua & Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Côte d'Ivoire, China, Congo, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Jamaica, Kenya, Republic of Korea, Madagascar, Mauritius, Mongolia, Mozambique,

---

<sup>36</sup> WTO. 2014. "The Bali decision on stockholding for food security in developing countries". Dalam [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/agric\\_e/factsheet\\_agng\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/factsheet_agng_e.htm) diakses 4 Februari 2017

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Herwig. Alexia. Op. Cit.

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> WTO. 2014. "The Bali decision on stockholding for food security in developing countries". Dalam [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/agric\\_e/factsheet\\_agng\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/factsheet_agng_e.htm) Diakses 5 Maret 2017

<sup>41</sup> Anonim. *G-33 proposal: early agreement on elements of the draft Doha accord to address food security*. ICTSD FAO. California. 2013. Hlm. 1

Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent & the Grenadines, Senegal, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Trinidad & Tobago, Turkey, Uganda, Venezuela, Zambia, Zimbabwe.<sup>42</sup> Pada November 2012, G33 mengumpulkan sebuah proposal kepada forum internasional WTO yang bertujuan untuk mencari toleransi dan fleksibilitas pada perdagangan global agar membuat negara-negara berkembang tidak kalah saing dengan negara-negara maju. Pada saat itu, G33 menyarankan proses negosiasi pada isu pertanian di WTO harus diseimbangkan dengan isu fasilitas perdagangan.<sup>43</sup> Fokus pada satu isu yang sangat penting bagi negara berkembang yaitu pertanian dan lebih tepatnya pada keamanan pangan, diperkirakan akan membantu proses negosiasi agar lebih cepat menghasilkan kesepakatan.<sup>44</sup>

Anggota WTO berusaha untuk menyederhanakan DDA karena mengejar tenggat waktu yang mana hampir satu dekade tidak menemukan persetujuan pada saat negosiasi. Penyederhanaan DDA tersebut akhirnya menjadi sebuah paket yang dinamakan Paket Bali. Di dalam Paket Bali tersebut akan dibahas empat isu dengan fokus pada pembangunan negara berkembang dari 18 isu DDA pada saat KTM ke-9.

Proposal G33 berfokus pada salah satu unsur penting untuk negara-negara berkembang yaitu keamanan pangan<sup>45</sup>. G33 berusaha untuk dapat membantu mempercepat negosiasi sehingga mencapai setidaknya beberapa kesepakatan mengenai pertanian<sup>46</sup>. Proposal G33 memiliki beberapa daftar kebijakan pendukung pertanian yang digunakan negara-negara berkembang (rehabilitasi lahan, manajemen kekeringan, dan program kerja dan pemukiman petani perdesaan) dan dibebaskan dari batasan pada jumlah pengeluaran yang diperbolehkan. Dan juga pada proposal tersebut meminta aturan subsidi pertanian WTO

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

untuk dilonggarkan dimana memperbolehkan negara berkembang untuk memberikan subsidi lebih besar terhadap produk pertanian sebagai bentuk kebijakan keamanan pangan<sup>47</sup>.

Beberapa bulan sebelum KTM ke-9 Bali, G33 dengan proposalnya mengusulkan tiga pilihan sebagai solusi sementara pada isu pertanian<sup>48</sup>. Hal tersebut merupakan upaya G33 agar mempercepat proses negosiasi pada isu pertanian untuk menentukan perjanjian pada KTM ke-9 mendatang. Tiga pilihan tersebut adalah:

### 1. *External Reference Price*

Pada pilihan ini, *support price* dibandingkan dengan *reference price* yang mengikuti harga pada masa sekarang, tidak mengikuti tahun 1986-1988. Contoh pada Negara Kenya yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa *support price* 400 USD dan *reference price* 100 USD. Jika *reference price* mengikuti pada masa sekarang, maka selisih antara *support price* dengan *reference price* akan lebih kecil.<sup>49</sup>

### 2. *Taking Inflation into Account*

*Support price* dibenarkan menjadi inflasi yang “berlebihan” sehingga dapat dibandingkan dengan *reference price* tahun 1986-1988. Satu dolar pada tahun 1980an bernilai lebih daripada satu dolar pada tahun 2015.<sup>50</sup>

### 3. *Peace Clause*

Memperbolehkan negara berkembang untuk menaikkan subsidi hasil pertaniannya meskipun lebih dari 10% yang menjadi ketentuan awal di AoA.

Untuk pilihan *External Reference Price* hanya memungkinkan jika diberlakukan untuk negara-negara yang mempunyai banyak stok pangan. Dimana secara relatif harga impor untuk biji-bijian rendah dan *support prices* untuk biji-bijian relatif tinggi dikarenakan

---

<sup>47</sup> Bellman. Christophe. Op. Cit

<sup>48</sup> WTO. 2014. “*The Bali decision on stockholding for food security in developing countries*”. Dalam [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/agric\\_e/factsheet\\_agng\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/factsheet_agng_e.htm) Diakses 5 Februari 2017

<sup>49</sup> South Centre. 2015. “*WTO’s MC10: Agriculture Negotiations– Public Stockholding*”. Dalam [https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2015/12/AN\\_MC10\\_3\\_Public-stockholding.pdf](https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2015/12/AN_MC10_3_Public-stockholding.pdf) Diakses 5 Februari 2017

<sup>50</sup> *Ibid*

kondisi iklim<sup>51</sup>. Dan untuk pilihan *Taking Inflation into Account*, akan kebingungan untuk menentukan inflasi menurut apa yang dijadikan sebagai acuan, apakah dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), secara global atau berdasarkan negara itu sendiri<sup>52</sup>. Tergantung pada hasil negosiasi seperti apa negosiasi yang berlebihan dan yang normal<sup>53</sup>. Oleh karena itu kedua pilihan tersebut tidak dijadikan sebagai solusi pada KTM di Bali.

Akhirnya pada KTM di Bali 7 Desember 2013, pilihan ketiga yang menjadi solusi dalam menjawab kebuntuan negosiasi. *Peace Clause* disetujui oleh semua negara anggota WTO pada 7 Desember 2013.<sup>54</sup> *Peace Clause* tersebut hanya bersifat sementara selama empat tahun sampai solusi permanen didapatkan.<sup>55</sup> *Peace Clause* dapat diterapkan oleh negara berkembang jika pemerintahan domestiknya dapat mengatur pemberian subsidi tersebut agar tidak mengganggu harga komoditas dunia ataupun sampai memberikan dampak pada keamanan pangan negara lain dan harus memberikan informasi yang transparan apakah negara tersebut sanggup untuk menaati syarat untuk menaikkan subsidiya.<sup>56</sup>

Salah satu aktor yang berpengaruh pada kesepakatan *Peace Clause* adalah negara India yang juga berperan sebagai inisiator proposal G33. Pada 31 Juli 2014 dimana akan diratifikasinya kesepakatan *Peace Clause*, India menolak untuk meratifikasinya dikarenakan India merasa akan kehilangan posisi tawar terkait isu subsidi dan penguatan stok produk pertanian<sup>57</sup>. India tidak mau menunggu untuk mendapatkan solusi permanen mengenai subsidi pertanian hingga tahun 2017, dan meminta untuk menyelesaikannya pada akhir tahun 2014. India menunda untuk meratifikasi perjanjian fasilitas perdagangan sebelum solusi

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> WTO. 2014. "*The Bali decision on stockholding for food security in developing countries*". Dalam [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/agric\\_e/factsheet\\_agng\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/factsheet_agng_e.htm) Diakses 4 Maret 2017

<sup>55</sup> *Ibid*.

<sup>56</sup> *Ibid*.

<sup>57</sup> Vazza. P. Agung. 2014. "Maju Mundur WTO" dalam <http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/14/08/29/nb1xwa26-maju-mundur-wto> Diakses 9 Maret 2016

permanen terhadap subsidi pertanian tercipta<sup>58</sup>. Kemudian setelah dilakukannya negosiasi ulang, akhirnya *Peace Clause* bersifat sementara tersebut menjadi *Peace Clause Open-Ended*.<sup>59</sup> Berikut merupakan *timeline* kesepakatan *Peace Clause*:

**Tabel 2 Timeline Kesepakatan *Peace Clause***

<b>Date(s)</b>	<b>Proposal or document</b>	<b>Main point(s)</b>
20 November 2002	African Group proposal	Removes reference to AMS ( <u>trade-distorting domestic support</u> ) calculations, effectively putting the programmes in the unlimited <u>Green Box</u>
18 December 2002	Chairperson's overview	Working hypothesis and variations range from keeping existing provisions to removing reference to AMS (effectively putting market price support in the Green Box)
17 February 2003	First draft "modalities"	Exempts developing countries from the requirement that food security stockpiles have to correspond to "predetermined targets"
6 April 2006	African Group	Removes reference to AMS calculations, effectively putting market price support in the Green Box
12 July 2006	Draft possible "modalities"	Excluded from AMS calculations, effectively putting the programmes supporting low-income or resource-poor producers in the Green Box
1 August 2007	Revised draft "modalities"	AMS calculation covered by de minimis
8 February 2008	Revised draft "modalities"	AMS allowed up to de minimis of 15% (product specific) and 10% (overall)
19 May 2008, 10 July 2008, 6 December 2008	Revised draft "modalities"	Excluded from AMS calculations, effectively putting the programmes supporting low-income or resource-poor producers in the Green Box
13 November 2012	G-33 proposal for Bali,	Excluded from AMS calculations, effectively putting the programmes supporting low-income or resource-poor producers in the Green Box
3 October 2013	G-33 proposal for Bali,	For the "interregnum" until the

<sup>58</sup> Mazumdaru. Srinivas. 2014. "India's WTO veto may scupper global trade deal" dalam <http://www.dw.com/en/indias-wto-veto-may-scupper-global-trade-deal/a-17820925> Diakses 11 Oktober 2016

<sup>59</sup> Damodaran. Harish. 2014. "Explained: Understanding the permanent solution at WTO" Dalam <http://indianexpress.com/article/india/india-others/understanding-the-permanent-solution-at-wto/> Diakses 10 Maret 2017

Agriculture Agreement has been amended – three options: altering the AMS calculation by recalibrating the external reference price, alternative method taking inflation into account, or a “peace clause.” This is the first time that adjusting reference prices or a “peace clause” appears in a paper

7 December 2013	Bali Ministerial Decision	“Peace clause” shields existing programmes of developing countries against legal challenge if support leads them to exceed agreed limits
17 July 2014	G-33 proposal for a permanent solution	(Repeats 2012 proposal) Excluded from AMS calculations, effectively putting the programmes supporting low-income or resource-poor producers in the Green Box. Calls for a permanent solution by 2017 (11th Ministerial Conference)
27 November 2014	General Council decision	Bali interim “Peace clause” confirmed; wording slightly tightened; members agree to strive for permanent solution by the end of 2015; they clarify that interim solution remains until permanent one agreed

Sumber [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/agric\\_e/factsheet\\_agng\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/factsheet_agng_e.htm)



## BAB V

### PROSES NEGOSIASI INDIA TERHADAP PENCAPAIAN KESEPAKATAN *PEACE* *CLAUSE* PADA *BALI PACKAGE*

Pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana *win-set* yang dimiliki oleh Negara India dan Negara AS level internasional dan level domestik dalam pencapaian kesepakatan *Peace Clause* tahun 2013-2014. Berdasarkan penjelasan pada bab empat dapat diketahui *Peace Clause* merupakan salah satu kesepakatan antara negara-negara WTO pada *Bali Package* yang isinya memperbolehkan negara-negara berkembang menaikkan subsidi hasil pertaniannya melebihi batasan awal pada AoA. *Peace Clause* ini merupakan solusi sementara yang nantinya pada tahun 2017 akan dibahas lebih lanjut mengenai solusi permanen pada isu ketahanan pangan. Namun hari mendekati ketika *Bali Package* akan diratifikasi pada 31 Juli 2014, India menolak untuk meratifikasinya dikarenakan India merasa akan kehilangan posisi tawar terkait isu subsidi dan penguatan stok produk pertanian<sup>1</sup>. Kemudian setelah dilakukannya renegotiasi secara bilateral antara India dengan AS, *Peace Clause* tersebut diubah menjadi *Peace Clause Open-Ended* dimana tidak terbatas waktu sampai solusi permanen diperoleh<sup>2</sup>.

Untuk dapat menjelaskan mengapa terjadi kesepakatan *Peace Clause Open-Ended* antara India dengan AS, penulis menggunakan teori *Two-Level Games* yang dikemukakan oleh Robert D. Putnam yaitu level I (internasional) dan level II (domestik). *Win-set* yang dimiliki oleh India dan AS pada kedua level tersebut akan penulis analisa apakah terukur kecil ataukah besar. Pada Teori *Two-Level Games*, untuk mencapai sebuah kesepakatan negosiator harus bisa mempertemukan hal yang diinginkan oleh negosiator negara lain di level I dan hal yang mau untuk diratifikasi oleh konstituen domestik atau disebut sebagai

---

<sup>1</sup> Vazza. P. Agung. Op. Cit.

<sup>2</sup> Damodaran. Harish. Op. Cit.

*overlapping win-set*. Semakin besar *win-set* maka akan semakin besar pula kemungkinan untuk terjadi sebuah *overlapping win-set*. Oleh karena itu penulis dapat melihat hasil proses negosiasi yang dilalui oleh India dan AS dengan cara melihat ukuran *win-set* yang ada pada kedua level.

### **5.1. Level Internasional: Strategi Negosiator**

Pada sub-bab ini penulis akan menjelaskan dinamika negosiasi India dan Amerika Serikat (AS) yang terjadi di level internasional. Pada level internasional ini, India dan AS saling bernegosiasi dimana masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Memiliki tujuan untuk mendapatkan kepentingan domestik dan meminimalkan konsekuensi yang merugikan dari pihak negara lain. Untuk mencapai tujuannya tersebut, negosiator memiliki strategi yang diterapkan dalam proses negosiasinya. Strategi yang digunakan oleh negosiator dapat berupa meningkatkan atau menurunkan *bargaining position* tergantung pada kemampuan negara tersebut. Jika negosiator ingin memperbesar *win-set*, maka dia harus menurunkan *bargaining position* dan hal yang dapat dilakukan adalah seperti *side-payment* (seperti menawarkan kesepakatan khusus yang menguntungkan pihak lawan negosiasi). Jika negosiator ingin memperkecil *win-set* dan berusaha untuk memperbesar *win-set* lawan, maka dia harus meningkatkan *bargaining position* dan hal yang dapat dilakukan adalah seperti memperbesar *power* yang dimiliki dan membentuk koalisi dengan negara lain dengan berlandaskan kepentingan yang sama.

Pada penelitian ini, negosiator India memiliki dua strategi pada level internasional yaitu berkoalisi dengan negara-negara lain yaitu G33 yang memiliki kepentingan sama untuk meminta kenaikan subsidi hasil pertanian dan memanfaatkan hak veto untuk menolak menandatangani perjanjian fasilitas perdagangan. Kemudian negosiator AS memiliki strategi pada level internasional yaitu menyetujui permintaan India di akhir negosiasi.

#### **5.1.1. Strategi Negosiator India: Berkoalisi dengan G33**

Meskipun negara-negara anggota WTO memiliki kepentingannya masing-masing, terdapat banyak koalisi yang ada pada WTO. Koalisi tersebut ada karena anggota dari masing-masing koalisi memiliki kepentingan yang sama. Koalisi-koalisi tersebut seperti *African Group*, *Asian Developing Members*, *APEC*, *ASEAN*, *Mercosur*, *Cairn Group*, *LDC*, *G-90*, *G-10*, *G-20*, *G-33* dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Untuk mencapai kepentingannya, negara India berupaya memperkecil *win-set* dan berusaha untuk memperbesar *win-set* lawan, oleh karena itu India meningkatkan *bargaining position* dengan cara berkoalisi dengan G33. Grup 33 atau G33 merupakan koalisi negara-negara berkembang dengan populasi petani terbesar di dunia.<sup>4</sup> India memiliki kepentingan untuk mengamankan stok pangannya dengan cara menaikkan subsidi hasil pertaniannya. India memiliki kekhawatiran tidak akan bisa bersaing dengan negara lain jika produktivitasnya menurun karena kurangnya kesejahteraan penduduknya.<sup>5</sup> Keinginan untuk mengamankan stok pangan dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya juga dimiliki oleh anggota G33.<sup>6</sup>

Ketika pemerintah domestik membeli pangan dari petaninya pada harga dalam negeri untuk mengamankan ketahanan pangan, hal tersebut pada peraturan WTO terhitung sebagai kotak kuning atau *amber box* (harus dikurangi). Pemberian subsidi pada hasil pertanian termasuk pada kategori *amber box* dikarenakan akan mendistorsi perdagangan atau mengganggu harga komoditas internasional.<sup>7</sup> Pemberian subsidi akan mempengaruhi harga pasar dan kuantitas produksi.<sup>8</sup> Oleh karena itu sesuai pada ketentuan perjanjian AoA, batas pemberian subsidi hasil pertanian negara berkembang tidak boleh lebih dari 10%. Negara

---

<sup>3</sup> WTO. 2016. "Group in The Negotiation". Dalam [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dda\\_e/negotiating\\_groups\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/negotiating_groups_e.htm) Diakses 19 Maret 2017

<sup>4</sup> Anonim. *G-33 proposal: early agreement on elements of the draft Doha accord to address food security*. ICTSD FAO. California. 2013. Hlm. 1

<sup>5</sup> Jafri. Afsar. Op. Cit

<sup>6</sup> WTO. 2013. "Briefing note: Agriculture negotiations — the bid to 'harvest' some 'low hanging fruit'". Dalam [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/mc9\\_e/brief\\_agneg\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/brief_agneg_e.htm) Diakses 19 Maret 2017

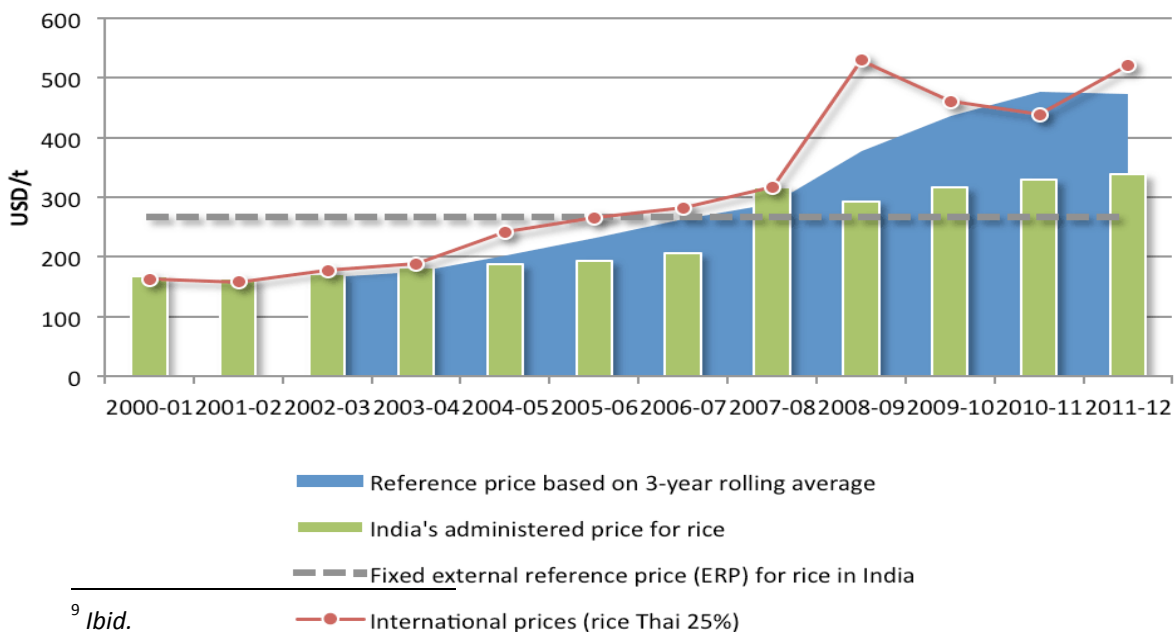
<sup>7</sup> WTO. 2014. "The Bali decision on stockholding for food security in developing countries". Dalam [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/agric\\_e/factsheet\\_agng\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/factsheet_agng_e.htm) Diakses 19 Maret 2017

<sup>8</sup> WTO. 2013. "Briefing note: Agriculture negotiations — the bid to 'harvest' some 'low hanging fruit'". Dalam [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/mc9\\_e/brief\\_agneg\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/brief_agneg_e.htm) Diakses 19 Maret 2017

berkembang menyatakan akan merugi jika tetap berpedoman pada AoA untuk tetap memberikan subsidi tidak lebih dari 10%.<sup>9</sup> Padahal pemberian susbdi bertujuan untuk menyelamatkan petani-petannya dari ketidaksejahteraan<sup>10</sup>.

Negara-negara maju mengkhawatirkan jika subsidi tersebut ditingkatkan, negara-negara berkembang dapat membanjiri pasar internasional dengan produk agrikulturnya karena dapat mengganggu harga komoditas dunia.<sup>11</sup> Sepanjang tahun, *support price* yang dimiliki oleh negara berkembang semakin meningkat dikarenakan untuk kepentingan mengamankan stok pangannya. India yang juga khawatir pada tahun-tahun berikutnya, harus meningkatkan subsidiya melebihi dari 10% untuk mengimplementasikan *National Food Security Act*.<sup>12</sup> Diperkirakan subsidi yang diterapkan oleh India bisa mencapai 30% dari total produksi<sup>13</sup>. Akan tetapi India membuktikan bahwa pemberian subsidi hanya menimbulkan efek distorsi perdagangan yang kecil<sup>14</sup>. Berikut merupakan *administered price/support price*/Harga produksi yang dibeli oleh pemerintah domestik di India:

**Grafik 1 Support Price India**



<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Firmansyah. Fery dan Putu Hery. Op. Cit

<sup>12</sup> Bellman. Christophe. Op. Cit.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Babu Rajesh R. Op. Cit. Hlm 19

Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa harga dalam negeri tidak melebihi dari harga pasar internasional dari tahun 2000 hingga 2012. Meskipun *administered price/support price* melebihi *reference price* 1986-1988, itu tetap dibawah dari harga komoditas internasional yang artinya sedikit atau tidak ada sama sekali distorsi perdagangan.<sup>15</sup> Dengan kata lain, pemberian subsidi oleh pemerintah domestik India untuk hasil pertaniannya, meskipun melebihi dari ketentuan 10% pada AoA, tidak menimbulkan distorsi perdagangan besar seperti yang dikhawatirkan oleh negara maju.<sup>16</sup>

Dengan data di atas, pada 13 November 2012 India sebagai inisiator dengan G33 mengajukan sebuah proposal kepada forum internasional WTO yang bertujuan untuk mencari toleransi dan fleksibilitas pada perdagangan global agar membuat negara-negara berkembang tidak kalah saing dengan negara-negara maju. India pada proposal G33 mengusulkan untuk mengubah subsidi hasil pertanian dikategorikan menjadi *green box* atau dengan kata lain diperbolehkan dan tidak ada batasan tertentu.<sup>17</sup> Menurut India fleksibilitas tersebut diperlukan bagi negara berkembang untuk mendukung penduduk berpenghasilan rendah dan produsen yang miskin sumber daya, sambil memberikan bantuan pangan kepada penduduk miskin.<sup>18</sup> Oleh karena itu, peraturan AoA tidak boleh menghalangi hak negara anggota WTO untuk mengamankan stok pangannya.<sup>19</sup> Pada saat itu pula, India dengan G33 menyarankan proses negosiasi pada isu pertanian di WTO harus diseimbangkan dengan isu fasilitas perdagangan.<sup>20</sup> Fokus pada satu isu yang sangat penting bagi negara berkembang yaitu

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Bellman. Christophe. Op. Cit

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Anonim. *G-33 proposal: early agreement on elements of the draft Doha accord to address food security*. ICTSD FAO. California. 2013. Hlm. 1.

pertanian dan lebih tepatnya pada keamanan pangan, diperkirakan akan membantu proses negosiasi agar lebih cepat menghasilkan kesepakatan.<sup>21</sup>

Dua bulan sebelum KTM ke-9 Bali tepatnya pada 3 Oktober 2013, proposal G33 yang diinisiasi oleh India, mengusulkan tiga pilihan sebagai solusi sementara pada isu pertanian.<sup>22</sup> Hal tersebut merupakan upaya G33 agar mempercepat proses negosiasi pada isu pertanian untuk menentukan perjanjian pada KTM ke-9 mendatang. Pilihan pertama adalah *External Reference Price* dimana *support price* dibandingkan dengan *reference price* yang mengikuti harga pada masa sekarang, tidak mengikuti tahun 1986-1988. G33 berpendapat *reference price* mengikuti tahun 1986-1988 sudah tidak sesuai dengan harga-harga pada masa sekarang yang dihitung semakin meningkat pada dekade terakhir.<sup>23</sup> Untuk memperoleh distorsi yang minimalis, *reference price* mengacu pada tahun terbaru atau mengacu pada tiga tahun terakhir secara terus menerus.<sup>24</sup> Jika *reference price* mengikuti pada masa sekarang, maka selisih antara *support price* dengan *reference price* akan lebih kecil.<sup>25</sup>

Pilihan kedua adalah *Taking Inflation Into Account* dimana perhitungan *support price* direfleksikan dari efek inflasi pada negara tersebut.<sup>26</sup> Jika *reference price* disesuaikan dengan tingkat inflasi pada suatu negara, jadi *support price* akan dihitung berada dibawah *reference price* tersebut. Berikut merupakan data *support price* beras pada negara India jika *reference price* disesuaikan dengan tingkat inflasi:

#### **Grafik 2 Support Price Beras India jika Disesuaikan dengan Tingkat Inflasi**

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

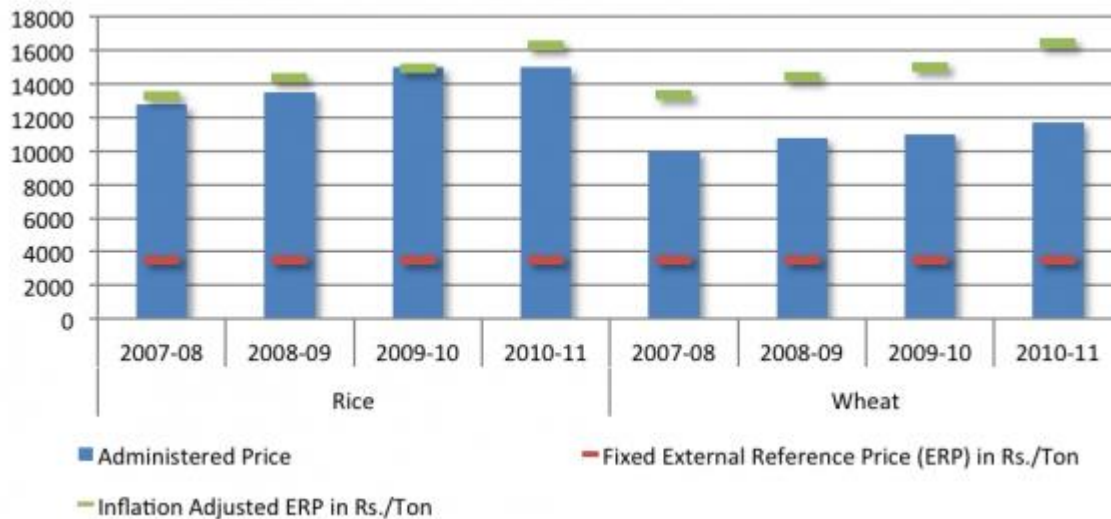
<sup>22</sup> WTO. 2014. "The Bali decision on stockholding for food security in developing countries". Dalam [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/agric\\_e/factsheet\\_agng\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/factsheet_agng_e.htm) Diakses 22 Maret 2017

<sup>23</sup> Bellman. Christophe. Op. Cit

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> South Centre. 2015. "WTO's MC10: Agriculture Negotiations— Public Stockholding". Dalam [https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2015/12/AN\\_MC10\\_3\\_Public-stockholding.pdf](https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2015/12/AN_MC10_3_Public-stockholding.pdf) Diakses 5 Februari 2017

<sup>26</sup> Bellman. Christophe. Op. Cit



Sumber: <https://poldev.revues.org/1744>

Data diatas membuktikan jika *reference price* disesuaikan dengan tingkat inflasi di India, maka *support price* berada dibawah *reference price* tersebut. Sehingga upaya pemberian subsidi berdasarkan dengan acuan itu, tidak termasuk dalam pelanggaran AoA.

Pilihan terakhir yaitu *Peace Clause* isinya memperbolehkan negara-negara berkembang menaikkan subsidi hasil pertaniannya melebihi batasan awal pada AoA. Akhirnya pada KTM di Bali 7 Desember 2013, pilihan *Peace Clause* inilah yang menjadi solusi dalam menjawab kebuntuan negosiasi. *Peace Clause* disetujui oleh semua negara anggota WTO pada 7 Desember 2013 secara konsensus.<sup>27</sup> *Peace Clause* tersebut hanya bersifat sementara selama empat tahun sampai solusi permanen didapatkan.<sup>28</sup> Dengan begitu, India dengan koalisinya G33 mencapai kepentingannya untuk mengamankan stok pangannya meskipun hanya empat tahun. *Peace Clause* dapat diterapkan oleh negara berkembang jika pemerintahan domestiknya dapat mengatur pemberian subsidi tersebut agar tidak mengganggu harga komoditas dunia ataupun sampai memberikan dampak pada keamanan

<sup>27</sup> WTO. 2014. "The Bali decision on stockholding for food security in developing countries". Dalam [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/agric\\_e/factsheet\\_agng\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/factsheet_agng_e.htm) Diakses 4 Maret 2017

<sup>28</sup> *Ibid.*

pangan negara lain dan harus memberikan informasi yang transparan apakah negara tersebut sanggup untuk menaati syarat untuk menaikkan subsidiya.<sup>29</sup>

*Win-set* yang dimiliki oleh India pada level I strategi negosiator India berkoalisi dengan G33 adalah berukuran kecil. *Win-set* terbilang kecil dikarenakan India menggunakan strategi meningkatkan *bargaining position* dan berusaha meningkatkan *win-set* lawan yaitu Amerika Serikat yang menjadi oposisi utama proposal G33. Hal tersebut dilakukan dengan cara berkoalisi dengan negara-negara G33 yang memiliki kepentingan sama yaitu meminta diperbolehkannya negara berkembang untuk meningkatkan subsidi hasil pertanian melebihi 10%.

### 5.1.2. Strategi Negosiator India: *Power Politik Hak Veto*

Kesepakatan *Peace Clause* dicapai bersamaan dengan kesepakatan fasilitas perdagangan (Mengurangi biaya perdagangan, mengurangi *red tape* dan meningkatkan efisiensi dan transparansi)<sup>30</sup> yang mana kesepakatan fasilitas perdagangan tersebut akan diratifikasi pada 31 Juli 2014.<sup>31</sup> Namun di hari mendekati untuk meratifikasi kesepakatan tersebut, India dibawah pemerintahan baru yaitu perdana menteri Narendra Modi menolak untuk meratifikasinya dikarenakan India merasa akan kehilangan posisi tawar terkait isu subsidi dan penguatan stok produk pertanian.<sup>32</sup> India tidak mau menunggu untuk mendapatkan solusi permanen mengenai subsidi pertanian hingga tahun 2017, dan meminta untuk menyelesaikannya pada akhir tahun 2014. India menunda untuk meratifikasi perjanjian fasilitas perdagangan sebelum solusi permanen terhadap subsidi pertanian tercipta.<sup>33</sup> Pemerintahan India mengatakan jika mereka tidak bisa mendukung perjanjian fasilitas

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> WTO. 2001. "Cutting red tape at the border" Dalam [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/min01\\_e/brief\\_e/brief15\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/brief_e/brief15_e.htm) Diakses 9 Februari 2017

<sup>31</sup> Singh. P. J. 2014. "India's multi-faceted WTO refusal" Dalam [https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/08/05/indias-multi-faceted-wto-refusal/?utm\\_term=.ba383fab2367](https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/08/05/indias-multi-faceted-wto-refusal/?utm_term=.ba383fab2367) Diakses 22 Maret 2017

<sup>32</sup> Vazza. P. Agung. Op. Cit.

<sup>33</sup> Mazumdaru. Srinivas. Op. Cit.



perdagangan tanpa adanya perjanjian mengenai diperbolehkannya negara berkembang untuk bebas mensubsidi dan mengamankan stok pangannya.<sup>34</sup>

Semua keputusan yang dibuat oleh WTO berasal dari setiap anggota WTO karena dalam pengambilan keputusannya menggunakan sistem konsensus dimana semua negara anggota harus setuju terlebih dahulu dengan keputusan yang dibuat, apabila ada satu negara yang tidak setuju maka keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dengan asas tersebut, India menggunakan hak vetonya untuk menolak meratifikasi perjanjian fasilitas perdagangan. Inilah yang membuat India dinilai sebagai penghalang perjanjian perdagangan global pertama di bawah WTO.<sup>35</sup> Padahal pada hasil akhir negosiasi KTM Bali, India menyetujui kesepakatan *Peace Clause* empat tahun dan ketika India memiliki perdana menteri baru yaitu Narendra Modi pada pertengahan tahun 2014, tiba-tiba mengubah keputusannya untuk meratifikasi perjanjian fasilitas perdagangan. India merupakan satu-satunya negara yang menghalangi terjadinya kesepakatan *Bali Package* dikarenakan masih belum menerima terhadap keputusan mengenai subsidi hasil pertanian. *Bali Package* yang merupakan pencapaian WTO dalam membentuk perjanjian global yang ditandatangani semua negara.

India merasa negara maju akan tidak menaruh perhatiannya terhadap keamanan pangan negara berkembang jika perjanjian fasilitas perdagangan sudah terlaksana.<sup>36</sup> India menggunakan strategi menjadikan perjanjian fasilitas perdagangan sebagai tiket posisi tawarnya untuk mengamankan keamanan stok pangannya demi melindungi kesejahteraan penduduknya. Oleh karena itu satu-satunya jalan untuk bisa melanjutkan perjanjian fasilitas perdagangan, negara anggota WTO lainnya terutama negara maju harus mau menaruh perhatiannya terhadap keamanan pangan negara berkembang. Pada *deadlock* ini, India tidak

---

<sup>34</sup> Babu Rajesh R. Op. Cit. Hlm 12.

<sup>35</sup> Kumar. Manoj dan Tom Miles. Op. Cit.

<sup>36</sup> Babu Rajesh R. Op. Cit. Hlm 14.

mendapatkan dukungan dari koalisi G33 seperti sebelumnya dan yang mendukung India hanya Negara Afrika Selatan, Bolivia, Kuba dan Venezuela.<sup>37</sup>

Perjanjian fasilitas perdagangan merupakan perjanjian yang bertujuan untuk mengurangi halangan administrasi di pelabuhan dan bea cukai, dengan begitu akan menghemat biaya transaksi dan membebaskan aliran barang lintas negara.<sup>38</sup> Perjanjian ini juga akan menghilangkan hambatan non tariff, mempercepat pergerakan barang, dan mempermudah perizinan masuknya barang.<sup>39</sup> Diperkirakan perjanjian ini jika terlaksana, akan meningkatkan GDP secara global 960 milyar USD dan menciptakan 21 juta lapangan pekerjaan.<sup>40</sup> Selain itu, perjanjian fasilitas perdagangan juga akan mengurangi biaya perdagangan global 14,1% untuk negara *low-income*, 15,1% untuk negara *middle-income* dan 12,9% untuk negara *upper-middle*.<sup>41</sup> Dengan begitu meningkatkan efisiensi bea cukai dan transportasi akan mengintegrasikan negara berkembang terhadap ekonomi global dan meningkatkan daya saing ekspor atau *Foreign Direct Investment (FDI)*.<sup>42</sup> Dengan adanya berbagai keuntungan tersebut, ketika negosiasi pada KTM Bali, kesepakatan fasilitas perdagangan disetujui semua anggota WTO secara konsensus. Hal tersebut merupakan kali pertama dalam sejarah WTO terjadinya kesepakatan karena selama satu dekade lebih ketika dimulainya perundingan DDA tidak pernah terjadi kesepakatan. Oleh karena itu, ketika India memutuskan untuk mengubah keputusannya untuk tidak melanjutkan peratifikasian perjanjian fasilitas perdagangan, India dianggap sebagai satu-satunya penghalang perjanjian perdagangan multilateral atau global.<sup>43</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.* Hlm 15.

<sup>38</sup> *Ibid.* Hlm 3.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Hufbauer. Gary dan Jeffrey Schott. 2013. "*Payoff from the World Trade Agenda 2013*" Dalam [http://www.iccindiaonline.org/reports/Peterson\\_Report.pdf](http://www.iccindiaonline.org/reports/Peterson_Report.pdf) Hlm 7. Diakses 24 Maret 2017.

<sup>41</sup> Babu Rajesh R. Op. Cit. Hlm 3.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Kumar. Manoj dan Tom Miles. Op. Cit

Keputusan veto India terhadap perjanjian fasilitas perdagangan merupakan keputusan yang berbanding terbalik dengan keputusan India ketika *Bali Package*. Dimana India telah menyetujui perjanjian fasilitas perdagangan karena permintaannya mengenai peningkatan subsidi hasil pertanian telah terpenuhi. Hal tersebut membuat anggota WTO lainnya mengkritik posisi India, terutama negara-negara maju seperti AS. Seperti yang dikatakan oleh ketua komite perdagangan AS Dave Camp:

*"India's actions last night to bring down implementation of the Trade Facilitation Agreement are completely unacceptable and put into doubt its credibility as a responsible trading partner. As we determine next steps, I am committed to the WTO as an institution, and I hope that we can salvage the Trade Facilitation Agreement, either with or without India."*<sup>44</sup>

Dari pernyataan di atas, AS menyatakan bahwa WTO harus tetap melanjutkan peratifikasian perjanjian fasilitas perdagangan tanpa adanya India. Negara-negara maju akan memperoleh beberapa keuntungan jika perjanjian fasilitas perdagangan sudah diadopsi oleh semua anggota WTO, pertama akan mempermudah akses barang produksi mereka untuk melewati batas negara berkembang dan kedua tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar atau batas kapasitas karena pelabuhan dan bea cukai telah mengalami modernisasi.<sup>45</sup> Karena itulah negara yang memiliki kepentingan besar terhadap perjanjian fasilitas perdagangan adalah negara-negara maju terutama AS. Pilihan yang dimiliki oleh anggota WTO lain terutama negara maju adalah tetap menolak permintaan India atau tetap melanjutkan peratifikasian perjanjian fasilitas perdagangan tanpa adanya India.

Sesuai dengan peraturan yang dimiliki oleh WTO, jika pada sistem konsensus tidak bisa tercapai, dapat diberlakukan sistem pengambilan keputusan *voting* dengan berdasarkan asas *one country one vote*.<sup>46</sup> Jika 2/3 suara mayoritas menyetujui untuk meratifikasi

---

<sup>44</sup> Washington Press Release. "Camp, Nunes Statements on Failure to Adopt Trade Facilitation Agreement" Dalam <http://nunes.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=390267> Diakses 25 Maret 2017

<sup>45</sup> Babu Rajesh R. Op. Cit. Hlm 13.

<sup>46</sup> WTO. "Whose WTO is it anyway?" Dalam [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org1\\_e.htm#ministerial](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org1_e.htm#ministerial) Diakses 25 Maret 2017

perjanjian fasilitas perdagangan, maka perjanjian tersebut akan diadopsi dan perjanjian tersebut hanya berpengaruh terhadap negara-negara yang menyetujuinya.<sup>47</sup> Pada kondisi tersebut, posisi India tidak menguntungkan karena India hanya didukung oleh sedikit negara. Kemudian di lain sisi, jika AS dapat meyakinkan anggota lainnya untuk tetap melanjutkan perjanjian fasilitas perdagangan menggunakan sistem *voting*, kemungkinan besar AS akan mendapatkan 2/3 suara mayoritas.

Akan tetapi jika sistem *voting* tersebut dilakukan, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh AS. Pertama akan membuat negara-negara di dunia tidak akan percaya lagi dengan perdagangan multilateral karena WTO dianggap gagal.<sup>48</sup> WTO yang memiliki sistem pengambilan keputusan secara konsensus, terlihat tidak komitmen dengan sistemnya tersebut karena gagal dalam mencapai kesepakatan secara konsensus, melainkan secara *voting*. Negara-negara di dunia akan lebih mengupayakan perdagangan pada tingkat regional atau bilateral daripada multilateral.<sup>49</sup> Kedua, sistem pengambilan keputusan secara konsensus jelas akan menguntungkan negara maju karena mereka adalah kelompok yang berjumlah sedikit.<sup>50</sup> Mereka dapat dengan mudah mengajukan hak vetonya demi memperoleh apa yang menjadi kepentingannya. Dibandingkan dengan negara berkembang yang mayoritas lebih banyak, akan lebih mendominasi jika sistem *voting* dilakukan karena mereka berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan negara maju di WTO.<sup>51</sup> Dengan begitu jika sistem *voting* dilakukan, hal tersebut akan mengubah tradisi konsensus dan menyebabkan negara

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Babu Rajesh R. Op. Cit. Hlm 16.

<sup>49</sup> Dominguez. Gabriel. 2014. "What will India's veto of WTO deal cost global trade?" dalam <http://www.dw.com/en/what-will-indias-veto-of-wto-deal-cost-global-trade/a-17830770> Diakses 11 Oktober 2016

<sup>50</sup> Babu Rajesh R. Op. Cit.

<sup>51</sup> *Ibid.*

berkembang semakin berkelompok, mendominasi WTO dan negara maju akan kehilangan posisinya untuk memperoleh kepentingannya.<sup>52</sup>

Keuntungan lebih besar dari perjanjian fasilitas perdagangan akan didapatkan oleh negara maju karena produk barang mereka akan lebih mudah untuk masuk ke pasar negara berkembang.<sup>53</sup> Negara maju juga akan kehilangan pasar yang besar jika melanjutkan perjanjian fasilitas perdagangan tanpa adanya India. Kemudian India merupakan negara dengan populasi terbesar kedua di dunia, juga merupakan bagian penting dari perekonomian dunia. Oleh karena itu negara maju akan kehilangan pasarnya jika India tidak diikutsertakan, sesuai dengan pernyataan Tim Groser, Menteri Perdagangan Selandia Baru *“India is the second biggest country by population, a vital part of the world economy and will become even more important. The idea of excluding India is ridiculous”*<sup>54</sup>

Dengan berbagai pertimbangan yang sudah disebutkan, akhirnya AS melakukan negosiasi secara bilateral dengan India. Pada 30 September 2014, Perdana Menteri India Narendra Modi bertemu dengan Presiden AS Barack Obama di Washington untuk menegosiasikan dua isu yang telah membuat *deadlock Bali Package*.<sup>55</sup> Kemudian pada 31 September 2014 di pertemuan ketua delegasi dari masing-masing anggota WTO, India menyatakan kepada semua anggota WTO untuk tidak mencari jalan alternatif lainnya lagi karena India akan siap melanjutkan perjanjian fasilitas perdagangan selama permintaannya mengenai subsidi hasil pertanian disetujui oleh AS.<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Sinhal. Kounteya. 2014. *“India’s leadership for trading system important: UK deputy PM”* Dalam <http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Indias-leadership-for-trading-system-important-UK-deputy-PM/articleshow/39840031.cms> Diakses 26 Maret 2017

<sup>55</sup> Akande. Charles. 2014. *“U.S.-India Reach Agreement on Trade Facilitation, Paving the Way for the Rest of the Bali Package and Post-Bali Work Program”* Dalam [http://www.chickenfarmers.ca/wp-content/uploads/2014/11/EN\\_Geneva\\_Watch\\_Nov\\_17\\_2014.pdf](http://www.chickenfarmers.ca/wp-content/uploads/2014/11/EN_Geneva_Watch_Nov_17_2014.pdf). Diakses 26 Maret 2017

<sup>56</sup> *Ibid.*

**Gambar 1 PM India Narendra Modi Bertemu Presiden AS Obama di Washington**



Sumber: <http://www.ndtv.com/india-news/pm-narendra-modi-tells-obama-he-hopes-for-trade-pact-deal-soon-673247>

Akhirnya pada 13 November 2014, kedua negara menyetujui kesepakatan mengenai isu ketahanan pangan bagi negara berkembang, untuk memperbolehkan negara berkembang meningkatkan subsidiya demi keamanan stok pangannya.<sup>57</sup> Dari kesepakatan tersebut, mengubah isi dari *Peace Clause* yang sebelumnya hanya bersifat empat tahun, menjadi *open-ended* atau tidak terbatas sampai solusi permanen diperoleh.<sup>58</sup> Kemudian pada saat itu juga, India mencabut vetonya terhadap perjanjian fasilitas perdagangan dan akan segera meratifikasinya bersamaan dengan anggota WTO lainnya.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Damodaran. Harish. Op. Cit.

*Win-set* yang dimiliki oleh India pada level I strategi negosiator India untuk mengandalkan hak *veto* menolak ratifikasi TFA adalah berukuran kecil. *Win-set* terbilang kecil dikarenakan India menggunakan strategi meningkatkan *bargaining position* dan berusaha meningkatkan *win-set* lawan yaitu Amerika Serikat yang menjadi oposisi utama pada permintaan India untuk mengubah *Peace Clause* empat tahun menjadi tidak terbatas waktu. Hal tersebut dilakukan oleh India dengan cara menggunakan hak *veto* untuk menolak meratifikasi TFA dengan berlandaskan prinsip yang dimiliki oleh WTO yaitu *single undertaking* untuk membuat negara WTO lainnya tidak bisa melanjutkan negosiasi sebelum terjadi kesepakatan terhadap permintaan India

### **5.1.3. Strategi Negosiator AS: Menyetujui Permintaan India di Akhir Negosiasi**

Pada awal negosiasi *Bali Package* dimulai tepatnya pada Desember 2013, AS tidak menyetujui permintaan India dengan koalisinya G33 untuk meminta diperbolehkannya menaikkan subsidi hasil pertanian. AS menolak permintaan tersebut karena khawatir jika subsidi tersebut ditingkatkan, negara-negara berkembang dapat membanjiri pasar internasional dengan produk agrikulturnya karena dapat mengganggu harga komoditas dunia.<sup>59</sup> Akhirnya setelah terjadi pro dan kontra antara AS dengan India beserta koalisinya, pada KTM di Bali 7 Desember 2013, *Peace Clause* inilah yang menjadi solusi dalam menjawab *deadlock* tersebut. *Peace Clause* disetujui oleh semua negara anggota WTO pada 7 Desember 2013 secara konsensus.<sup>60</sup> *Peace Clause* tersebut hanya bersifat sementara selama empat tahun sampai solusi permanen didapatkan.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Firmansyah. Fery dan Putu Hery. Op. Cit

<sup>60</sup> WTO. 2014. "The Bali decision on stockholding for food security in developing countries". Dalam [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/agric\\_e/factsheet\\_agng\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/factsheet_agng_e.htm) Diakses 4 Maret 2017

<sup>61</sup> *Ibid.*

Kesepakatan *Peace Clause* dicapai bersamaan dengan kesepakatan TFA yang mana kesepakatan fasilitas perdagangan tersebut akan diratifikasi pada 31 Juli 2014.<sup>62</sup> Namun di hari mendekati untuk meratifikasi kesepakatan tersebut, India mengubah keputusannya untuk menolak meratifikasinya sebelum permintaan India untuk mengubah *Peace Clause* menjadi tidak terbatas waktu dipenuhi oleh WTO.<sup>63</sup>

Pada awalnya AS menolak permintaan India karena AS meyakini akan dapat meneruskan negosiasi *Bali Package* tanpa India dikarenakan adanya peraturan yang dimiliki oleh WTO, jika pada sistem konsensus tidak bisa tercapai, dapat diberlakukan sistem pengambilan keputusan *voting* dengan berdasarkan asas *one country one vote*.<sup>64</sup> Jika 2/3 suara mayoritas menyetujui untuk meratifikasi perjanjian TFA, maka perjanjian tersebut akan diadopsi dan perjanjian tersebut hanya berpengaruh terhadap negara-negara yang menyetujuinya.<sup>65</sup> AS memiliki strategi mengajak negara anggota WTO lainnya untuk melanjutkan negosiasi *Bali Package* tanpa mengikutsertakan India, namun sayangnya usaha AS tersebut tidak berhasil.<sup>66</sup> Tidak berhasil dikarenakan India sendiri merupakan negara dengan populasi terbesar kedua di dunia, sementara TFA sendiri jika diterapkan akan membutuhkan negara dengan populasi terbesar sebagai pasarnya.<sup>67</sup>

Setelah strategi untuk melanjutkan negosiasi tanpa India tidak berhasil, akhirnya AS melakukan negosiasi secara bilateral dengan India. Pada 30 September 2014, Perdana Menteri India Narendra Modi bertemu dengan Presiden AS Barack Obama di Washington

---

<sup>62</sup> Singh. P. J. 2014. "India's multi-faceted WTO refusal" Dalam [https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/08/05/indias-multi-faceted-wto-refusal/?utm\\_term=.ba383fab2367](https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/08/05/indias-multi-faceted-wto-refusal/?utm_term=.ba383fab2367) Diakses 22 Maret 2017

<sup>63</sup> Vazza. P. Agung. Op. Cit.

<sup>64</sup> WTO. "Whose WTO is it anyway?" Dalam [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org1\\_e.htm#ministerial](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org1_e.htm#ministerial) Diakses 25 Maret 2017

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Washington Press Release. Op. Cit.

<sup>67</sup> Sinhal. Kounteya. Op. Cit.



untuk menegosiasikan dua isu yang telah membuat *deadlock Bali Package*.<sup>68</sup> Akhirnya pada 13 November 2014, kedua negara menyetujui kesepakatan mengenai isu ketahanan pangan bagi negara berkembang, untuk memperbolehkan negara berkembang meningkatkan subsidiya demi keamanan stok pangannya.<sup>69</sup> Dari kesepakatan tersebut, mengubah isi dari *Peace Clause* yang sebelumnya hanya bersifat empat tahun, menjadi *open-ended* atau tidak terbatas sampai solusi permanen diperoleh.<sup>70</sup> Ini menunjukkan bahwa AS telah menyetujui permintaan India untuk mengubah *Peace Clause* menjadi tidak terbatas waktu dan pada saat itu juga India mencabut vetonya terhadap perjanjian fasilitas perdagangan dan akan segera meratifikasinya bersamaan dengan anggota WTO lainnya.

*Win-set* yang dimiliki oleh AS pada level I strategi negosiator AS menyetujui permintaan India adalah berukuran besar. *Win-set* terbilang besar dikarenakan AS menggunakan strategi menurunkan *bargaining position* dan berusaha memperbesar *win-set* AS agar dapat terjadi kesepakatan antara AS dengan India. AS mau menyetujui permintaan India asalkan India menarik *vetonya* terhadap TFA. Strategi tersebut dinamakan sebagai *side-payment* karena AS memberikan apa yang diinginkan oleh India asalkan kepentingan AS juga tercapai.

## **5.2. Level Domestik: Institusi Politik Domestik dan Preferensi & Koalisi Konstituen**

Pada sub-bab ini penulis akan menjelaskan dinamika negosiasi India dan AS yang terjadi di level domestik. Menjelaskan bagaimana pengaruh domestik di India dan AS terhadap negosiasinya di KTM Bali. Dibutuhkan persetujuan dari level domestik dalam setiap kesepakatan internasional agar mendapatkan hasil yang sesuai. Karena hasil kesepakatan atau perjanjian internasional tersebut akan diimplementasikan pada masing-masing domestik

---

<sup>68</sup> Akande. Charles. 2014. "U.S.-India Reach Agreement on Trade Facilitation, Paving the Way for the Rest of the Bali Package and Post-Bali Work Program" Dalam [http://www.chickenfarmers.ca/wp-content/uploads/2014/11/EN\\_Geneva\\_Watch\\_Nov\\_17\\_2014.pdf](http://www.chickenfarmers.ca/wp-content/uploads/2014/11/EN_Geneva_Watch_Nov_17_2014.pdf). Diakses 26 Maret 2017

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Damodaran. Harish. Op. Cit.

pihak yang bernegosiasi. Pada penelitian ini, ada dua hal dapat dilihat di level domestik yang mempengaruhi jalannya negosiasi India di KTM Bali yaitu Institusi politik domestik dan preferensi & koalisi konstituen. Institusi politik atau sebuah struktur politik yang membentuk sistem pemerintahan sebuah negara dapat mempengaruhi kepentingan yang dibawa oleh negosiator. Pada institusi politik ini terdapat tiga parameter yaitu sistem pemerintahan dan proses atau prosedur peratifikasian pengambilan keputusan. Kemudian preferensi merupakan sebuah pilihan untuk memilih menyetujui atau tidak menyetujui dan Koalisi konstituen merupakan gabungan dari beberapa kepentingan hingga menjadi satu kesatuan dan membentuk sebuah *win-set*

### **5.2.1. Institusi Politik Domestik India: Sistem Pemerintahan**

Sistem pemerintahan sebuah negara juga mempengaruhi besar kecilnya *win-set* yang dibawa oleh negosiator negara tersebut. Semakin besar otonomi pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan atau disebut sebagai sentralisasi kekuasaan, maka ukuran *win-set* akan semakin besar dan kemungkinan untuk mencapai sebuah kesepakatan akan semakin besar pula. Jika kecilnya otonomi pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan karena adanya pembagian kekuasaan pemerintah pusat ke pemerintah daerah (desentralisasi), maka setiap pemerintah daerah memiliki kepentingannya masing-masing sehingga *win-set* menjadi lebih kecil.

India merupakan negara federal dimana adanya pembagian kekuasaan administratif pemerintahannya atau disebut sebagai desentralisasi. India memiliki 28 *States* atau pemerintah daerah yaitu terdiri dari Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh,

Uttarakhand dan Bengal Barat.<sup>71</sup> Kemudian India juga memiliki 7 *Union* atau pemerintah pusat yaitu terdiri dari Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadar and Nagar Haveli, Daman and Diu, Delhi, Lakshadweep dan Puducherry.<sup>72</sup> Setiap pemerintahan daerah memiliki seorang gubernur yang merupakan kepala dari masing-masing wilayah pemerintahan tersebut dan gubernur dipilih oleh presiden secara langsung.<sup>73</sup> Masing-masing gubernur tersebut dikepalai oleh seorang *Chief Minister* yang bertindak sebagai kepala eksekutif.<sup>74</sup> Meskipun gubernur memiliki kewenangan terhadap kekuasaan pemerintahannya, *Chief Minister* ini yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dibandingkan dengan gubernur dalam membuat suatu kebijakan domestik.<sup>75</sup>

Gambar 2 Pembagian Wilayah Administratif India



Sumber: <http://www.mapsofindia.com/states/>

<sup>71</sup> Mapsofindia. 2016. "Indian States and Union Territories". Dalam <http://www.mapsofindia.com/states/>  
Diakses 6 Mei 2017

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Election.in. 2016. "Governor of India". Dalam <http://www.elections.in/government/state-governor.html>  
Diakses 6 Mei 2017

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

Berdasarkan pembagian kekuasaan wilayah antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, dibagi lagi menjadi tiga fungsi atau *list* yaitu *union list*, *state list* dan *concurrent list*.<sup>76</sup> Pada pemerintahan pusat memiliki *union list* dimana pemerintah pusat atau parlemen bisa membuat hukum kapanpun dan juga pada keadaan darurat. Pemerintahan pusat mengatur permasalahan mengenai kepentingan nasional, seperti pertahanan, kebijakan luar negeri, energy atom, perbankan, pos & telegram dan lain sebagainya.<sup>77</sup> Kemudian pemerintahan daerah memiliki *state list* dimana pemerintah daerah mengatur permasalahan lokal atau daerah seperti polisi, pemerintahan lokal, perdagangan, pertanian dan lain sebagainya.<sup>78</sup> Akan tetapi ketika dalam keadaan darurat nasional atau daerah, kekuasaan untuk membuat hukum terhadap subjek tersebut dilimpahkan kepada parlemen. Lalu *concurrent list* merupakan kekuasaan yang dilimpahkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>79</sup> Hal tersebut meliputi prosedur sipil dan kriminal, pernikahan dan perceraian, pendidikan, perencanaan ekonomi, serikat buruh dan lain sebagainya.<sup>80</sup> Akan tetapi jika terjadi pertentangan dalam pembuatan hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat harus didahulukan.<sup>81</sup>

Meskipun adanya pembagian fungsi otoritas berdasarkan wilayah pemerintahan pusat dan daerah, pasal 248 pada konstitusi di India menyebutkan: “*The Union Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the Concurrent List or the State List*”.<sup>82</sup> Maksudnya adalah adanya *residuary powers* dimana pemerintah pusat atau *Union* memiliki kekuasaan eksklusif untuk membuat keputusan atau sebuah hukum apapun meskipun hal tersebut merupakan fungsi otoritas dari pemerintahan

---

<sup>76</sup> Sharma. H. “*Division of Powers between the Union and States in India (3 lists)*”. Dalam <http://www.preservearticles.com/2014072233503/division-of-powers-between-the-union-and-states-in-india-3-lists.html> Diakses 2017

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

daerah atau *State*. Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan & Industri di wilayah kekuasaan pemerintah pusat.<sup>83</sup> Meskipun perihal pertanian dan perdagangan merupakan bagian dari fungsi otoritas pemerintah daerah, pemerintah pusat mampu membuat suatu kebijakan luar negeri terkait kedua hal tersebut. Ketika pada KTM ke-9 di Bali, Menteri Perdagangan & Industri Anand Sharma merupakan negosiator dari India yang menyampaikan permintaan India menaikkan subsidi hasil pertanian.<sup>84</sup> Kemudian juga pada sebelum KTM ke-9 dimulai, Menteri Anand Sharma dan Menteri Pertanian Sharad Pawar mendapatkan surat dari kelompok petani untuk mempertimbangkan kembali bahwa keamanan pangan penduduk India lebih penting dari pada perjanjian fasilitas perdagangan.<sup>85</sup> Ini menunjukkan pemerintah pusat memiliki otoritas yang lebih tinggi dalam menentukan kebijakan luar negerinya.

Kemudian pada pasal 253 disebutkan bahwa: *“Parliament is competent to legislate on subjects in the state list for the implementation of international treaties, a agreements or convention with foreign states”*.<sup>86</sup> Maksudnya adalah parlemen pemerintah pusat India mampu mengatur semua subjek dari fungsi otoritas pemerintah daerah terkait dengan perjanjian internasional. Oleh karena itu menyangkut permasalahan isu subsidi hasil pertanian di WTO, pemerintah pusat memiliki otoritas penuh dalam menentukan kebijakannya karena menyangkut adanya kesepakatan dengan pihak luar negeri. Dengan demikian dapat disimpulkan meskipun India membagi kekuasaannya (desentralisasi),

---

<sup>83</sup> Election.in. Op. Cit.

<sup>84</sup> Mishra. Asit. Ranjan. 2013. *“Who exactly is Anand Sharma protecting at WTO meet in Bali?”*. Dalam <http://www.livemint.com/Opinion/5TEcFqShvuUA2oH3VG93IN/Who-exactly-is-Anand-Sharma-protecting-in-Bali.html> Diakses 15 Mei 2017

<sup>85</sup> Srivastava. Shruti. 2013. *“Farmers urge PM to reject developed nations' WTO plans”*. Dalam <http://archive.indianexpress.com/news/farmers-urge-pm-to-reject-developed-nations-wto-plans/1196224/1> Diakses 15 Mei 2017

<sup>86</sup> Jaiswal. Vijay. 2013. *“Union and State Legislature of India | Legislative Powers of Union and State Governments”*. Dalam <http://www.importantindia.com/2049/union-and-state-legislature-of-india/> Diakses 14 Mei 2017

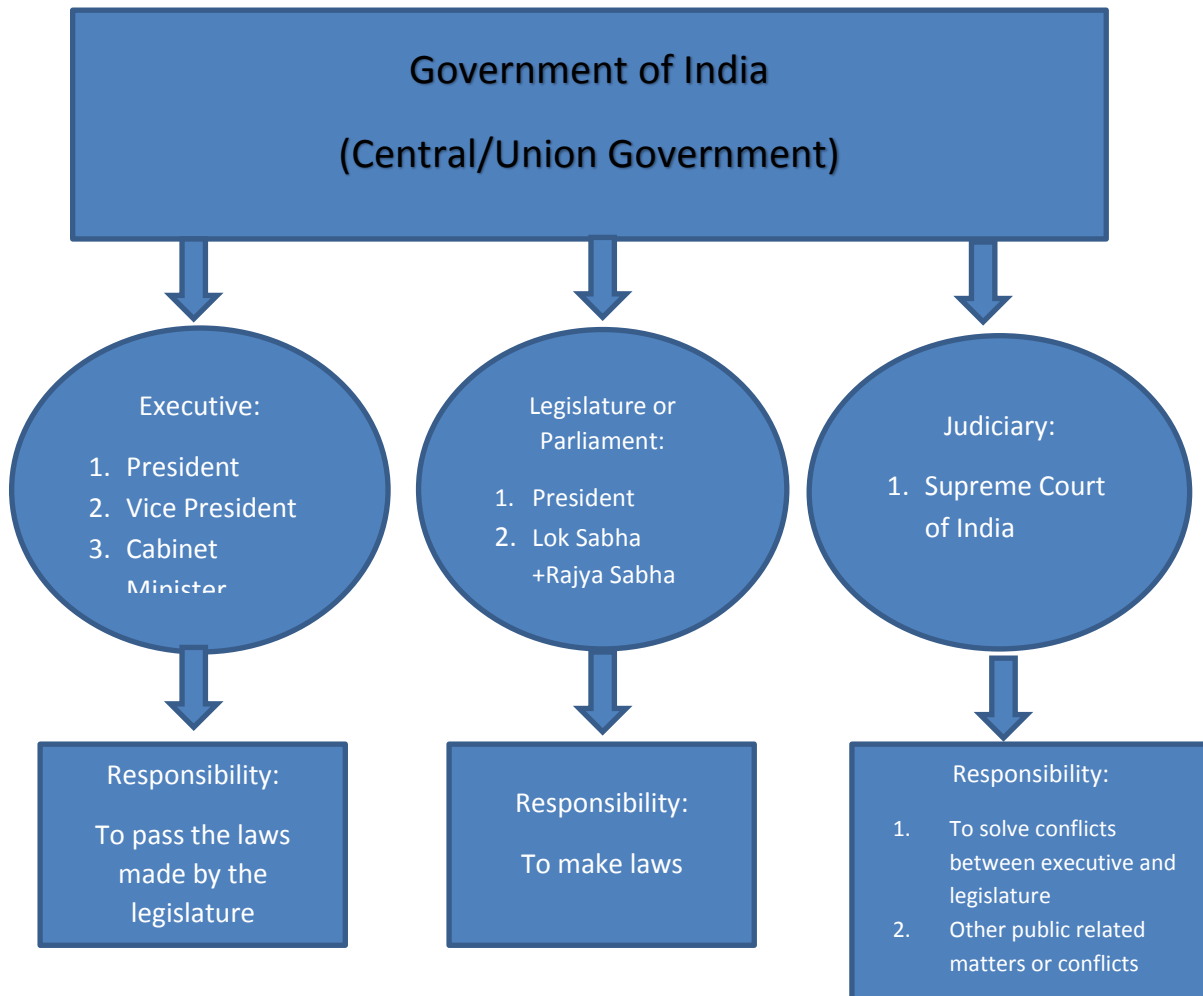
dalam permasalahan kebijakan luar negeri pemerintah pusat memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan pemerintah daerah.

*Win-set* yang dimiliki oleh India pada level II institusi politik domestik sistem pemerintahan India adalah berukuran besar. Dikarenakan meskipun India memiliki sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi dimana adanya pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat (*Union*) dan pemerintahan daerah (*State*), namun segala hal yang bersangkutan dengan kebijakan luar negeri pemerintahan pusat inilah yang berhak menjadi *decision maker*.

### **5.2.2. Institusi Politik Domestik India: Prosedur Peratifikasian**

Dalam proses negosiasi, prosedur peratifikasian *decision making* dalam domestik sebuah negara akan mempengaruhi bagaimana kepentingan atau *win-set* yang akan dibawa ke forum internasional oleh negosiator. Jika semakin kompleks sebuah prosedur, maka akan semakin sulit untuk menentukan kepentingan yang akan dibawa oleh negosiator karena ada banyaknya kepentingan yang dapat dimasukkan dalam peratifikasian oleh berbagai pihak kepentingan, sehingga tidak bisanya terkonsentrasi *win-set* tersebut dan membuat ukuran *win-set* lebih kecil. Sedangkan jika semakin luwes prosedur tersebut, maka akan semakin mudah untuk menentukan kepentingan yang akan dibawa oleh negosiator karena *win-set* akan lebih mudah untuk terkonsentrasi dan membuat ukuran *win-set* lebih besar. Contohnya prosedur peratifikasian sebuah negara dengan sistem 2/3 suara mayoritas membutuhkan lebih banyak suara yang otomatis akan mempersulit pencapaian *win-set* yang diinginkan sehingga menghasilkan sehingga membuat ukuran *win-set* menjadi kecil. Sedangkan negara dengan sistem 50%+1 membutuhkan lebih sedikit suara yang otomatis akan mempermudah pencapaian *win-set* yang diinginkan sehingga ukuran *win-set* menjadi besar.

### Bagan 1 Struktur Pemerintahan India



Sumber: <http://www.elections.in/government/>

India menganut sistem pemerintahan parlementer dimana kedudukan kepala negara dipegang oleh presiden dan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.<sup>87</sup> India mempunyai tiga lembaga politik atau *trias politica* yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Presiden India merupakan kepala dari tiga cabang lembaga politik tersebut.<sup>88</sup> Kekuasaan eksekutif harusnya dipegang oleh presiden sesuai dengan konstitusi India, akan tetapi perdana menteri memiliki peran lebih besar pada kekuasaan eksekutif karena perdana menteri

<sup>87</sup> Election.in. 2015. "Prime Minister of India". Dalam <http://www.elections.in/government/prime-minister.html> Diakses 27 April 2017

<sup>88</sup> Election.in. 2016. "President of India". Dalam <http://www.elections.in/government/president-of-india.html> Diakses 27 April 2017

merupakan kepala dari lembaga eksekutif.<sup>89</sup> Meskipun perdana menteri dan dewan kementerian dipilih langsung oleh presiden, keputusan eksekutif lebih banyak dipegang oleh perdana menteri. Seluruh badan *decision-making* di India, berjalan dengan pengawasan perdana menteri.<sup>90</sup> Perdana menteri juga memiliki peran sebagai penasihat presiden dan memberikan masukan kepada presiden untuk memilih dewan kementerian.<sup>91</sup> Perdana menteri merupakan pemimpin dewan kementerian dan memiliki fungsi sebagai perantara komunikasi antara presiden dengan kabinetnya.<sup>92</sup> Tugasnya untuk mengkomunikasikan kepada presiden mengenai seluruh keputusan yang diambil oleh dewan kementerian dan memberikan seluruh informasi mengenai administrasi dalam legislatif.<sup>93</sup>

Di India, perdana menteri memiliki peran yang sangat besar dalam menjalankan pemerintahannya. Perdana menteri India disebut sebagai *First Among Equals* karena kedudukan dia lebih didahulukan daripada menteri-menteri yang lain.<sup>94</sup> Jika perdana menteri meninggal atau mengundurkan diri, seluruh dewan kementerian juga harus mengundurkan diri.<sup>95</sup> Para menteri dari setiap bidang juga harus melaporkan segala urusannya kepada perdana menteri. Perdana menteri juga bisa meminta seorang menteri untuk mengundurkan diri. Jika ada perbedaan pendapat antara perdana menteri dengan menteri lainnya, maka pendapat dari perdana menteri akan didahulukan.<sup>96</sup> Kemudian peran perdana menteri juga lebih penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri atau melakukan perjanjian dengan negara lain.<sup>97</sup> Meskipun berdasarkan konstitusi pembuatan kebijakan luar negeri merupakan

---

<sup>89</sup> Election.in. 2015. "Prime Minister of India". Dalam <http://www.elections.in/government/prime-minister.html> Diakses 27 April 2017

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Kurtari. Elif. Bali. "Foreign Policy Making Process of Indian National Political Parties, Debates on Nuclear-Deal". Dalam <https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/83ced2e5-c983-435a-9953-73df5223d748.pdf> Diakses 27 April 2017



tanggung jawab Presiden India, akan tetapi pada praktiknya perdana menteri dengan dibantu seluruh dewan kementerian dan menteri luar negeri yang membuat kebijakan luar negeri.<sup>98</sup>

Lembaga legislatif India dilaksanakan oleh parlemen menggunakan sistem dua kamar atau *bicameral*, yaitu terdiri dari Lok Sabha atau *Lower House* dan Rajya Sabha atau *Upper House*.<sup>99</sup> Rajya Sabha memiliki 238 anggota yang dipilih oleh negara bagian dan 12 anggota dipilih langsung oleh presiden.<sup>100</sup> Lok Sabha memiliki 543 anggota yang dipilih oleh rakyat dan dua *Anglo Indian* dipilih oleh presiden.<sup>101</sup> Ketika suatu partai yang memenangkan banyak jumlah kursi pada Lok Sabha, maka partai tersebut yang akan mendominasi jalannya pemerintahan karena partai tersebut akan memilih Perdana Menteri India.<sup>102</sup> Lok Sabha bisa dibubarkan oleh perdana menteri dengan memberikannya kepada presiden, sedangkan Rajya Sabha tidak bisa dibubarkan.<sup>103</sup> Perdana menteri merupakan perantara antara dewan kementerian dengan parlemen untuk merancang sebuah kebijakan.<sup>104</sup> Rajya Sabha dan Lok Sabha memiliki otoritas juga dalam pembuatan kebijakan luar negeri atau perjanjian dengan negara lain. Namun Lok Sabha memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dalam pembuatan kebijakan luar negeri karena menteri luar negeri dimana memiliki tugas untuk mengatur hubungan luar negeri bertanggung jawab langsung terhadap Lok Sabha.<sup>105</sup>

Dalam merancang suatu kebijakan, sebuah proposal kebijakan akan dibacakan kepada parlemen Lok Sabha dan Rajya Sabha, hal tersebut dinamakan *First Reading*.<sup>106</sup> Kemudian disebar luaskan kepada publik dan melihat responnya. Setelah itu, dilakukan *Second Reading*

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Election.in. 2015. "*Parliament of India*". Dalam <http://www.elections.in/government/parliament.html> Diakses 27 April 2017

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Election.in. 2015. "*Indian National Congress(INC)*". Dalam <http://www.elections.in/political-parties-in-india/indian-national-congress.html> Diakses 28 April 2017

<sup>103</sup> Election.in. 2015. "*Prime Minister of India*". Dalam <http://www.elections.in/government/prime-minister.html> Diakses 27 April 2017

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> Kurtari. Elif. Bali. Op. Cit.

<sup>106</sup> Ashworth. David. Op. Cit.

dilakukan untuk mendiskusikan kebijakan tersebut setelah melihat adanya respon dari publik.<sup>107</sup> Lalu dilakukan *Third Reading* dimana semua anggota parlemen harus memilih untuk menyetujui atau tidak menyetujui kebijakan tersebut.<sup>108</sup> Dibutuhkan 50%+1 suara mayoritas untuk menyetujui kebijakan tersebut dan membutuhkan 2/3 suara mayoritas jika kebijakan tersebut harus mengamandemen konstitusi India.<sup>109</sup>

Pada 27 Oktober 2010, sebuah proposal kebijakan baru disusun oleh *National Advisory Council*, sebuah badan yang dibentuk oleh Partai INC untuk membantu dan memberikan masukan kepada Perdana Menteri India untuk mengatur pemerintahan.<sup>110</sup> Sonia Gandhi yang merupakan kepala *National Advisory Council* mengusulkan sebuah rancangan kebijakan yang bernama *National Food Security Bill* (NFSB) kepada Perdana Menteri Manmohan Singh.<sup>111</sup> Kebijakan NFSB ini memiliki tujuan untuk mengamankan stok pangan India dengan cara mensubsidi hasil pertanian yang akan menyangkup 67 persen penduduk India.<sup>112</sup> Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk melindungi keamanan pangan dan nutrisi penduduknya, dengan cara mempermudah akses terhadap jumlah makanan berkualitas yang memadai dengan harga terjangkau kepada penduduk India untuk menjalani kehidupan dengan bermartabat.<sup>113</sup> Kemudian setelah diusulkan kepada Perdana Menteri Manmohan Singh, Singh membuat sebuah komite khusus untuk mengkaji ulang NFSB dan akhirnya setelah itu diperkenalkan kepada parlemen pada 2011.<sup>114</sup>

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> First Post. 2013. "All you need to know about National Food Security Bill". Dalam <http://www.firstpost.com/economy/all-you-need-to-know-about-national-food-security-bill-1063107.html> Diakses 20 Mei 2017

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Department of Food and Public Distribution Government of India. 2013. "National Food Security Act (NFSA), 2013" Dalam <http://dfpd.nic.in/nfsa-act.htm> Diakses 30 April 2017

<sup>114</sup> Sachdev. Anushka. 2015. "An Analysis of the National Food Security Act, 2013" Dalam <https://www.lawctopus.com/academike/analysis-national-food-security-act2013/> Diakses 20 Mei 2017

Karena Kebijakan NFSB jika diberlakukan ini mengharuskan adanya amandemen terhadap konstitusi India,<sup>115</sup> maka dalam peratifikasiannya di dalam parlemen membutuhkan 2/3 suara mayoritas.<sup>116</sup> Isi dari amandemen konstitusi India tersebut adalah:

*“...At the coverage and entitlement now proposed, total estimated annual foodgrains requirement is 612.3 lakh tons and the corresponding estimated food subsidy for implementation of NFSB, at 2013-14 costs, is about Rs. 1,24747 crore. When compared to the estimated food subsidy requirement under existing TDPS and Other Welfare Schemes, the additional food subsidy implication is about Rs.23,800 crore per annum...”<sup>117</sup>*

Dengan kata lain NFSB meningkatkan total subsidi terhadap pangan di India 1,24747 crore (satuan India setara dengan sepuluh juta) rupee, dimana lebih besar 23,800 crore rupee dari perhitungan subsidi sebelum diamandemen. Karena pada *National Food Security Act* tersebut subsidi pada hasil pertanian atau pangan ditingkatkan jumlahnya.

Setelah diratifikasi dan konsitusi telah diamandemen, *National Food Security Bill* telah diberlakukan di India pada September 2013.<sup>118</sup> Keputusan India untuk meminta WTO menaikkan subsidi hasil pertanian untuk melebihi 10% adalah atas dasar kebijakan NFSB tersebut tersebut,<sup>119</sup> maka dari itu India pada KTM Bali meminta untuk diperbolehkannya negara berkembang meningkatkan subsidiya lebih dari batasan awal.

India memiliki sistem multipartai yang mana memiliki banyak partai yang dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan. Akan tetapi partai di India yang dominan berkuasa di pemerintahan diantaranya adalah Indian National Congress (INC) dan Bharatiya Janata Party (BJP).<sup>120</sup> Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meraih kepentingan nasional,

---

<sup>115</sup> Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution. 2013. *“Amendments in the National Food Security Bill Introduced in the Lok Sabha”*. Dalam <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=95441> Diakses 30 April 2017

<sup>116</sup> Ashworth. David. Op. Cit.

<sup>117</sup> Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution. Op. Cit.

<sup>118</sup> Sachdev. Anushka. Op. Cit.

<sup>119</sup> First Post. 2014. *“India-US resolve food security deadlock: Here's what the fight was about”*. Dalam <http://www.firstpost.com/business/economy/india-us-resolve-food-security-deadlock-heres-what-the-fight-was-about-1981991.html> Diakses 20 Mei 2017

<sup>120</sup> Election.in. 2015. *“Indian National Congress(INC)”*. Dalam <http://www.elections.in/political-parties-in-india/indian-national-congress.html> Diakses 28 April 2017

akan tetapi keduanya memiliki ciri khas yang berbeda sehingga membentuk masing-masing pandangan kedua partai tersebut. INC merupakan partai tertua di India dan sifatnya cenderung ke arah kiri atau *center-left* dimana INC memiliki ideologi *Social Democracy*, ekonomi campuran dan privatisasi.<sup>121</sup> Sedangkan BJP merupakan partai yang sifatnya cenderung ke arah kanan atau *center-right* dimana BJP memiliki ideologi *Cultural Nationalism* (mempertahankan budaya hindu India), *Social Conservatism* (menolak pernikahan sesama jenis, melarang aborsi dan lain sebagainya) dan *strong national defence* (mempertahankan kepentingan nasional negaranya).<sup>122</sup> Partai INC dan BJP saling bergantian mendominasi pemerintahan India, dimana INC memulainya pada tahun 1950 dan BJP pada tahun 1977. Pada tahun 2004, INC berhasil mendapatkan kursi terbanyak di Lok Sabha dan memilih Manmohan Singh sebagai Perdana Menteri India yang menjadi kepala pemerintahan hingga tahun 2014.<sup>123</sup> Kemudian pada tahun 2014, BJP berhasil mengalahkan INC dalam pemilihan karena mendapatkan kursi terbanyak di Lok Sabha dan memilih Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India.<sup>124</sup>

Kedua partai memiliki pandangan yang berbeda terhadap isu perjanjian fasilitas perdagangan pada WTO, meskipun keduanya sama-sama mendukung permasalahan keamanan pangan negaranya. INC menyetujui perjanjian fasilitas perdagangan meskipun subsidi hasil pertanian boleh dinaikkan hanya sampai empat tahun,<sup>125</sup> sedangkan BPJ tidak

---

<sup>121</sup> Darlington. Roger. 2016. "A Short Guide to the Indian Political System" Dalam <http://www.rogerdarlington.me.uk/Indianpoliticalsystem.html> Diakses 29 April 2017

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> Election.in. 2015. "Indian National Congress(INC)". Dalam <http://www.elections.in/political-parties-in-india/indian-national-congress.html> Diakses 28 April 2017

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> Jain. Kumar. Arun. 2014. "Press Statement issued by BJP National Spokesperson, Shri GVL Narasimha Rao" Dalam <http://www.bjp.org/media-resources/press-releases/press-shri-gvl-narasimha-rao-on-congress-s-document-reveals-its-intellectual-bankruptcy> Diakses 29 April 2017

mau menyetujui perjanjian fasilitas perdagangan sebelum keinginannya untuk menaikkan subsidi hasil pertanian dinaikkan tanpa adanya batasan waktu.<sup>126</sup>

Dari kedua ideologi partai dominan India tersebut, tercermin ketika dua perdana menteri India memberikan keputusan yang berbeda ketika KTM Bali dan Paska KTM Bali. Dimana Manmohan Singh yang menjabat sebagai perdana menteri India pada tahun 2013 tepatnya pada KTM Bali dimulai, telah menyetujui kesepakatan *Peace Clause* dengan batas waktu empat tahun.<sup>127</sup> Keputusan tersebut dilatar belakangi oleh Manmohan Singh dengan partainya yang berkuasa pada saat itu INC dengan sifatnya yaitu ke arah kanan atau liberal yang akan cenderung untuk menerima kerja sama internasional. Kemudian pada pertengahan tahun 2014 ketika Narendra Modi menjabat sebagai Perdana Menteri India dengan partainya yang berkuasa di Lok Sabha yaitu BJP yang sifatnya ke arah kiri atau konservatif, tidak mentolerir mengenai keamanan pangan karena sesuai dengan prinsipnya yaitu *strong national defence* atau mendahulukan kepentingan nasionalnya.<sup>128</sup>

Perdana Menteri India Manmohan Singh pada KTM Bali Desember 2013 (pada saat itu diwakilkan oleh Menteri Perdagangan India Anand Sharma) awalnya memang meminta subsidi hasil pertanian dinaikkan melebihi batasan awal.<sup>129</sup> Manmohan Singh ingin mengamankan stok pangannya sebelum menyetujui perjanjian global Paket Bali.<sup>130</sup> Akan tetapi mengubah keputusannya untuk menerima *Peace Clause* bersifat empat tahun karena banyaknya tekanan internasional. India kehilangan dukungan dari negara besar seperti China,

---

<sup>126</sup> The Hindu. 2014. "Trade facilitation on track". Dalam <http://www.thehindu.com/opinion/editorial/trade-facilitation-on-track/article6608755.ece> Diakses 29 April 2017

<sup>127</sup> Basu. Nayanima. 2013. "India agrees to WTO's 4-year 'peace clause'". Dalam [http://www.business-standard.com/article/economy-policy/india-agrees-to-wto-s-4-year-peace-clause-113112700795\\_1.html](http://www.business-standard.com/article/economy-policy/india-agrees-to-wto-s-4-year-peace-clause-113112700795_1.html) Diakses 29 April 2017

<sup>128</sup> The Hindu. Op. Cit.

<sup>129</sup> Rushford. Greg. 2013. "Delhi holds free trade hostage to score political points at home". Dalam <http://rushfordreport.com/?m=201408> Diakses 30 April 2017

<sup>130</sup> *Ibid.*

Brazil dan Rusia.<sup>131</sup> Kemudian tidak semua negara berkembang setuju terhadap permintaan India pada saat itu karena ada beberapa negara yang tidak bisa meniru kebijakan India untuk mensubsidi hasil pertaniannya lebih dari batasan awal, salah satu negara yang tidak setuju dengan India yaitu Negara Benin.<sup>132</sup> Mereka ingin Paket Bali berjalan lancar karena dengan adanya perjanjian fasilitas perdagangan akan menguntungkan negara-negara LDC, Amerika Selatan dan Afrika.<sup>133</sup> Keuntungan tersebut seperti mudahnya barang produksi melewati bea cukai negara lain, memperbaiki infrastruktur, memperbaiki prosedur produksi barang yang tidak efisien dan lain sebagainya.<sup>134</sup> Oleh karena itu, akhirnya India menyetujui keputusan *Peace Clause* bersifat empat tahun tersebut.

Kemudian ketika BJP berkuasa di Lok Sabha pada pertengahan tahun 2014 dan mengangkat Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India, Modi memanfaatkan perannya sebagai Perdana Menteri yang secara praktik lebih berkuasa terhadap pemerintahan India dan kebijakan luar negeri. Modi mengubah keputusan awal India pada KTM Bali untuk menolak meratifikasi perjanjian fasilitas perdagangan sebelum permintaannya mengenai kenaikan subsidi hasil pertanian tanpa batas waktu terpenuhi.<sup>135</sup> India merasa negara maju tidak akan menaruh perhatiannya terhadap keamanan pangan negara berkembang jika perjanjian fasilitas perdagangan sudah terlaksana.<sup>136</sup> Meskipun India mendapatkan banyak tekanan internasional terutama Amerika Serikat dan juga tidak mendapatkan dukungan dari koalisi G33 seperti sebelumnya dan yang mendukung India hanya Negara Afrika Selatan, Bolivia, Kuba dan Venezuela, India tetap mempertahankan keputusannya.<sup>137</sup>

---

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> Babu Rajesh R. Op. Cit.

<sup>137</sup> *Ibid.*

Narendra Modi dengan partainya yaitu BJP yang bersifat konservatif atau dengan kata lain memiliki ideologi *strong national defence*, tetap bersikeras mempertahankan posisinya dalam menolak meratifikasi perjanjian fasilitas perdagangan.<sup>138</sup> Ketika pada pertemuannya dengan Barack Obama di Washington, Narendra Modi mengatakan "*India supports trade facilitation. However, I also expect that we are able to find a solution that takes care of our concern on food security. I believe that it should be possible to do that soon*".<sup>139</sup> Ini menunjukkan bahwa Modi tidak mau melanjutkan perjanjian fasilitas perdagangan sebelum permintaan mengenai subsidi disetujui. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa perdana menteri India dengan partainya yang mengangkat posisinya memiliki peran penting dalam membuat suatu keputusan atau *decision making*.

*Win-set* yang dimiliki oleh India pada level II institusi politik domestik prosedur peratifikasian adalah berukuran kecil. Dikarenakan prosedur peratifikasian dalam membuat suatu kebijakan membutuhkan 2/3 suara mayoritas pada perlemen. Parlemen India menggunakan 2/3 suara mayoritas tersebut karena dalam membuat kebijakan NFSB, mengharuskan adanya amandemen konstitusi India.

### **5.2.3. Institusi Politik Domestik AS: Sistem Pemerintahan**

AS merupakan negara federal dimana adanya pembagian kekuasaan administratif pemerintahannya atau disebut sebagai desentralisasi. AS memiliki 50 negara bagian dan satu distrik yang menjadi ibu kota negara AS.<sup>140</sup> 50 negara bagian tersebut adalah Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland,

---

<sup>138</sup> Darlington. Roger. Op. Cit.

<sup>139</sup> Agence France-Press. 2014. "*PM Narendra Modi Tells Obama He Hopes for Trade Pact Deal 'Soon*". Dalam <http://www.ndtv.com/india-news/pm-narendra-modi-tells-obama-he-hopes-for-trade-pact-deal-soon-673247> Diakses 20 Mei 2017

<sup>140</sup> Dickson. 2017. "Profil Negara Amerika Serikat (United States of Amerika)". Dalam <http://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-amerika-serikat-united-states-amerika/> Diakses 6 Agustus 2017

Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming, dan Washington DC sebagai ibukota negara AS.<sup>141</sup>

**Gambar 3 Pembagian Wilayah Administratif Amerika Serikat**



Sumber: <http://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-amerika-serikat-united-states-amerika/>

Masing-masing negara bagian atau *State* memiliki kewenangan untuk membuat hukum asalkan tidak berlawanan dengan konstitusi AS. *States* ini memiliki kewenangan penuh atas apapun yang terjadi di wilayahnya, akan tetapi sebuah *State* tidak diperbolehkan ikut campur dengan urusan *State* lainnya.<sup>142</sup> Oleh karena itu masing-masing *States* memiliki *power* yang sama.<sup>143</sup> Ruang lingkup yang menjadi wewenang *States* adalah menyusun sistem

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> TheyDiffer. 2016. "Difference between State and Federal Government". Dalam <https://theydiffer.com/difference-between-state-and-federal-government/> Diakses 6 Agustus 2017

<sup>143</sup> *Ibid.*



pemerintahan negara bagian tersebut, membuat lisensi (seperti SIM, pernikahan, berburu dan lain-lain), mengatur perdagangan antar *State*, mengadakan pemilihan, menyediakan keamanan dan kesehatan, dan lain sebagainya.<sup>144</sup>

Kemudian pada pemerintahan pusat atau disebut sebagai *Federal Government* merupakan pemerintahan AS yang memiliki wewenang untuk membuat konstitusi nasional.<sup>145</sup> Segala peraturan yang dibuat oleh *States*, tidak diperbolehkan berlawanan dengan apa yang ada di dalam konstitusi AS.<sup>146</sup> Meskipun seluruh *States* memiliki *power* yang sama, akan tetapi *power* yang dimiliki oleh *Federal* lebih tinggi.<sup>147</sup> Ruang lingkup yang menjadi wewenang *Federal* adalah mencetak uang, mendeklarasikan perang, membuat perjanjian dengan negara lain, mengatur perdagangan antar *States* dan perdagangan internasional.<sup>148</sup>

Jika menyangkut dengan luar negeri atau negara lain, maka *Federal* sebagai pemerintah pusat memiliki otoritas penuh dalam mengurus hal tersebut. Oleh karena itu pada negosiasi *Peace Clause* pemerintah pusat yang memiliki wewenang menjadi *decision maker*. Sehingga *win-set* yang dimiliki oleh AS pada level II institusi politik domestik AS adalah berukuran besar. Dikarenakan yang menjadi *decision maker* adalah pemerintah pusat atau *federal*.

#### **5.2.4. Institusi Politik Domestik AS: Prosedur Peratifikasian**

---

<sup>144</sup> Longley, Robert. 2017. "Federalism: A Government System of Shared Powers". Dalam <https://www.thoughtco.com/federalism-powers-national-and-state-governments-3321841> diakses 6 Agustus 2017

<sup>145</sup> *Ibid.*

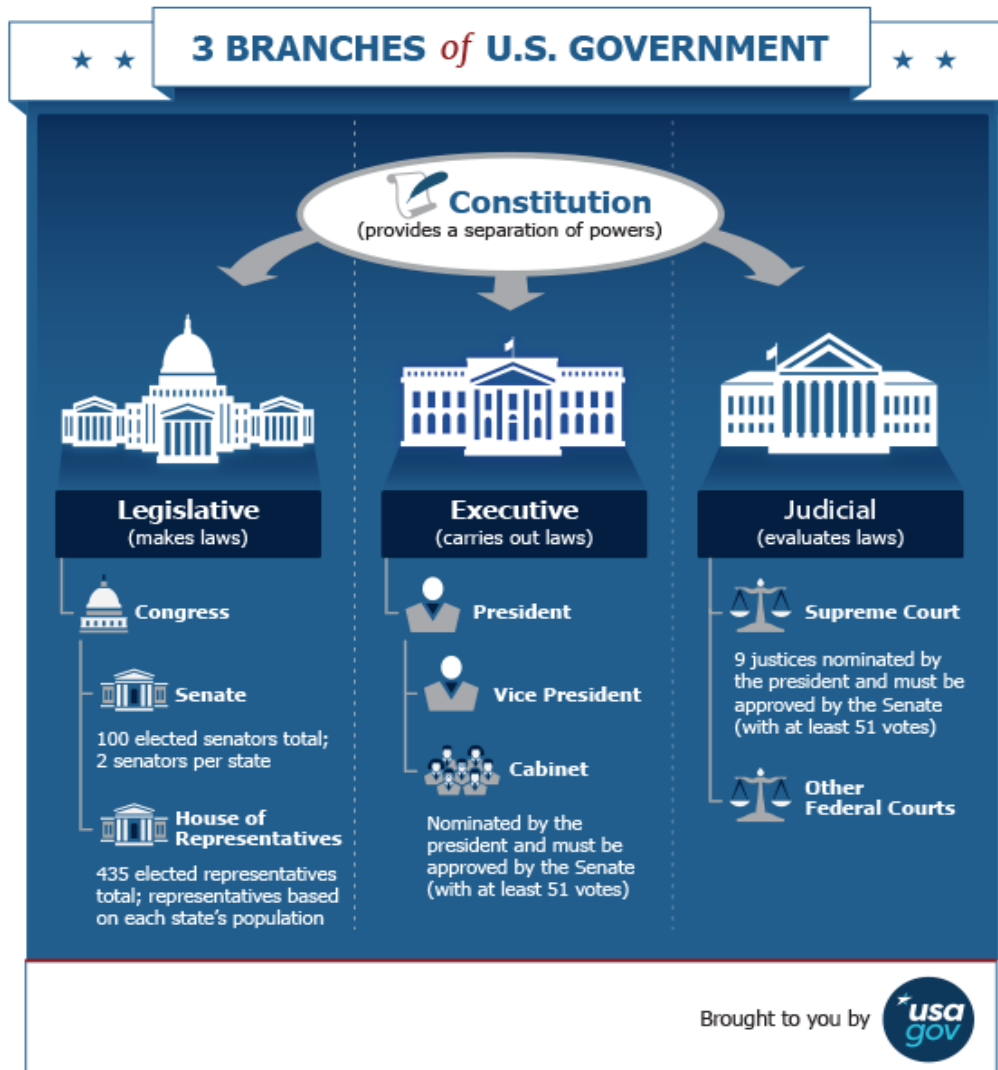
<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> TheyDiffer. Op. Cit.

<sup>148</sup> Longley, Robert. Op. Cit.

Gambar 4 Lembaga Politik Amerika Serikat

Sumber:



<https://www.usa.gov/branches-of-government>

Setiap wilayah pemerintahan, *States* ataupun *Federal* memiliki tiga pembagian kekuasaan lembaga politik atau *trias politica* yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, namun tetap yang memiliki *power* lebih besar berada pada *Federal*.<sup>149</sup> AS juga menerapkan sistem *Check and Balances* untuk membuat masing-masing lembaga politik memiliki kewenangan untuk saling mengawasi dan mengontrol.<sup>150</sup>

AS menganut sistem pemerintahan presidensial dimana kekuatan eksekutif AS dipegang oleh presiden, sehingga presiden AS memiliki kedudukan sebagai kepala negara

<sup>149</sup> TheyDiffer. Op. Cit.

<sup>150</sup> *Ibid.*

dan juga sebagai kepala pemerintahan.<sup>151</sup> Sebagai lembaga eksekutif, presiden memiliki wewenang untuk mengatur urusan nasional dan mengatur jalannya pemerintahan pusat. Presiden juga memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan domestik yang dinamakan sebagai *Executive Orders*.<sup>152</sup> Pada wewenang ini presiden bisa mengeluarkan berbagai peraturan atau ketetapan yang tidak memerlukan persetujuan kongres (parlemen AS) akan tetapi tetap terikat pada konstitusi yang ada.<sup>153</sup> Presiden juga memiliki wewenang untuk menyetujui ataupun mengajukan *veto* terhadap sebuah kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau kongres. Kongres sendiri juga bisa menolak pengajuan *veto* oleh presiden melalui *voting 2/3* suara mayoritas.<sup>154</sup>

Lembaga legislatif AS dilaksanakan oleh kongres menggunakan sistem *bicameral*, yaitu terdiri dari Senat (representatif negara bagian) dan *House of Representative* (Dewan Perwakilan Rakyat).<sup>155</sup> Kongres inilah yang merancang atau membuat kebijakan yang akan diterapkan pada AS. Awalnya akan ada sebuah rancangan kebijakan baru atau sebuah usulan kebijakan baru yang bisa dibuat oleh siapa saja.<sup>156</sup> Namun yang dapat mengenalkan usulan tersebut hanyalah anggota dari kongres. Setelah itu isi dari rancangan tersebut akan diperdebatkan oleh Senat dan *House of Representative*.<sup>157</sup> Kemudian setelah diperdebatkan apakah rancangan tersebut layak atau tidak jika dimasukkan ke dalam konstitusi, maka akan dikembalikan lagi kepada masing-masing lembaga dan diperdebatkan kembali apakah rancangan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak.<sup>158</sup> Setelah itu kembali lagi kepada kongres

---

<sup>151</sup> Darlington. Roger. 2017. "A SHORT GUIDE TO THE AMERICAN POLITICAL SYSTEM". Dalam <http://www.rogerdarlington.me.uk/Americanpoliticalsystem.html> Diakses 6 Agustus 2017

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> *Ibid.*

<sup>156</sup> Union of Concerned Scientist. "The U.S. Legislative Process". Dalam <http://www.ucsusa.org/action/the-us-legislative-process.html#.WYdLRGKGPIX> Diakses 7 Agustus 2017

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> *Ibid.*

dan diputuskan apakah rancangan kebijakan tersebut dilegalkan atau tidak melalui *voting* mayoritas 50%+1 (218 dari *House of Representative* dan 51 dari Senat).<sup>159</sup>

AS memiliki dua partai yang dominan diantaranya adalah Partai Demokrat dan Partai Republikan.<sup>160</sup> Keduanya memiliki ideologi yang berbeda dimana Partai Demokrat cenderung bersifat liberal dan Partai Republikan cenderung bersifat konservatif. Partai Demokrat memiliki ideologi seperti kesetaraan, melihat intervensi pemerintah sebagai suatu hal yang baik, mendukung keadilan sosial.<sup>161</sup> Sedangkan Partai Republikan memiliki ideologi membatasi intervensi pemerintah dan mendukung kebijakan fiskal.<sup>162</sup> Akan tetapi partai tidak terlalu berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri karena yang lebih berpengaruh adalah presidennya. Meskipun sebuah partai mencalonkan calon presidennya dan memenangkan kedudukan presiden, maka belum tentu yang menguasai *House of Representative* adalah partai dengan calon presiden yang menang tersebut.<sup>163</sup>

Presiden AS memiliki peran yang lebih besar dalam hal kebijakan luar negeri. Presiden AS memiliki wewenang untuk membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan dari Senat. Ini dibuktikan dengan konstitusi AS pada *Article II* yang menyatakan bahwa presiden memiliki kedudukan sebagai *Commander in Chief of The Army* atau sebagai panglima perang yang dapat mendeklarasikan perang dengan negara lain.<sup>164</sup> Dengan begitu menandakan bahwa presiden memiliki kekuasaan untuk mengontrol bagaimana negara AS berinteraksi dengan negara lain.

---

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> Darlington. Roger. Op. Cit.

<sup>161</sup> Singh. Robert. 2003. *American Governments and Politics: A Concise Introduction*. Sage Publications: London. Hlm 53

<sup>162</sup> *Ibid.*

<sup>163</sup> Mason. Jeff dan Roberta Rampton. 2015. "After Shooting, Angry Obama Blasts U.S. Gun Politics". Dalam <http://www.reuters.com/article/us-usa-shooting-oregon-obama-idUSKCNORV5W120151002> Diakses 7 Agustus 2017

<sup>164</sup> LII. 1992. "Article II". Dalam <https://www.law.cornell.edu/constitution/articleii> Diakses 7 Agustus 2017

*Win-set* yang dimiliki oleh AS pada level II institusi politik domestik AS adalah berukuran besar. Dikarenakan pada pembuatan kebijakan di AS memerlukan *voting* 50%+1 pada kongres yang terdiri dari Senat dan *House of Representative*.

### **5.2.5. Preferensi: Pilihan India untuk Tidak Meratifikasi atau Meratifikasi TFA**

Dalam bernegosiasi di lingkup internasional, suatu negara memiliki sebuah preferensi atau sebuah pilihan untuk menyetujui atau tidak menyetujui sebuah kesepakatan berdasarkan pertimbangan untung ruginya. Adanya preferensi dalam bernegosiasi untuk membuat sebuah kesepakatan ini yang dapat mempengaruhi ukuran *win-set*. Dalam menentukan untuk menyetujui atau tidak menyetujui sebuah kesepakatan, tergantung pada besar kecilnya harga yang harus dibayar atau kerugian yang diterima negara tersebut. Semakin rendah kerugian jika tidak terjadi kesepakatan atau *no agreement* bagi suatu negara, maka akan semakin kecil *win-set* negara tersebut.

India merasa negara maju akan tidak menaruh perhatiannya terhadap keamanan pangan negara berkembang jika perjanjian fasilitas perdagangan sudah terlaksana.<sup>165</sup> Oleh karena itu pada saat hari mendekati peratifikasian perjanjian fasilitas perdagangan atau *Trade Facilitation Agreement* (TFA), India menggunakan strategi menjadikan TFA sebagai tiket posisi tawarnya untuk mengamankan keamanan stok pangannya demi melindungi kesejahteraan penduduknya.<sup>166</sup> Dengan begitu satu-satunya jalan untuk bisa melanjutkan TFA, negara anggota WTO lainnya terutama negara maju harus mau menaruh perhatiannya terhadap keamanan pangan negara berkembang dan menyetujui permintaan India. Akhirnya permintaan India untuk menaikkan subsidi hasil pertanian melebihi 10% tidak ada batas waktu untuk semua negara berkembang tercapai. Disetujuinya permintaan India tersebut mengubah isi dari *Peace Clause* yang sebelumnya hanya bersifat empat tahun, menjadi *open-*

---

<sup>165</sup> Babu Rajesh R. Op. Cit. Hlm 14.

<sup>166</sup> Vazza. P. Agung. Op. Cit.

*ended* atau tidak terbatas sampai solusi permanen diperoleh.<sup>167</sup> Kemudian pada saat itu juga, India mencabut vetonya terhadap perjanjian fasilitas perdagangan dan akan segera meratifikasinya bersamaan dengan anggota WTO lainnya.<sup>168</sup>

Keputusan India untuk mengajukan veto terhadap TFA memiliki beberapa pertimbangan untung ruginya. Dalam negosiasi pada KTM Bali di WTO ini India memiliki preferensi antara tidak menyetujui TFA atau menyetujuinya. Pada awalnya, India telah setuju dengan kesepakatan *Peace Clause* bersifat empat tahun karena pada saat itu India merasa keuntungan untuk menyetujui TFA lebih besar daripada kerugiannya. Akan tetapi pada saat mendekati peratifikasian TFA, India mengubah keputusannya karena India merasa akan lebih banyak memiliki keuntungan untuk tidak menyetujui TFA daripada kerugiannya. Ini dibuktikan dengan adanya sikap India yang bersikeras untuk tetap menolak ratifikasi TFA sebelum permintaan kenaikan subsidi hasil pertanian dengan tidak ada batasan waktu dipenuhi.<sup>169</sup>

Keuntungan India dengan menyetujui TFA adalah mempermudah aliran barang melewati lintas negara dan akan menghemat biaya transaksi.<sup>170</sup> Kemudian dengan diberlakukannya TFA ini juga akan menghilangkan hambatan non tariff, mempercepat pergerakan barang, dan mempermudah perizinan masuknya barang.<sup>171</sup> Diperkirakan perjanjian ini jika terlaksana, akan meningkatkan GDP secara global 960 milyar USD dan menciptakan 21 juta lapangan pekerjaan.<sup>172</sup> Selain itu, perjanjian fasilitas perdagangan juga akan mengurangi biaya perdagangan global 14,1% untuk negara *low-income*, 15,1% untuk

---

<sup>167</sup> Damodaran. Harish. Op. Cit.

<sup>168</sup> *Ibid.*

<sup>169</sup> Agence France-Press. Op. Cit.

<sup>170</sup> *Ibid.* Hlm 3.

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> Hufbauer. Gary dan Jeffrey Schott. 2013. "*Payoff from the World Trade Agenda 2013*" Dalam [http://www.iccindiaonline.org/reports/Peterson\\_Report.pdf](http://www.iccindiaonline.org/reports/Peterson_Report.pdf) Hlm 7. Diakses 24 Maret 2017.

negara *middle-income* dan 12,9% untuk negara *upper-middle*.<sup>173</sup> Dengan begitu meningkatkan efisiensi bea cukai dan transportasi akan mengintegrasikan negara berkembang terhadap ekonomi global dan meningkatkan daya saing ekspor atau *Foreign Direct Investment (FDI)*.<sup>174</sup>

Kerugian India untuk menyetujui TFA adalah semakin banyaknya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh penduduk India karena tingkat kelaparan yang tinggi dan para petani India yang tidak dapat menjual hasil produksi mereka.<sup>175</sup> India merupakan negara dengan tingkat kelaparan tinggi yang menempati urutan ketiga di dunia dan dari tahun ke tahun ancaman kelaparan semakin memburuk di India.<sup>176</sup> Menurut *United Nations Human Development Reports*, India menempati posisi 115 dari 162 negara pada tahun 2001 dan pada tahun 2011 India menempati posisi 134 dari 187 negara.<sup>177</sup> Dengan menyetujui TFA India tidak akan bisa bersaing dengan negara lain karena produktivitasnya menurun.<sup>178</sup> Produktivitas tersebut menurun disebabkan oleh kurangnya kesejahteraan penduduknya.<sup>179</sup>

Keuntungan dari preferensi untuk tidak menyetujui TFA yang didapat India adalah India dapat menyelamatkan penduduknya dari kelaparan. Menurut Badan *Oxford Poverty and Human Development Initiative* untuk UNDP mengindikasikan bahwa 645 juta penduduk atau sekitar 55 persen penduduk India tergolong miskin<sup>180</sup>. Selain itu, keuntungan untuk tidak menyetujui TFA juga dapat mengurangi banyaknya kasus bunuh diri penduduk India yang berprofesi sebagai petani karena tidak terjualnya hasil produksi mereka.<sup>181</sup> Banyak penduduk India yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, hingga pada tahun 2012

---

<sup>173</sup> Babu Rajesh R. Op. Cit. Hlm 3.

<sup>174</sup> *Ibid.*

<sup>175</sup> Singh. P. J. Op. Cit.

<sup>176</sup> Jafri. Afsar. Op. Cit.

<sup>177</sup> *Ibid.*

<sup>178</sup> *Ibid.*

<sup>179</sup> *Ibid.*

<sup>180</sup> *Ibid.*

<sup>181</sup> Singh. P. J. Op. Cit.

terhitung sebanyak 50% dari total penduduk berprofesi sebagai petani.<sup>182</sup> Akan tetapi, hampir 300.000 petani melakukan bunuh diri dengan cara menggantung dirinya atau mencerna makanan yang mengandung pestisida.<sup>183</sup> Angka bunuh diri tersebut mengalami peningkatan 47% lebih tinggi pada tahun 2011 daripada pada tahun sebelumnya, sekitar 41 petani bunuh diri tiap harinya.<sup>184</sup> Hal tersebut terjadi karena tingginya tingkat hutang para petani agar dapat memproduksi hasil pertanian dan jatuhnya harga-harga hasil pertanian India di pasar internasional.<sup>185</sup>

Tingginya biaya untuk memproduksi hasil pertanian membuat para petani India terpaksa melakukan hutang.<sup>186</sup> Semenjak tahun 1998 India sudah menerapkan liberalisasi perdagangan dimana perusahaan global dari luar negeri seperti Cargill, Monsanto dan Syngenta bisa masuk dengan mudah ke domestik India.<sup>187</sup> Perusahaan global tersebut mengganti bibit pertanian milik petani India yang mulanya bisa disimpan atau dihemat dengan bibit unggul yang perlu diberi pestisida dan tidak bisa disimpan.<sup>188</sup> Hal tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan global karena mereka telah mencegah petani India untuk menyimpan bibit pertaniannya dengan cara mempatenkan bibit unggul milik perusahaan tersebut.<sup>189</sup> Dengan begitu petani India harus membeli bibit unggul dari perusahaan tersebut setiap pada musim mulai menanam.<sup>190</sup> Selain itu, bibit unggul tersebut membuat hama baru bermunculan dan mengharuskan para petani India membeli banyak pestisida untuk mengatasi

---

<sup>182</sup> The Hindu BusinessLine. 2014. "Agriculture dependent population in India grew by 50% during 1980-2011". Dalam <http://www.thehindubusinessline.com/economy/agriculture-dependent-population-in-india-grew-by-50-during-19802011/article5732072.ece> Diakses 22 Mei 2017

<sup>183</sup> Al-Jazeera. 2015. "India's shocking farmer suicide epidemic". Dalam <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/05/india-shocking-farmer-suicide-epidemic-150513121717412.html> Diakses 22 Mei 2017

<sup>184</sup> *Ibid.*

<sup>185</sup> Shiva. Vandana. "From Seeds of Suicide to Seeds of Hope: Why Are Indian Farmers Committing Suicide and How Can We Stop This Tragedy?". Dalam [http://www.huffingtonpost.com/vandana-shiva/from-seeds-of-suicide-to\\_b\\_192419.html](http://www.huffingtonpost.com/vandana-shiva/from-seeds-of-suicide-to_b_192419.html) Diakses 22 Mei 2017

<sup>186</sup> *Ibid.*

<sup>187</sup> *Ibid.*

<sup>188</sup> *Ibid.*

<sup>189</sup> *Ibid.*

<sup>190</sup> *Ibid.*



hama tersebut.<sup>191</sup> Ini menimbulkan meningkatnya tingkat kelaparan yang berujung pada hutang dan berakhir dengan tinggi tingkat kematian para petani.

Jatuhnya harga-harga produksi pertanian di pasar internasional disebabkan oleh adanya kebijakan perdagangan bebas dari WTO.<sup>192</sup> Dimana negara-negara maju dapat dengan mudah meningkatkan subsidi pertaniannya sehingga mencegah negara-negara lain untuk melindungi para petaninya. Harga global gandum menjadi lebih murah dari \$216 per ton di tahun 1995 menjadi \$133 per ton di tahun 2001, harga kapas dari \$98,2 per ton di tahun 1995 menjadi \$49,1 per ton di tahun 2001, dan harga kedelai dari \$273 per ton di tahun 1995 menjadi \$178 per ton di tahun 2001.<sup>193</sup> Oleh karena itu India sebagai negara dengan populasi petani yang tinggi, mengalami kerugian karena hasil produksinya menjadi lebih murah, menyebabkan petani India tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan berakhir dengan bunuh diri. Kemudian pada tahun 2011-2012, Petani India tidak sanggup memproduksi hasil pertanian karena meningkatnya biaya produksi yang dibutuhkan hingga 10 kali lipat dan juga subsidi dari Pemerintahan India sendiri tidak cukup untuk membantu petani untuk memproduksi hasil pertanian.<sup>194</sup> Biaya produksi beras 1.700 Rupee per kuintal sedangkan subsidi hanya 1.285 Rupee dan biaya produksi gandum 1.500 Rupee per kuintal sedangkan subsidi hanya 1.110 Rupee.<sup>195</sup>

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, India membuat kebijakan domestik baru yang bernama *National Food Security Bill* (NFSB) yang telah diberlakukan di India pada September 2013.<sup>196</sup> Kebijakan NFSB ini memiliki tujuan untuk mengamankan stok pangan

---

<sup>191</sup> *Ibid.*

<sup>192</sup> *Ibid.*

<sup>193</sup> *Ibid.*

<sup>194</sup> Shiva, Vandana. 2014. "Barriers to Sustainable Farming Put Burden on World's Poor". Dalam <https://www.ecowatch.com/barriers-to-sustainable-farming-put-burden-on-worlds-poor-1881961525.html> Diakses 2 Juni 2017

<sup>195</sup> *Ibid.*

<sup>196</sup> Sachdev, Anushka. Op. Cit.

India dengan cara mensubsidi hasil pertanian.<sup>197</sup> Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk melindungi keamanan pangan dan nutrisi penduduknya, dengan cara mempermudah akses terhadap jumlah makanan berkualitas yang memadai dengan harga terjangkau kepada penduduk India untuk menjalani kehidupan dengan bermartabat.<sup>198</sup>

NFSB menjadi dasar India memiliki kepentingan untuk meningkatkan subsidi hasil pertaniannya melebihi dari 10% yang menjadi batasan awal. Akan tetapi NFSB bertolak belakang dengan TFA dimana semakin dipermudahnya perdagangan bebas hambatan antar negara anggota WTO. Oleh karena itu India meminta kepada negara anggota WTO lainnya untuk diperbolehkannya negara berkembang meningkatkan subsidi hasil pertanian yang sifatnya tidak ada batas waktu agar dapat menyeimbangi diberlakukannya TFA. Permintaan India tersebut ditentang oleh banyak negara maju karena dikhawatirkan negara-negara berkembang dapat membanjiri pasar internasional dengan produk agrikulturnya karena dapat mengganggu harga komoditas dunia.<sup>199</sup> Hal inilah yang menjadi kerugian dari preferensi India jika tidak menyetujui TFA, India akan mendapatkan konsekuensi akan munculnya sikap pesimis oleh negara-negara anggota WTO lain terhadap India karena telah menghalangi kesepakatan global.<sup>200</sup>

Kesepakatan *Bali Package* merupakan kesepakatan global pertama yang dipayungi oleh WTO.<sup>201</sup> Kesepakatan *Bali Package* merupakan kali pertama dalam sejarah WTO terjadinya kesepakatan karena selama satu dekade lebih ketika dimulainya perundingan DDA tidak pernah terjadi kesepakatan. Oleh karena itu, ketika India memutuskan untuk mengubah keputusannya untuk tidak melanjutkan peratifikasian perjanjian fasilitas perdagangan, India dianggap sebagai satu-satunya penghalang perjanjian perdagangan multilateral atau global.

---

<sup>197</sup> *Ibid.*

<sup>198</sup> Department of Food and Public Distribution Government of India. Op. Cit.

<sup>199</sup> Firmansyah. Fery dan Putu Hery. Op. Cit.

<sup>200</sup> Rushford. Greg. Op. Cit.

<sup>201</sup> Kumar. Manoj dan Tom Miles. Op. Cit.

Hal tersebut membuat banyak negara anggota WTO lainnya terutama negara maju seperti AS mengkritik tindakan India yang tiba-tiba mengubah keputusannya.

Keputusan India dapat menyebabkan kerugian yang cukup signifikan bagi negara anggota WTO terutama negara maju (kerugian tersebut seperti negara di dunia akan lebih mengupayakan perdagangan pada tingkat regional atau bilateral daripada multilateral).<sup>202</sup> Oleh karena itu India mendapatkan berbagai tekanan dari internasional seperti tidak mendapatkan dukungan dari koalisi G33 seperti sebelumnya, tidak didukung oleh negara berkembang lainnya seperti Negara Benin,<sup>203</sup> kehilangan dukungan dari negara besar seperti China, Brazil, Rusia,<sup>204</sup> dan yang mendukung India hanya Negara Afrika Selatan, Bolivia, Kuba dan Venezuela.<sup>205</sup> Tidak hanya itu, AS salah satu negara maju yang menolak permintaan India untuk menaikkan subsidi hasil pertanian, mengupayakan negara anggota WTO lainnya untuk melanjutkan kesepakatan TFA dilanjutkan tanpa persetujuan India.<sup>206</sup> Berbagai tekanan yang didapatkan oleh India tersebut merupakan konsekuensi dari keputusan India untuk melakukan veto terhadap TFA. India juga dapat membuat reputasinya sebagai partner kerja sama atau negosiasi menjadi tidak dapat dipercaya karena keputusan India yang tidak menunjukkan komitmennya.<sup>207</sup>

**Tabel 1 Perbandingan Untung dan Rugi Preferensi India**

Preferensi India	Keuntungan	Kerugian
Menyetujui TFA	Terintegrasi terhadap perekonomian global	Semakin bertambahnya angka kelaparan dan bertambahnya tingkat bunuh

<sup>202</sup> Dominguez. Gabriel. Op. Cit.

<sup>203</sup> Rushford. Greg. Op. Cit.

<sup>204</sup> *Ibid.*

<sup>205</sup> Babu Rajesh R. Op. Cit.

<sup>206</sup> Washington Press Release. Op. Cit.

<sup>207</sup> Rushford. Greg. Op. Cit.

		diri Petani India
Tidak menyetujui TFA	Mengurangi angka kelaparan dan mengurangi tingkat bunuh diri Petani India	Mengurangi kepercayaan negara anggota WTO lain terhadap India sebagai partner negosiasi yang berkomitmen

Sumber: Olahan Penulis

Dalam negosiasi *Bali Package* ini, India memiliki preferensi untuk tidak setuju dengan TFA atau setuju dengan TFA. Kedua preferensi memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Pada akhir negosiasi, India memilih untuk tidak setuju dengan TFA karena India akan mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan keputusan India untuk melakukan veto terhadap TFA meskipun ditentang oleh banyak negara anggota WTO lainnya. *Win-set* yang dimiliki oleh India pada level II preferensi India adalah berukuran kecil. Dikarenakan pada preferensi yang dimiliki oleh India untuk tidak terjadi kesepakatan TFA tersebut memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya.

#### **5.2.6. Preferensi: AS Menolak *Peace Clause* Tidak Terbatas Waktu**

Posisi AS untuk menolak permintaan India mengenai kenaikan subsidi hasil pertanian pada *Bali Package* memiliki keuntungan dan kerugiannya. Ketika India mengubah keputusannya untuk menolak peratifikasian TFA dan meminta kepada WTO agar *Peace Clause* menjadi tidak terbatas waktu, AS memilih preferensi untuk menolak permintaan tersebut. Karena pada awalnya AS dengan preferensi tersebut merasa akan mendapatkan keuntungan tidak akan terjadinya sebuah distorsi atau ketidakstabilan harga komoditas dunia.

Sedangkan kerugiannya kesepakatan TFA tidak akan bisa dilanjutkan karena adanya prinsip *Single Undertaking* yang dimiliki oleh WTO.

Ketika pemerintah domestik membeli pangan dari petaninya pada harga dalam negeri untuk mengamankan ketahanan pangan, hal tersebut pada peraturan WTO terhitung sebagai kotak kuning atau *amber box* (harus dikurangi). Pemberian subsidi pada hasil pertanian termasuk pada kategori *amber box* dikarenakan akan mendistorsi perdagangan atau mengganggu harga komoditas internasional.<sup>208</sup> Pemberian subsidi akan mempengaruhi harga pasar dan kuantitas produksi.<sup>209</sup> Oleh karena itu sesuai pada ketentuan perjanjian AoA, batas pemberian subsidi hasil pertanian negara berkembang tidak boleh lebih dari 10%. AS mengkhawatirkan jika subsidi tersebut ditingkatkan melebihi 10%, negara-negara berkembang dapat membanjiri pasar internasional dengan produk agrikulturnya karena dapat mengganggu harga komoditas dunia.<sup>210</sup> Hal tersebut yang membuat AS menolak permintaan India, sedangkan pada saat itu pula AS juga dapat mendapatkan kerugian tidak akan terjadinya kesepakatan TFA.

Perjanjian TFA merupakan perjanjian yang bertujuan untuk mengurangi halangan administrasi di pelabuhan dan bea cukai, dengan begitu akan menghemat biaya transaksi dan membebaskan aliran barang lintas negara.<sup>211</sup> Perjanjian ini juga akan menghilangkan hambatan non tariff, mempercepat pergerakan barang, dan mempermudah perizinan masuknya barang.<sup>212</sup> Diperkirakan perjanjian ini jika terlaksana, akan meningkatkan GDP secara global 960 milyar USD dan menciptakan 21 juta lapangan pekerjaan.<sup>213</sup> Selain itu,

---

<sup>208</sup> WTO. 2014. *"The Bali decision on stockholding for food security in developing countries"*. Dalam [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/agric\\_e/factsheet\\_agng\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/factsheet_agng_e.htm) Diakses 19 Maret 2017

<sup>209</sup> WTO. 2013. *"Briefing note: Agriculture negotiations — the bid to 'harvest' some 'low hanging fruit'"*. Dalam [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/mc9\\_e/brief\\_agneg\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/brief_agneg_e.htm) Diakses 19 Maret 2017

<sup>210</sup> Firmansyah. Fery dan Putu Hery. Op. Cit

<sup>211</sup> *Ibid.* Hlm 3.

<sup>212</sup> *Ibid.*

<sup>213</sup> Hufbauer. Gary dan Jeffrey Schott. 2013. *"Payoff from the World Trade Agenda 2013"* Dalam [http://www.iccindiaonline.org/reports/Peterson\\_Report.pdf](http://www.iccindiaonline.org/reports/Peterson_Report.pdf) Hlm 7. Diakses 24 Maret 2017.

perjanjian fasilitas perdagangan juga akan mengurangi biaya perdagangan global 14,1% untuk negara *low-income*, 15,1% untuk negara *middle-income* dan 12,9% untuk negara *upper-middle*.<sup>214</sup> Dengan begitu meningkatkan efisiensi bea cukai dan transportasi akan mengintegrasikan negara berkembang terhadap ekonomi global dan meningkatkan daya saing ekspor atau *Foreign Direct Investment* (FDI).<sup>215</sup> Jika TFA tidak terwujud maka AS akan kehilangan berbagai keuntungan yang didapat jika TFA sudah diterapkan.

Akan tetapi AS tetap menolak permintaan India karena AS meyakini akan dapat meneruskan negosiasi *Bali Package* tanpa India dikarenakan adanya Sesuai dengan peraturan yang dimiliki oleh WTO, jika pada sistem konsensus tidak bisa tercapai, dapat diberlakukan sistem pengambilan keputusan *voting* dengan berdasarkan asas *one country one vote*.<sup>216</sup> Jika 2/3 suara mayoritas menyetujui untuk meratifikasi perjanjian TFA, maka perjanjian tersebut akan diadopsi dan perjanjian tersebut hanya berpengaruh terhadap negara-negara yang menyetujuinya.<sup>217</sup> Namun sayangnya usaha AS untuk mengajak negara anggota WTO lainnya meneruskan negosiasi *Bali Package* tanpa India tidak berhasil. Tidak berhasil dikarenakan India sendiri merupakan negara dengan populasi terbesar kedua di dunia, sementara TFA sendiri jika diterapkan akan membutuhkan negara dengan populasi terbesar sebagai pasarnya.<sup>218</sup>

*Win-set* yang dimiliki oleh AS pada level II preferensi AS tidak menyetujui *Peace Clause* tidak terbatas waktu adalah berukuran besar. *Win-set* berukuran besar dikarenakan preferensi yang dimiliki AS untuk menolak *Peace Clause* tidak terbatas waktu memiliki kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan keuntungannya. Keuntungan yang didapatkan hanya sebatas pada tidak akan terjadi sebuah distorsi perdagangan. Sementara

---

<sup>214</sup> Babu Rajesh R. Op. Cit. Hlm 3.

<sup>215</sup> *Ibid.*

<sup>216</sup> WTO. "Whose WTO is it anyway?" Dalam [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org1\\_e.htm#ministerial](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org1_e.htm#ministerial) Diakses 25 Maret 2017

<sup>217</sup> *Ibid.*

<sup>218</sup> Sinhal. Kounteya. Op. Cit.

kerugiannya AS akan kehilangan keuntungan dari TFA yang memiliki dampak sangat besar bagi AS sendiri karena dapat dengan mudah barang produksinya masuk ke pasar negara berkembang.

### **5.2.7. Koalisi Kontituen: Kelompok Petani India**

Negosiator harus bisa membuat sebuah koalisi antara kelompok kepentingan agar terciptanya sebuah win-set. Koalisi disini berarti gabungan dari beberapa kepentingan hingga menjadi satu kesatuan dan membentuk sebuah win-set. Kelompok yang memiliki kepentingan besar pada suatu isu yang dinegosiasikan biasanya akan mempertahankan posisinya secara kuat pada isu tersebut. Adanya tekanan dari pihak atau kelompok yang memiliki kepentingan di domestik bersifat isolasionis (menolak kerjasama internasional) sehingga *win-set* menjadi lebih kecil dan kelompok kepentingan bersifat internasionalis (mendukung kerjasama internasional) sehingga *win-set* menjadi lebih besar.

Kelompok Petani India merupakan kelompok kepentingan di India yang berperan aktif pada negosiasi KTM ke-9 WTO. Pada bulan November 2013 sebelum KTM ke-9 dilaksanakan, kelompok ini meminta kepada Perdana Menteri Manmohan Singh untuk tidak membahayakan pengimplementasian *National Food Security Bill* (NFSB) milik India.<sup>219</sup> Mereka meminta Singh untuk tidak tunduk terhadap negara-negara maju seperti AS dan *European Union* (EU) yang menolak proposal G33 karena isinya yang harus mengamandemen *Agreement on Agriculture* (AoA).<sup>220</sup> AoA ini membatasi negara-negara berkembang anggota WTO untuk tidak menerapkan subsidi hasil pertanian lebih 10%. Akan tetapi dari tahun ke tahun, kebutuhan pangan India semakin meningkat dan kemungkinan besar harus melanggar AoA karena membutuhkan subsidi hasil pertanian lebih

---

<sup>219</sup> PTI. 2013. "Reject conditionalities on farm subsidy, farmers tell PM Manmohan Singh". Dalam <http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/reject-conditionalities-on-farm-subsidy-farmers-tell-pm-manmohan-singh/articleshow/25775044.cms> Diakses 1 Juni 2017

<sup>220</sup> *Ibid.*

dari 10%.<sup>221</sup> Oleh karena itu, Kelompok Pertanian India ini meminta kepada pemerintahan India untuk meminta kepada WTO diperbolehkannya menaikkan subsidi hasil pertanian dan Pemerintah India harus memiliki komitmen terhadap konstitusinya yaitu tepatnya pada NFSB.<sup>222</sup>

Permintaan Kelompok Petani India tersebut dilakukan melalui surat yang dikirimkan kepada Perdana Menteri Manmohan Singh, Menteri Pertanian Sharad Pawar dan Menteri Perdagangan & Industri Anand Sharma. Surat tersebut ditandatangani oleh 15 kelompok petani yaitu seperti Bhartiya Kisan Union, National Fish Workers Forum, Bharti Kisan Union, BJP Kisan Morcha, Kerala Coconut Farmer's Association, Shetkari Sangathana, Haritha Sena, Karnataka Rajya Ryotha Sangam, Uzhavar Ulaippalar Katchi, Vivasayigal Sangam dan lain sebagainya.<sup>223</sup> Pada surat ini, Kelompok Petani India meminta kepada pemerintah India untuk mempertimbangkan kembali bahwa keamanan pangan penduduk India lebih penting dari pada perjanjian fasilitas perdagangan.<sup>224</sup> Kemudian meminta India untuk tidak melemahkan posisinya pada proposal G33 agar tetap kukuh meminta subsidi hasil pertanian dinaikkan secara permanen.<sup>225</sup> Seperti pada surat tersebut yang mengatakan:<sup>226</sup>

*“It does not make any sense for India to trade off the very survival of its 600 million farmers and roughly 830 million hungry for the sake of a successful Doha round. India cannot dilute its position on the G 33 proposal and accept a Peace Clause which makes a travesty of the poverty and hunger faced by millions of Indians every day.”*

Pada surat ini pula, Kelompok Petani India menyebutkan bahwa AS dan EU yang menolak permintaan India untuk meningkatkan subsidi hasil pertanian berlaku tidak adil karena mereka sendiri yang dari tahun ke tahun meningkatkan subsidi hasil pertaniannya

---

<sup>221</sup> Bellman. Christophe. Op. Cit.

<sup>222</sup> PTI. Op. Cit.

<sup>223</sup> PTI. Op. Cit.

<sup>224</sup> Srivastava. Shruti. Op. Cit.

<sup>225</sup> *Ibid.*

<sup>226</sup> *Ibid.*



bahkan melebihi batas AoA.<sup>227</sup> Subsidi hasil pertanian AS dari tahun 1995 hingga 2010 meningkat hampir dua kali lipat dari 61 milyar USD menjadi 130 milyar USD. Sedangkan EU dari tahun 2002 subsidinya sebesar 75 milyar Euro hingga menjadi 90-79 Euro antara tahun 2006-2009.<sup>228</sup> Secara perhitungan, India akan memberikan subsidi makanan 60kg/orang dibawah Peraturan NFSB sedangkan AS menyediakan 385kg/orang untuk bantuan pangan dibawah program-program yang dibuat AS seperti kupon makanan, program nutrisi anak-anak dan lain sebagainya.<sup>229</sup> Pada tahun 2010, AS membelanjakan 94 milyar USD untuk program bantuan pangan domestik yang pada tahun 2012 mencapai 100 milyar USD.<sup>230</sup> Sedangkan India dibawah NFSB yang tidak lama dibuat, hanya membelanjakan 20 milyar USD saja.<sup>231</sup> Inilah yang membuat Kelompok Petani India merasa AS dan EU berbuat tidak adil dan tidak masuk akal jika menolak permintaan menaikkan subsidi hasil pertanian bagi negara India dan negara berkembang lainnya.

Setelah permintaan Kelompok Petani India dibawa oleh negosiator India ketika KTM ke-9 di Bali, akhirnya pada 7 Desember 2013 terjadilah kesepakatan *Peace Clause* yang telah disetujui oleh semua negara anggota WTO secara konsensus.<sup>232</sup> *Peace Clause* hanya bersifat sementara selama empat tahun sampai solusi permanen didapatkan.<sup>233</sup> Meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan permintaan Kelompok Petani India agar peningkatan subsidi hasil pertanian bersifat permanen, India sendiri tetap menyetujui kesepakatan tersebut.<sup>234</sup>

---

<sup>227</sup> South Solidarity Initiative. 2013. "Letter to Indian PM". Dalam <http://www.southsolidarity.org/wp-content/uploads/sites/2/2014/04/LETTER-TO-PM.pdf>. Diakses 2 Juni 2017

<sup>228</sup> *Ibid.*

<sup>229</sup> *Ibid.*

<sup>230</sup> *Ibid.*

<sup>231</sup> *Ibid.*

<sup>232</sup> WTO. Op. Cit.

<sup>233</sup> *Ibid.*

<sup>234</sup> Third World Network. 2013. "Indian farmers call for rejection of draft 'peace clause' solution". Dalam <http://notforsale.mayfirst.org/it/node/24320> Diakses 2 Juni 2017

Kemudian pada pertengahan tahun 2014, Narendra Modi menjabat sebagai Perdana Menteri India<sup>235</sup> dan ketika di hari mendekati untuk meratifikasi kesepakatan TFA, India menolak untuk meratifikasinya dikarenakan India merasa akan kehilangan posisi tawar terkait isu subsidi dan penguatan stok produk pertanian.<sup>236</sup> Dari keputusan yang diambil oleh India ini, kelompok-kelompok petani India mendukung keputusan Perdana Menteri India yang baru. Mereka meminta Pemerintah India untuk tetap terus berupaya mengkaitkan masalah keamanan stok pangan dengan TFA agar Pemerintah India lebih mementingkan keamanan pangan penduduknya daripada kerjasama internasional TFA.<sup>237</sup> Selain itu mereka juga meminta agar ditemukan solusi yang bersifat permanen karena *Peace Clause* yang sebelumnya disetujui oleh India pada KTM di Bali hanya bersifat sementara.<sup>238</sup> Seperti yang dikatakan oleh Yudhvir Singh dari Bharatiya Kisan Union, salah satu pimpinan kelompok petani di India.<sup>239</sup>

*“In the backdrop of rising costs and extremely volatile global market prices, to fulfil the constitutional obligation of food security to its people, and also to ensure the livelihood security of producers, the Government of India needs to sustain and increase domestic agricultural production through price support, procurement and other measures to achieve self-sufficiency in food production, across different food grains. This is all the more important in the context of hundreds of thousands of farmers committing suicides in desperation.”*

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kelompok-kelompok petani di India tidak setuju jika India lebih mengutamakan kerjasama internasionalnya di TFA daripada mengutamakan kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, keputusan akhir India sesuai dengan pernyataan Narendra Modi sebelumnya di pertemuannya dengan AS pada September 2014 adalah tidak mau melanjutkan perjanjian fasilitas perdagangan sebelum permintaan

---

<sup>235</sup> *Ibid.*

<sup>236</sup> Vazza. P. Agung. Op. Cit.

<sup>237</sup> Focus on The Global South. 2014. “Indian Farmers’ Organizations Urge Government to Stand Firm on Food Security at the WTO”. Dalam <https://focusweb.org/content/indian-farmers-organizations-urge-government-stand-firm-food-security-wto> Diakses 3 Juni 2017

<sup>238</sup> *Ibid.*

<sup>239</sup> *Ibid.*

mengenai subsidi hasil pertanian dengan sifat tidak ada batasan waktu disetujui oleh negara anggota WTO lainnya.<sup>240</sup>

*Win-set* yang dimiliki oleh India pada level II koalisi konstituen India adalah berukuran kecil. Dikarenakan kelompok domestik di India yang memiliki kepentingan terhadap negosiasi *Peace Clause* ini bersifat menolak kerjasama internasional. Kelompok ini merupakan koalisi atau gabungan kelompok-kelompok petani yang ada di India. Kelompok kepentingan ini menekan pemerintah India untuk lebih mementingkan kepentingan nasionalnya dibandingkan dengan kerjasama internasional (TFA).

### **5.2.8. Koalisi Konstituen: United States Council for International Business (USCIB)**

USCIB merupakan kelompok kepentingan di AS yang berperan aktif dalam negosiasi *Bali Package* terutama pada kesepakatan TFA. USCIB juga merupakan sebuah kelompok advokasi bisnis yang didirikan pada tahun 1945.<sup>241</sup> Kelompok bisnis ini memiliki tujuan untuk mempromosikan perdagangan bebas dan membantu AS sebagai representasi di bidang bisnis internasional.<sup>242</sup> Dengan berlandaskan tujuan tersebut, USCIB mendukung penuh pemerintah AS untuk mewujudkan kesepakatan TFA yang menjadi bagian dari negosiasi *Bali Package* WTO.<sup>243</sup> USCIB mendukung penuh kesepakatan TFA karena kesepakatan tersebut dapat memberikan keuntungan yang signifikan seperti mengurangi hambatan perdagangan antar negara, menciptakan 21 juta lapangan pekerjaan dan menambahkan satu triliun dollar AS terhadap perekonomian global.<sup>244</sup> Akan tetapi pada saat peratifikasian TFA 31 Juli 2014,

---

<sup>240</sup> Agence France-Press. Op. Cit.

<sup>241</sup> Devex. 2017. "*United States Council for International Business (USCIB)*". Dalam <https://www.devex.com/organizations/united-states-council-for-international-business-uscib-31155> Diakses 7 Agustus 2017

<sup>242</sup> *Ibid.*

<sup>243</sup> ICC. 2014. "*World Trade Organization Director-General Azevedo receives leadership award*". Dalam <https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/world-trade-organization-director-general-azevedo-receives-leadership-award/> Diakses 7 Agustus 2017

<sup>244</sup> Mulligan. Rob. 2014. "*Salvaging the WTO Trade Facilitation Agreement*". Dalam <http://www.uscib.org/salvaging-the-wto-trade-facilitation-agreement-ud-4810/> Diakses 7 Agustus 2017

India menolak untuk meratifikasinya karena India memiliki tuntutan untuk mengubah *Peace Clause* empat tahun menjadi tidak terbatas waktu.

Tuntutan India ini membuat USCIB merasa kecewa karena menghalangi terjadinya kesepakatan global yaitu TFA. Seperti yang dikatakan oleh Rob Mulligan, USCIB *Senior Vice President for Policy and Government Affairs*:

*“This is incredibly disappointing, a huge blow to prospects for continued global recovery, most notably in the least-developed countries. Implementing the TFA could have significantly boosted economic growth by adding \$1 trillion to the global economy, and creating as many as 21 million jobs, 18 million of those in developing countries.”*<sup>245</sup>

Oleh karena itu Mulligan mengharapkan kepada pemerintah AS untuk mengupayakan agar TFA tersebut tetap terus maju dan membuat kesepakatan *Bali Package* tidak batal. Mulligan menambahkan *“We hope the governments can find a way to resurrect the Trade Facilitation Agreement and somehow get the WTO back on track.”* Selain itu, USCIB dalam mengupayakan agar TFA tetap dapat dilanjutkan, CEO USCIB Peter Robinson mengirimkan surat kepada Representatif perdagangan AS Michael Froman untuk mengungkapkan bahwa USCIB kecewa terhadap perkembangan negosiasi *Bali Package* di WTO yang masih belum tercapai kesepakatan walaupun sudah melebihi *deadline* peratifikasian.<sup>246</sup> Pada surat tersebut USCIB menyatakan akan mendukung penuh usaha pemerintah AS untuk dapat mewujudkan kesepakatan TFA.<sup>247</sup> Tidak hanya itu, USCIB juga berkoalisi dengan *International Chamber of Commerce* (ICC) untuk membuat kampanye di sosial media yang memiliki tema *#savetheTFA*.<sup>248</sup> Kemudian USCIB juga bekerja sama dengan Institut Peterson untuk menganalisa berbagai keuntungan yang didapatkan jika TFA terimplementasikan dan juga

---

<sup>245</sup> Huneke. Jonathan. 2014. *“USCIB Deeply Disappointed by Failure to Implement WTO Trade Facilitation Agreement”*. Dalam <http://www.uscib.org/uscib-deeply-disappointed-by-failure-to-implement-wto-trade-facilitation-agreement-ud-4804/> Diakses 7 Agustus 2017

<sup>246</sup> *Ibid.*

<sup>247</sup> *Ibid.*

<sup>248</sup> Mulligan. Rob. Op. Cit.

bekerja sama dengan pemerintah AS, ICC dan beberapa koalisi bisnis global lainnya untuk membuat kesepakatan TFA kembali dapat diratifikasi oleh India.<sup>249</sup>

Berbagai upaya yang dilakukan oleh USCIB tersebut menunjukkan bahwa USCIB memiliki kepentingan terhadap kesepakatan TFA. Secara tidak langsung USCIB juga memiliki kepentingan terhadap permintaan India mengenai kenaikan subsidi hasil pertanian karena permintaan India tersebut menyebabkan terjadinya *deadlock* pada negosiasi kesepakatan TFA. Ini juga menunjukkan bahwa USCIB merupakan kelompok kepentingan yang mendukung kerjasama internasional. Maka *win-set* yang dimiliki oleh AS pada level II koalisi konstituen AS adalah berukuran besar.

### **5.3. *Overlapping Win-Set* antara India dengan Amerika Serikat**

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, sebuah perjanjian akan mungkin terjadi jika *Win-Set* atau kepentingan antar negara yang bernegosiasi saling tumpang tindih atau *Overlapping*.<sup>250</sup> Untuk melihat apakah pada negosiasi tersebut terjadi *overlapping* atau tidak harus mengetahui ukuran *win-set* masing-masing negara yang memiliki kepentingan pada negosiasi tersebut. Oleh karena itu pada penelitian ini, penulis menganalisa ukuran *win-set* India dan AS dengan cara melihat faktor-faktor *win-set* di level I dan level II pada masing-masing negara dan diakumulasikan apakah *win-set* negara tersebut besar ataupun kecil.

Dapat diketahui *win-set* milik India dilihat dari level I strategi negosiator, dimana India menggunakan strategi meningkatkan *bargaining position* dan berusaha meningkatkan

---

<sup>249</sup> *Ibid.*

<sup>250</sup> Putnam, D. Robert. Op.Cit. hlm 438

*win-set* Amerika Serikat yang menjadi oposisinya dalam negosiasi *Peace Clause*. Hal tersebut dilakukan India dengan cara berkoalisi dengan G33 dan menggunakan *power* politiknya untuk mengajukan *veto* terhadap TFA. Dengan menggunakan strategi tersebut maka *win-set* yang dimiliki oleh India pada level I terhitung kecil. Kemudian *win-set* milik India dilihat dari level II institusi politik domestik sistem pemerintahan, bahwa pemerintahan pusat atau *Union* India memiliki otoritas lebih besar dalam menyangkut kebijakan luar negeri. Maka *win-set* India pada level ini berukuran besar. Namun *win-set* India dilihat dari level II institusi politik domestik prosedur peratifikasian, India membutuhkan 2/3 suara dalam parlemennya untuk membuat atau menyetujui sebuah kebijakan baru yang harus mengamandemen konstitusinya. Oleh karena itu *win-set* India pada level ini berukuran kecil. Lalu pada *win-set* India dilihat dari level II preferensi, India memiliki preferensi untuk menolak kesepakatan TFA sehingga *win-set* India berukuran kecil. Berukuran kecil dikarenakan pada preferensi yang dimiliki oleh India untuk tidak terjadi kesepakatan TFA tersebut memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya. Kemudian terakhir pada *win-set* India dilihat dari level II koalisi konstituen, terdapat gabungan kelompok-kelompok petani India menolak kerjasama internasional (TFA). Kelompok kepentingan ini menekan pemerintah India untuk lebih mementingkan kepentingan nasionalnya dibandingkan dengan kerjasama internasional (TFA) sehingga *win-set* India berukuran kecil. Maka jika diakumulasikan *win-set* India dilihat dari kedua level, maka *win-set* yang dimiliki oleh India pada negosiasi *Bali Package* berukuran kecil.

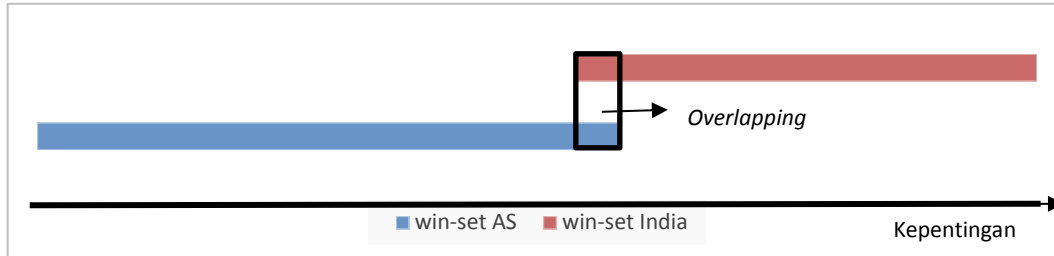
Tidak hanya melihat India, penulis juga menganalisa bagaimana ukuran *win-set* yang dimiliki oleh Amerika Serikat sebagai oposisi India pada negosiasi *Bali Package*. Dapat diketahui *win-set* AS dilihat dari level I strategi negosiator, AS menggunakan strategi menurunkan *bargaining position* dan berusaha memperbesar *win-set*nya agar dapat terjadi kesepakatan antara AS dengan India. AS mau menyetujui permintaan India asalkan India

menarik *vetonya* terhadap TFA. Strategi tersebut dinamakan sebagai *side-payment* karena AS memberikan apa yang diinginkan oleh India asalkan kepentingan AS juga tercapai. Oleh karena itu *win-set* AS di level I berukuran besar. Kemudian *win-set* AS dilihat dari level II institusi politik domestik sistem pemerintahan, bahwa pemerintahan pusat atau *Federal AS* memiliki otoritas lebih besar dalam menyangkut kebijakan luar negeri. Maka *win-set* AS pada level ini berukuran besar. Lalu *win-set* AS dilihat dari level II institusi politik domestik prosedur peratifikasian, AS membutuhkan 50%+1 suara mayoritas dalam parlemennya untuk membuat suatu kebijakan. Oleh karena itu *win-set* AS pada level ini berukuran besar. Kemudian *win-set* AS dilihat dari level II preferensi, AS memiliki preferensi tidak menyetujui *Peace Clause* tidak terbatas waktu sehingga *win-set* AS berukuran besar. Berukuran besar dikarenakan preferensi yang dimiliki AS untuk menolak *Peace Clause* tidak terbatas waktu memiliki kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan keuntungannya. Terakhir pada *win-set* AS dilihat dari level II koalisi konstituen, terdapat kelompok kepentingan USCIB yang memiliki kepentingan terhadap kesepakatan TFA. Secara tidak langsung USCIB juga memiliki kepentingan terhadap permintaan India mengenai kenaikan subsidi hasil pertanian karena permintaan India tersebut menyebabkan terjadinya *deadlock* pada negosiasi kesepakatan TFA. Ini menunjukkan bahwa USCIB merupakan kelompok kepentingan yang mendukung kerjasama internasional. Maka *win-set* yang dimiliki oleh AS pada level II koalisi konstituen AS adalah berukuran besar. Jika *win-set* AS pada kedua level diakumulasikan, maka *win-set* yang dimiliki oleh AS pada negosiasi *Bali Package* berukuran besar.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa *win-set* India berukuran kecil dan *win-set* AS berukuran besar. Namun meskipun *win-set* kedua negara pada negosiasi *Bali Package* ini memiliki ukuran yang tidak sama besar, tetap terjadi kesepakatan antar kedua negara yaitu kesepakatan *Peace Clause Open-Ended*. Kesepakatan ini dapat tercapai karena telah terjadi

*overlapping win-set* antara India dengan AS dimana *win-set* masing-masing negara saling bertemu seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.

**Gambar 5** *Overlapping win-set* antara Amerika Serikat dengan India



Ilustrasi penulis



## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pada negosiasi *Bali Package* telah terjadi *overlapping win-set* antara India dengan AS yang dibuktikan dengan adanya pencapaian kesepakatan *Peace Clause Open-Ended*. Sesuai dengan teori *Two Level Games* milik Robert D. Putnam, untuk mengetahui bahwa telah terjadi *overlapping win-set* diperlukan untuk mengetahui ukuran *win-set* masing-masing negara melalui level II (domestik) yang dipengaruhi oleh preferensi, koalisi dan institusi politik di domestik, kemudian di level I (Internasional) dipengaruhi oleh strategi negosiator di level internasional.

Di level I, faktor yang mempengaruhi *win-set* India adalah strategi negosiator India yang terdiri dari koalisi dengan G33 dan menggunakan *power* politik hak veto India untuk menolak peratifikasian TFA. Kemudian di level II, faktor yang mempengaruhi adalah faktor institusi politik domestik, faktor preferensi dan koalisi konstituen yang terdiri dari prosedur peratifikasian domestik India membutuhkan 2/3 suara, sistem pemerintahan India yang bersifat desentralisasi namun pemerintah pusat tetap memegang otoritas dalam hal kebijakan luar negeri, sistem partai India dimana partai yang menang akan mengangkat perdana menteri dan mendominasi pemerintahan, preferensi India untuk menolak meratifikasi TFA dan kelompok kepentingan petani India yang menekan pemerintah agar lebih mementingkan kepentingan nasionalnya.

Sedangkan di level I milik Amerika Serikat, faktor yang mempengaruhi *win-setnya* adalah strategi negosiator AS untuk menyetujui *Peace Clause* di akhir negosiasi. Strategi

tersebut dinamakan sebagai *side-payment* karena AS memberikan apa yang diinginkan oleh India asalkan kepentingan AS juga tercapai. Kemudian di level II, faktor yang mempengaruhi *win-set* Amerika Serikat adalah pemerintahan pusat atau *Federal* AS memiliki otoritas lebih besar dalam menyangkut kebijakan luar negeri, AS membutuhkan 50%+1 suara mayoritas dalam parlemennya untuk membuat suatu kebijakan, AS memiliki preferensi tidak menyetujui *Peace Clause* tidak terbatas waktu dan terdapat kelompok kepentingan USCIB yang memiliki kepentingan terhadap kesepakatan TFA.

Putnam juga mengatakan setelah melalui kedua level tersebut, sebuah perjanjian atau kesepakatan akan mungkin terjadi jika *win-set* saling tumpang tindih atau *overlapping*. Kemudian pada negosiasi ini telah menghasilkan *overlapping win-set* yaitu membuahkan hasil kesepakatan *Peace Clause* bersifat *open-ended* pada *Bali Package* dimana kepentingan India bertemu dengan kepentingan negara yang menolak permintaan India yaitu AS.

Meskipun *win-set* kedua negara pada negosiasi *Bali Package* ini memiliki ukuran yang tidak sama besar, tetap terjadi kesepakatan antar kedua negara yaitu kesepakatan *Peace Clause Open-Ended*. Kesepakatan ini dapat tercapai karena telah terjadi *overlapping win-set* antara India dengan AS dimana *win-set* masing-masing negara saling bertemu.

## **6.2. Saran**

Adapun saran dari penulis untuk peneliti yang akan membahas dengan topik penelitian yang sama dengan penulis yaitu untuk melanjutkan penelitian sampai ke tahap terakhir mengenai negosiasi *Bali Package* karena hasil kesepakatan tersebut masih bersifat sementara terutama pada kesepakatan *Peace Clause* dan topik ini masih berlangsung hingga saat ini. Penulis juga menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam melaksanakan penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan untuk adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan negosiasi *Bali Package*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Situs:

- Apeda Agri Exchange. 2013. “*Farmers urge PM to reject developed nations' WTO plans*”. Diakses 15 Mei 2017. <http://agriexchange.apeda.gov.in/news/NewsSearch.aspx?newsid=13569>
- Ashworth. David. 2014. “*Understanding India’s political system—making decisions*”. Market Realist. Diakses 21 Oktober 2016 <http://marketrealist.com/2014/11/understanding-indias-political-system-making-decisions/>
- Byjus. 2015. “*Foreign Policy Making In India*”. Diakses 5 Mei 2017 <http://byjus.com/free-ias-prep/foreign-policy-making-in-india>
- Bellman. Christophe. 2015. “*The Bali Agreement: Implications for Development and the WTO*” Diakses 11 Oktober 2016 <https://poldev.revues.org/1744>
- Damodaran. Harish. 2014. “*Explained: Understanding the permanent solution at WTO*”. Indian Express. Diakses 19 Oktober 2016 <http://indianexpress.com/article/india/india-others/understanding-the-permanent-solution-at-wto/>
- Dominguez. Gabriel. 2014. “*What will India's veto of WTO deal cost global trade?*”. Deutsche Welle. Diakses 11 Oktober 2016 <http://www.dw.com/en/what-will-indias-veto-of-wto-deal-cost-global-trade/a-17830770>
- Elections.in. 2016. “*Government of India*”. Diakses 6 Mei 2017 <http://www.elections.in/government/>
- Farid. 2014. “*India Tolak Kesepakatan WTO, Mengapa?*”. Liputan Islam. Diakses 20 Oktober 2016 <http://liputanislam.com/berita/india-tolak-kesepakatan-wto-mengapa/>
- First Post. 2014. “*India-US resolve food security deadlock: Here's what the fight was about*”. Diakses 10 Mei 2017 <http://www.firstpost.com/business/economy/india-us-resolve-food-security-deadlock-heres-what-the-fight-was-about-1981991.html>
- Firmansyah. Fery dan Putu Hery. 2013. “*WTO : Paket Bali Ciptakan Keuntungan US\$ 1 triliun*”. Tempo. Diakses 11 Oktober 2016 <https://m.tempo.co/read/news/2013/12/07/090535486/wto-paket-bali-ciptakan-keuntungan-us-1-triliun/2>
- IANs. 2014. “*India firm on objections to WTO Doha Round deal*”. Hindustantimes. Diakses 1 Desember 2016. <http://www.hindustantimes.com/business/india-firm-on-objections-to-wto-doha-round-deal/story-Mr0SNKJ3wNZnSThrFGLIKI.html>
- Insights. 2016. “*India and WTO – Detailed Analysis of All Related Issues and Concepts*”. Insight on India. Diakses 20 Oktober 2016

<http://www.insightsonindia.com/2016/01/20/india-and-wto-detailed-analysis-of-all-related-issues-and-concepts/>

Jafri. Afsar. 2013. “*India (G-33) Proposal on Food Security: A wrong move can jeopardize India’s food security forever*”. Diakses 5 Maret 2016 <http://focusweb.org/content/india-g-33-proposal-food-security-wrong-move-can-jeopardize-india%E2%80%99s-food-security-forever>

Kemenlu RI. 2014. “*World Trade Organization (WTO)*”. Diakses 5 Maret 2016 [http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-\(WTO\).aspx](http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-(WTO).aspx)

Kumar. Manjoj dan Tom Miles. 2014. “*India, isolated, toughs it out in WTO food-stockpiling row*”. Reuters. Diakses 19 Oktober 2016 <http://www.reuters.com/article/us-trade-wto-india-idUSKBN0IP1R720141105>

Kumar. Manoj dan Krista Hughes. 2014. “*India wins U.S. support for food scheme, ends WTO blockade*”. Uk Reuters. Diakses 9 Maret 2016 <http://uk.reuters.com/article/uk-india-trade-breakthrough-idUKKCN0IX0B020141113>

Marboen. Ade. 2013. “*Ketua KTM ke9 WTO: Kami berhasil*”. Antara News. Diakses 9 Maret 2016 <http://www.antaraneews.com/berita/408629/ketua-ktm-ke9-wto-kami-berhasil>

Mazumdaru. Srinivas. 2014. “*India's WTO veto may scupper global trade deal*”. Deutsche Welle. Diakses 11 Oktober 2016 <http://www.dw.com/en/indias-wto-veto-may-scupper-global-trade-deal/a-17820925>

Murphy. Sophia. 2014. “*What you need to know about the India-US agreement at the WTO*”. IATP. Diakses 19 Oktober 2016 <http://www.iatp.org/blog/201411/what-you-need-to-know-about-the-india-us-agreement-at-the-wto>

Panda. Ankit. 2013. “*India Wins Big With Global Trade Deal*”. The Diplomat. Diakses 19 Oktober 2016. <http://thediplomat.com/2013/12/india-wins-big-with-global-trade-deal-2/>

Press Information Bureau. 2013. “*Amendments in the National Food Security Bill Introduced in the Lok Sabha*”. Diakses 7 Mei 2017 <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=95441>

Priyadarshi. Shishir. “*Decision-Making Processes in India: The Case of the Agriculture Negotiations*”. WTO. Diakses 21 Oktober 2016 [https://www.wto.org/english/res\\_e/booksp\\_e/casestudies\\_e/case15\\_e.htm](https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/casestudies_e/case15_e.htm)

[Rushford. Greg. 2014. “\*The Consequences of Indian Obstructionism\*”. The Rushford Report. Diakses 7 Mei 2017 <http://www.rushfordreport.com/?m=201408>](http://www.rushfordreport.com/?m=201408)

S. Bageshree. 2009. “*Calorie intake criterion puts 50 per cent Indians below poverty line*”. The Hindu. Diakses 6 Maret 2016 <http://www.thehindu.com/business/Economy/calorie-intake-criterion-puts-50-per-cent-indians-below-poverty-line/article22587.ece>

Shiva. Vandana. "From Seeds of Suicide to Seeds of Hope: Why Are Indian Farmers Committing Suicide and How Can We Stop This Tragedy?" Huffington Post. Diakses 26 Mei 2017 [http://www.huffingtonpost.com/vandana-shiva/from-seeds-of-suicide-to\\_b\\_192419.html](http://www.huffingtonpost.com/vandana-shiva/from-seeds-of-suicide-to_b_192419.html)

Singh. P. J. 2014. "India's multi-faceted WTO refusal". The Washington Post. Diakses 21 Oktober 2016 [https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/08/05/indias-multi-faceted-wto-refusal/?utm\\_term=.68c1b1e920af](https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/08/05/indias-multi-faceted-wto-refusal/?utm_term=.68c1b1e920af)

Surabhi. 2013. "Ahead of WTO Talks in Bali, Focus on Peace Clause:.". The Indian Express. Diakses 15 Mei 2017 <http://www.pressreader.com/india/the-indian-express/20131127/281951720604850>

Vazza. P. Agung. 2014. "Maju Mundur WTO". Republika. Diakses 9 Maret 2016 <http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/14/08/29/nb1xwa26-maju-mundur-wto>

WTO. 2014. "The Bali decision on stockholding for food security in developing countries". Diakses 21 Oktober 2016 [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/agric\\_e/factsheet\\_agng\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/factsheet_agng_e.htm)

#### **Jurnal Online:**

Babu Rajesh R. 2014. "The Post-Bali Debacle and India's Strategy at the WTO: A Legal and Policy Perspective". Indian Institute of Management Calcutta. Diakses 19 Maret 2017 [https://www.iimcal.ac.in/sites/all/files/pdfs/wps\\_754\\_0.pdf](https://www.iimcal.ac.in/sites/all/files/pdfs/wps_754_0.pdf)

Chung Hwa Byung. 2014. "A Two-Level Games Analysis of the Agricultural Trade Negotiations Between the United States and the European Community in the Uruguay Round". University of Massachusetts. Diakses 20 April 2016 [scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2350&context=theses](http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2350&context=theses)

Herwig. Alexia. 2014. "The wto and the doha negotiation in crisis". University of Antwerp. Diakses 21 Oktober 2016 <http://search.proquest.com/docview/1536376674/CFE9B7A9E9E24D18PQ/2?accountid=46437?>

Schoppa. J. Leonard. 1993. "Two-Level Games and Bargaining Outcomes: Why Gaiatsu Succeeds in Japan in Some Cases but not Others". Vol. 47, No. 3. The MIT Press. Diakses 19 Oktober 2016 [https://www.jstor.org/stable/2706980?seq=1#page\\_scan\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/2706980?seq=1#page_scan_tab_contents)

Trnik. Michal. 2008. "Two-Level Games and Base Politics: Understanding the Formulation of Czech and Polish Foreign Policy Responses to U.S. Military Base Deployment

*Proposals*". The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University. Diakses 20 Oktober 2016 [http://michal.trnik.com/prace/jones\\_final2.pdf](http://michal.trnik.com/prace/jones_final2.pdf)

Uddin. Fasih. 2015. "*Multilateral Trade Negotiations Doha to Bali and Beyond*". Diakses 19 Oktober 2016  
<http://eds.a.ebscohost.com/abstract?site=eds&scope=site&jrnl=18127347&AN=102106830&h=V1AgsCzTTfgWB2Eg6p6%2boStoOE%2bGAn4YNt%2feahY4LMwWsHfbhQO2LyzGoaUFWz85P8ScPCjPHt1Qj%2bnG1LqO5w%3d%3d&crl=c&resultLocal=ErrCrlNoResults&resultNs=Ehost&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d18127347%26AN%3d102106830>

**Jurnal:**

Putnam, D. Robert. 1998. "*Diplomacy and Domestic Politics : The Logic of Two-Level Games*". The World Peace Foundation and The Massachusetts Institute of Technology International Organization Vol. 42, No. 3. Summer

ICTSD dan FAO. 2013. "*G-33 proposal: early agreement on elements of the draft Doha accord to address food security*". California.